

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) ALAS KAKI

(Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**CICIK MAMLU'UL HIKMAH
NIM. 145030107111061**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

(Barang siapa berjalan di jalan Allah maka dia akan sampai pada tujuannya)

“Kata Mutiara Arab (Mahfudzat) Akbar Zainudin”

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alas
Kaki dalam Rangka Mengurangi Pengangguran (Studi pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Disusun oleh : Cicik Mamlu'ul Hikmah

NIM : 145030107111061

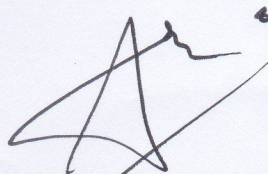
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 2 Mei 2018

Komisi Pembimbing,



Dr. Afi Haris Wanto, M.AP., MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 2 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Cicik Mamlu'ul Hikmah

NIM : 145030107111061

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

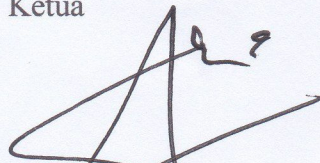
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya , pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juni 2018
Waktu : 08.00 – 09.00
Skripsi Atas Nama : Cicik Mamlu'ul Hikmah
Judul : Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alas
Kaki (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mojokerto)

Dan dinyatakan LULUS

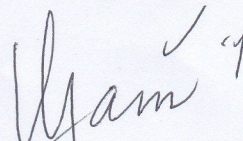
MAJELIS PENGUJI

Ketua



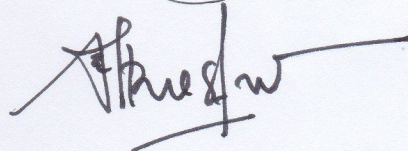
Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP., MMG
NIP. 198106012005011005

Anggota



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 194508171974122001

Anggota



I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 2011078312041000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada

1. Sang Inspirator, Bapak Usman sosok yang paling menginspirasi dan sosok yang selalu memberi semangat tidak pernah lelah berjuang, tidak mengenal pagi dan malam, setiap hari bekerja demi anaknya agar bisa memiliki pendidikan yang lebih tinggi darinya. Demi meluruskan jalan hidup anaknya dan demi kesuksesan anaknya. Serta kepada Ibu Khoirurriyatun, seorang ibu yang selalu mendoakan demi kesuksesan anaknya serta demi keselamatan anaknya di dunia maupun di akhirat dan mampu menjadi seorang ibu yang mendidik putrinya dengan sabar. Terimakasih teruntuk kedua orang tua saya yang tidak ada lelahnya memberi semangat baik dari segi materil maupun moril sehingga saya dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
2. Adikku tercinta, M. Masykur Ali Hisyam serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa.
3. Teman-temanku yang sudah kuanggap seperti dulur, Generasi ke-9 Al-amin Mojokerto khususnya untuk dulur-dulur koplakku Santri Sak Lusin (amal, atik, aza, cintia, dahlia, iffa, ike, irma, inun, rizki, lala)
4. Teman seperjuanganku Wulan, Nina, Lika terimakasih sudah menemaniku dalam perkuliahan
5. Untuk suami dan anak-anakku kelak kupersembahkan skripsi ini untukmu

Cicik Mamlu'ul Hikmah, 2018. **Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG.

RINGKASAN

Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) alas kaki dalam rangka mengurangi pengangguran. Industri kecil dan menengah alas kaki merupakan salah satu sektor informal yang dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja baik dengan menciptakan wirausaha baru di sektor industri alas kaki maupun membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Mojokerto, sedangkan situsnya berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dan di *home industri* kerajinan alas kaki di Prajuritkulon Kota Mojokerto. Fokus pertama dari penelitian ini adalah tentang Pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki. Fokus yang kedua mengenai kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Kota Mojokerto masih dibelit dengan masalah pengangguran terutama di kalangan lulusan Sekolah menengah ke atas karena kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini di Kota Mojokerto tidak dapat memenuhi lowongan pekerjaan di sektor formal. Sehingga untuk dapat mengurangi pengangguran di Kota maka industri kecil dan menengah alas kaki harus terus diberdayakan. Pemberdayaan yang dilakukan yakni dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, pelatihan, bantuan permodalan, dan mengembangkan promosi. Kendala yang dihadapi dalam memberdayakan industri alas kaki adalah kekurangan modal, keterbatasan untuk mendapatkan teknologi yang canggih, kesulitan dalam memasarkan produk alas kaki, dan kesulitan untuk membayar pekerja karena pendapatan dan pangsa pasar yang tidak menentu.

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rekomendasi yakni untuk dapat memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai fasilitator dapat memberikan bantuan permodalan dengan sistem dan manajemen keuangan yang baik, dan menyediakan sarana yang mendukung untuk mengembangkan promosi produk alas kaki.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Industri Kecil dan Menengah, Pengangguran.

Cicik Mamlu'ul Hikmah. 2018. **The Empowerment of Small and Medium footwear Industries (Study on Department of Industry and Commerce of Mojokerto City)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG.

SUMMARY

In this thesis researcher discuss about the empowerment of Small and Medium Industries (SMIs) footwear in order to reduce unemployment. Small and medium footwear industry is one of the informal sectors that can contribute to increase employment opportunities by creating new entrepreneurs in the footwear industry sector as well as opening job vacancies for surrounding communities.

This research using descriptive method with qualitative approach which is located in Mojokerto City, while its website is located at Department of Industry and Commerce of Mojokerto City and home industry of footwear which is located in Prajuritkulon Kota Mojokerto. The first focus of this research is on empowering small and medium footwear industries. A second focus on the obstacles in empowering small and medium footwear industries.

From the results of this study indicate that in 2017 the city of Mojokerto still complicated with unemployment problems, especially among high school graduates because the quality of human resources available today in the city of Mojokerto can't meet the workplace in the formal sector. So the way to reduce unemployment problems in Mojokerto City is empowered the small and medium footwear industry and it should continued. The empowerment is done with the creation of a conducive business climate, training, capital assistance, and developing promotions. The obstacles faced in empowering the footwear industry are lack of capital, limitations to sophisticated technology, difficulties in marketing footwear products, and difficulties to pay workers due to uncertain income and market share.

In this research, the researcher proposed to empower the small and medium footwear industry in Mojokerto City, Department of Industry and Commerce as facilitator can provide capital assistance with a good system and financial management and provide a supportive means to develop the promotion of footwear products.

Keywords: Empowerment, Small and Medium Industry, Unemployment.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alas Kaki dalam Rangka Mengurangi Pengangguran (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.d selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku ketua majelis penguji yang telah bersedia memberikan kritik dan saran pada skripsi ini
6. Bapak I Gede Putra Sri Sentanu S.AP, M.AP., Ph.D selaku anggota penguji yang telah memberikan kritik dan saran pada skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Bapak Ruby Haryanto, S.sos selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian
9. Bapak Hariyanto S.E selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 27 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Administrasi Pembangunan	27
1. Pengertian Administrasi Pembangunan	27
2. Paradigma Pembangunan.....	30
B. Pemberdayaan	34
1. Pengertian Pemberdayaan	34
2. Tujuan Pemberdayaan.....	36

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	37
4. Ruang Lingkup Pemberdayaan	38
5. Tahap Pemberdayaan	40
6. Model-model Pemberdayaan	42
7. Pendekatan Pemberdayaan	45
8. Faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan	49
C. Pengangguran	53
1. Pengertian Pengangguran	53
2. Jenis Pengangguran	54
D. Konsep Industri Kecil dan Menengah	55
1. Pengertian Industri	55
2. Industri Kecil dan Menengah	56
3. Masalah yang Dihadapi Industri Kecil dan Menengah	57
4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	64
B. Fokus Penelitian	65
C. Lokasi dan Situs Penelitian	66
D. Jenis dan Sumber Data	67
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Instrumen Penelitian	71
G. Analisis Data	73
H. Keabsahan Data	76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Keadaan Geografis Kota Mojokerto	79
2. Keadaan Demografi Kota Mojokerto	81
3. Keadaan Perekonomian Kota Mojokerto	82
B. Gambaran Umum Situs Penelitian	
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	85
a) Visi dan Misi	85
b) Struktur Organisasi	87
c) Tugas Pokok dan Fungsi	90
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	
a) Struktur Organisasi	92
b) Tugas Pokok dan Fungsi	94
3. Gambaran Umum Industri Alas Kaki di Kota Mojokerto	96

C. Penyajian Data	
1. Pemberdayaan Industri kecil dan menengah Alas Kaki oleh Pemerintah dan Pengrajin Alas Kaki	98
a) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	110
b) Bantuan Permodalan	116
c) Pelatihan	122
d) Mengembangkan Promosi	128
2. Kendala dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki	135
a) Kekurangan Modal	136
b) Keterbatasan Teknologi	141
c) Kesulitan Membayar Pekerja	144
d) Kesulitan Pemasaran	147
D. Analisis Data	
1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki dalam Rangka Mengurangi Pengangguran	152
a) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	152
b) Bantuan Permodalan	154
c) Pelatihan	156
d) Mengembangkan Promosi	159
2. Kendala dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alas Kaki dalam Mengurangi Pengangguran	161
a) Kekurangan Modal	162
b) Keterbatasan Teknologi	163
c) Kesulitan Membayar Pekerja	165
d) Kesulitan Pemasaran	165

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	168
B. Saran	172

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Realisasi Jumlah Unit Usaha IKM dan Penyerapan Tenaga Kerja IKM 2014-2016.....	7
2.	Perkembangan Jumlah Unit IKM alas kaki dan Penyerapan Tenaga kerja 2013-2016	9
3.	Penelitian Terdahulu.....	22
4.	Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto di Bidang Perindustrian Tahun 2017	104
5.	Daftar Realisasi PMIKM Tahun 2004-2014 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	121
6.	Piutang Modal Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki Kota Mojokerto Tahun 2004-2014.....	140

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Grafik Jumlah Pengangguran di Kota Mojokerto	10
2.	Model Interaktif Miles Huberman dan Saldana	75
3.	Peta wilayah Kota mojokerto.....	80
4.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	89
5.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	93
6.	Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	113
7.	Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	127
8.	Kegiatan promosi yang dilakukan melalui Pesta Rakyat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	131
9.	Media Promosi melalui papan sentra yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	132
10.	Promosi yang dilakuan oleh Bapak Sujono melalui <i>Show Room</i>	133
11.	Teknologi yang dimiliki oleh Bapak Wulyatin dalam memproduksi sepatu kulit.....	142
12.	Teknologi dan kondisi <i>home industri</i> Ibu Supiah	143
13.	Pekerja di industri alas kaki Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto	146
14.	Pekerja di industri alas kaki Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto	146
15.	Media pemasaran (Neon Box) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	151

16. Media pemasaran (Rak Display) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto 151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses kegiatan yang menjadi prioritas utama di negara berkembang untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan dan berlangsung terus menerus yang dilakukan secara sadar dan terencana. Menurut Tjokroamidodo 1991 dalam Suryono (2010:3) “Pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”.

Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kategori negara berkembang untuk dapat mewujudkan tujuan nasionalnya maka negara Indonesia terus melakukan berbagai macam pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sebagaimana yang telah diamanatkan pada konstitusi Undang-Undang 1945 di alenia ke-4 yang menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu jalan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan yang meliputi sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pembangunan nasional menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, terciptanya sektor ekonomi yang kokoh, dan terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sehubungan dengan itu, menurut (Tjiptoherijanto,1993:4) pembangunan nasional yang dititik beratkan pada pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempersiapkan kerangka landasan bagi proses pembangunan yang berkelanjutan yang memprioritaskan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pembangunan ekonomi menjadi salah satu titik dari pembangunan nasional akan tetapi masalah pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang menghambat proses pembangunan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas utama untuk dapat dituntaskan dalam prospek 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mulai meningkat tajam sejak tahun 2016 yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 7,1 persen dan ditargetkan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing sebesar 7,5 persen

dan 8,0 persen. Target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran di Indonesia dengan target 4,0 – 5,5 persen pada tahun 2019.

Dalam konteks pengangguran, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup luas dan memiliki penduduk yang sangat padat, bahkan sebagian besar adalah penduduk usia produktif. Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja maka akan menimbulkan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 128,06 juta orang. Jumlah tersebut naik sebesar 2,62 juta dibanding pada Agustus 2016 yang sebanyak 125,44 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dibandingkan Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang (<http://ekonomi.kompas.com>).

Pemecahan masalah mengenai pengangguran memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Menurut (Siagian, 2014:24) “Masalah pengangguran sungguh merupakan masalah yang sangat rumit, dikarenakan antara lain jenisnya yang beraneka ragam dan implikasinya yang bersifat multifaset yang berarti pemecahannya pun menuntut pendekatan yang multifungsional dan lintas sektoral”. Lebih lanjut menurut (Siagian, 2014:27) pengangguran pada dasarnya merupakan suatu tantangan yang harus diselesaikan secara bersama yang melibatkan pemerintah, swasta maupun masyarakat, sehingga salah satu yang menjadi alasan mengapa pembangunan ekonomi ditempatkan pada peringkat

teratas dalam skala pembangunan nasional yang harus terselenggara dengan tingkat efesiensi dan efektivitas yang tinggi. Pembangunan agar dapat memenuhi prinsip berkeadilan dan merata maka membutuhkan peran pemerintah yang tentunya bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan dengan penataan daerah yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah”.

Sering dengan adanya konsep desentralisasi tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian suatu daerah dapat melakukan berbagai macam pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang dapat dilakukan berdasarkan potensi yang ada di daerahnya. Dengan mengarah pada salah satu tujuan utamanya yakni untuk memajukan perekonomian suatu daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pembangunan yang dilakukan di daerah yang meliputi daerah perkotaan maupun pedesaan pada dasarnya merupakan salah satu bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang harus diselenggarakan dengan memprioritaskan pada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berdasarkan RPJMN 2015-2019

tentang Agenda Pembangunan Wilayah salah satu cara untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa-Bali berdasarkan potensi yang dimilikinya adalah melalui industri. Menurut (Siagian, 2014:86) “konsep industrialiasi pada dasarnya merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh negara-negara berkembang untuk melakukan pembangunan”. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk pada kategori negara berkembang dapat memanfaatkan potensi industrinya dalam pembangunan. Potensi yang dimiliki beberapa daerah di Indonesia yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM). Industri kecil dan menengah merupakan salah satu program yang telah dikembangkan oleh pemerintah sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional dengan didukung oleh dunia usaha untuk meningkatkan kekuatan ekonomi lokal. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, hal ini sependapat dengan (Ratnasari 2011: 5) yang menjelaskan bahwa ” IKM berperan penting dalam upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran dan merupakan sektor yang potensial dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jika sektor IKM dikembangkan dengan baik, maka kesempatan kerja yang tercipta pun semakin banyak”.

Meskipun segala upaya untuk mengurangi pengangguran terus menerus dilakukan, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak cukup dilakukan dengan memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung, hal ini dikarenakan masalah pengangguran bisa diminimalisir dengan adanya program kegiatan yang

memprioritaskan pada peningkatan kualitas hidup manusia yang dilakukan melalui pemberdayaan. Sejalan dengan itu, menurut (Mardikanto, 2015:28) “pemberdayaan merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (menganggur, miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya demi memperbaiki kehidupannya”.

Lebih lanjut menurut Shardlow 1998 dalam Adi (2008:78) pada intinya pemberdayaan merupakan suatu proses kegiatan yang membahas mengenai bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas dapat mengontrol kehidupan mereka sendiri dan melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, dan memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, serta pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Industri kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting menurut (Tambunan, 2002:21) industri kecil dan menengah sangat penting terutama dalam hal penciptaan pekerjaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat berlimpah mengikuti dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, dipihak lain keberadaan usaha besar tidak sanggup menyerap semua pencari kerja, hal ini dikarenakan pada umumnya kelompok usaha besar lebih memprioritaskan pada pekerja yang memiliki pendidikan formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang

cukup sedangkan industri kecil dan menengah sebagian pekerjaanya berpendidikan rendah.

Pertumbuhan industri kecil dan menengah di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan baik dari segi unit usaha, maupun penyerapan tenaga kerjanya. Dengan meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah tersebut maka akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Adapun berikut ini merupakan realisasi pertumbuhan industri kecil dan menengah dari segi jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2016 dalam Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016 :

Tabel 1 Realisasi Jumlah Unit Usaha IKM dan Penyerapan Tenaga Kerja IKM 2014-2016

No.	Uraian	Realisasi		
		2014	2015	2016
1.	Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha IKM	2,55%	4,61%	4,58%
2.	Jumlah Unit Usaha IKM	3,52 juta	3,68 juta	3,85 juta
3.	Penyerapan Tenaga Kerja IKM	9,04 juta	9,43 juta	9,75 juta
4.	Pertumbuhan Tenaga Kerja IKM	-13,03%	4,53%	3,42%

Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian 2016

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan IKM di Indonesia mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Penambahan unit usaha IKM tahun 2016 meningkat sebesar 4,58 persen dari 3.68 juta jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sedangkan tenaga kerja yang diserap mengalami pertumbuhan sebesar 3,42 persen dari 9,43 juta pada tahun 2015 menjadi 9,75

juta pada tahun 2016. Sektor IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,85 juta unit pada tahun 2016 dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 9 juta orang pada tahun 2016. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahwa sektor IKM juga berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi lokal yang diprioritaskan melalui industri kecil dan menengah telah diselenggarakan di beberapa daerah yang meliputi pedesaan maupun perkotaan, salah satu kota yang memiliki potensi untuk menumbuhkan ekonomi lokal melalui industri kecil dan menengah adalah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang memiliki banyak industri kecil dan menengah, industri yang dijumpai misalnya industri tekstil, cor kuningan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Akan tetapi salah satu industri yang memiliki jumlah terbanyak dibandingkan industri lainnya adalah industri alas kaki (<http://new.mojokertokota.go.id>).

Industri alas kaki merupakan salah satu industri kecil dan menengah yang saat ini sudah menyebar di beberapa kecamatan di Kota Mojokerto. Dari segi perkembangannya industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto mengalami perkembangan. Berikut disajikan perkembangan jumlah unit IKM alas kaki di kota Mojokerto dari Tahun 2015- 2017 :

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Unit IKM alas kaki dan Penyerapan Tenaga kerja 2015-2017

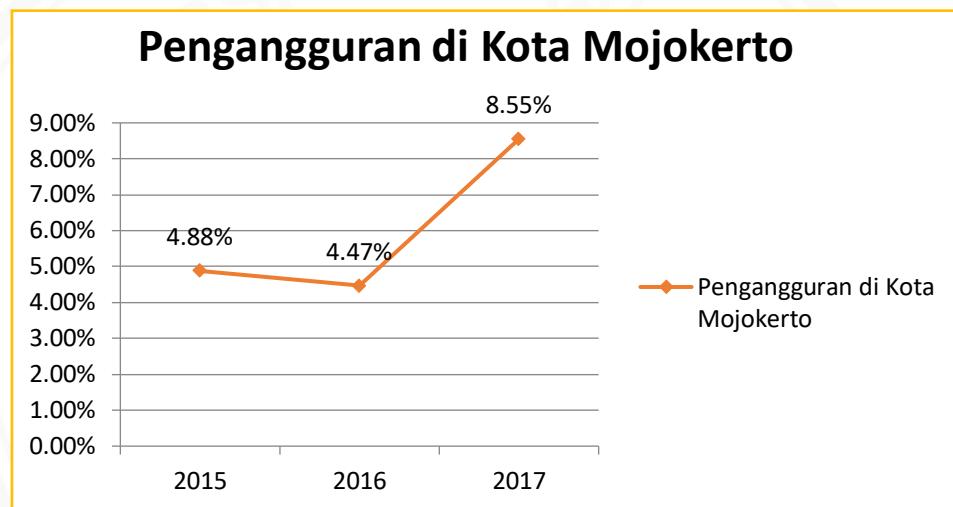
No.	Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi	Nilai Investasi
1.	2015	366	3.754	285.216.463.800	23.369.408.000
2.	2016	417	4195	288.848.058.800	24.247.208.000
3.	2017	418	4.183	288.732.058.800	24.247.208.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto 2017(data diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa mulai tahun 2015 sampai 2017 industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto dari segi unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi, dan nilai investasi pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2017, dari segi penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah alas kaki mengalami penurunan, sedangkan dari segi nilai produksi dan nilai investasi jumlahnya sama dengan tahun 2016.

Perkembangan industri alas kaki yang menurun pada tahun 2017 ini disebabkan oleh kurangnya permodalan, hambatan dalam mempromosikan produk, dan teknologi yang masih sederhana, penurunan di sektor industri kecil dan menengah alas kaki juga akan berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor informal sehingga berakibat pada naiknya angka pengangguran di Kota Mojokerto. Dengan demikian maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu untuk memberdayakan industri alas kaki dengan memberikan fasilitas maupun kebijakan bagi pengrajin alas kaki.

Pada tahun 2017 Kota Mojokerto masih dibelit oleh masalah pengangguran “Masalah pengangguran di Kota Mojokerto disebabkan oleh jumlah pencari kerja di setiap tahunnya yang cenderung naik terutama pada golongan terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas cenderung terjadi hal tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang tersedia”. Berikut jumlah pengangguran berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dari Tahun 2015 sampai 2017:



Gambar 1 Grafik Jumlah Pengangguran di Kota Mojokerto

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto 2017

Berdasarkan grafik tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pengangguran di Kota Mojokerto pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0.41 persen, sedangkan pada tahun 2017 jumlah pengangguran di Kota Mojokerto naik sebesar 4.08 persen. Kenaikan jumlah pengangguran di Kota Mojokerto pada

dasarnya dilatarbelakangi oleh jumlah angkatan kerja yang meningkat tanpa diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Selaras dengan hal tersebut seperti yang dikutip dari (<http://surabaya.tribunnews.com>) “Kota Mojokerto mulai dibelit masalah kenaikan pengangguran. Itu tak lepas dari jumlah pencari kerja di kota yang tiap tahun cenderung naik. Dari catatan BPS, jumlah pengangguran tahun ini mencapai 3.208 orang dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Tingkat kelulusan baru adalah penyebab utamanya”.

Dalam mengatasi persoalan pengangguran di Kota Mojokerto maka diperlukan upaya upaya untuk dapat memperluas kesempatan kerja. Mengingat angkatan kerja dari segi kualitas sumber daya manusianya memiliki kualitas yang rendah untuk dapat mengisi kesempatan kerja di sektor informal. Maka sektor informal dapat digerakkan untuk dapat memperluas kesempatan kerja yakni melalui industri kecil dan menengah khususnya industri alas kaki dengan menciptakan wirausaha baru di sektor industri kecil dan menengah alas kaki dan mempekerjakan masyarakat sebagai pekerja di industri alas kaki. Berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada tahun 2017 lapangan usaha industri kecil dan menengah diperkirakan memiliki kesempatan kerja sebanyak 19.326 orang atau sejumlah 10.5 persen. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa industri kecil dan menengah alas kaki dapat meminimalisir angka pengangguran di Kota Mojokerto dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Mojokerto.

Pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, adanya pemberdayaan IKM alas kaki di Kota Mojokerto bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti pengangguran, sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan dari pemberdayaan tersebut maka dibutuhkan peran dari pemerintah dimana instansi yang berperan di dalam bidang tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang notabnya memiliki peran sebagai fasilitator untuk memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto tidak lepas dari tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pemberdayaan IKM alas kaki. Sementara itu, dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, pada dasarnya merupakan intruksi dari pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 pasal 72 Tentang Perindustrian yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam kemiskinan melalui kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor sehingga untuk dapat mewujudkan itu semua maka dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas”.

Mengingat industri alas kaki merupakan IKM yang paling dominan di Kota Mojokerto namun di pihak lain berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto yang menyebutkan bahwa pengangguran di Kota Mojokerto mengalami kenaikan pada tahun 2017 maka bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan Industri kecil dan menengah (IKM) alas kaki berdasarkan berbagai macam program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto beserta kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah tersebut menjadi salah satu faktor yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alas Kaki (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) alas kaki di Kota Mojokerto?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan industri kecil dan menengah Kota Mojokerto yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disampaikan maka hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sebagai bahan kajian dan informasi pengetahuan yang lebih luas tentang administrasi publik khususnya tentang pemberdayaan masyarakat melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM).
2. Secara Praktis
Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah, masyarakat dan peneliti. Adapun beberapa kontribusi dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Bagi Pemerintah
Dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran khususnya bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan Industri kecil dan menengah dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan secara maksimal tentang pemberdayaan Industri kecil dan menengah (IKM) Alas Kaki di Kota Mojokerto.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana peneliti untuk memperluas pengetahuan terutama dalam praktik mengenai pemberdayaan Industri kecil dan menengah (IKM), sehingga peneliti mampu untuk menganalisis pengembangan disiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini secara jelas dan tepat, maka terdapat susunan per bab yang saling berkaitan. Adapun uraian masing-masing bab tersebut memuat hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang didalamnya terdapat unsur penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat beberapa uraian mengenai tinjauan atau kepustakaan yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian yang di dalamnya terdapat konsep dan pengertian berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan salah satu pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian,

lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, pengujian keabsahan data, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Mojokerto dan gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Selain itu juga penyajian data fokus penelitian, pembahasan dan analisis mengenai Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki dalam Rangka Mengurangi Pengangguran di Kota Mojokerto dimana hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran dan rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian awal BAB II ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun penelitian dari teori maupun konsep. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti. Suryolaksone (2015) “Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari Kota Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Program dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan Handycraft di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Kebijakan ini dilandasi oleh rencana strategis yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang sudah ada tolak ukurnya. Di tahun 2014, pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya harus membina 329 Usaha Kecil Menengah ditambah dengan 15 Sentra Kampung Unggulan dan Handycraft

adalah bagian dari pembinaan tersebut. Di dalam program ini telah diadakan seperti pelatihan-pelatihan di luar kota, magang, memberikan alat produksi seperti mesin jahit, promosi pasar ke website Disperindag, pameran dan pendampingan kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah. Program Pemberdayaan ini baru dimulai sejak tahun 2012, tetapi para pelaku Usaha Kecil Menengah sudah ada dari tahun 2002. Program ini sangat membantu produktifitas pelaku Usaha Kecil Menengah untuk mengembangkan potensinya, dari pembinaan tersebut pelaku usaha kecil menengah menjadi mengerti tentang bagaimana memasarkan produk lewat internet, design-design baru yang modern agar dapat diterima di pasar global. program tersebut memberikan dampak positif bagi para pelaku UKM Kerajinan Tangan Handycraft di Wilayah Kota Surabaya, karena selain meningkatnya omset penjualan UKM Handycraft tersebut, salah satu pelaku UKM Handycraft di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya yaitu Bu Sri Sulatiningsih mampu menjadi juara 3 lomba UKM Kerajinan Tangan tingkat provinsi Jawa Timur yang diadakan oleh PT.Semen Gresik dan menjadi Trainer jika ada pelatihan mengenai UKM Handycraft di Wilayah Jawa Timur.

Khaz (2017) mengangkat judul “Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Pasar Untuk Mengatasi Pencari Kerja di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kecamatan Bagan Sinembah, pemberdayaan dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor

lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini yang memungkinkan pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian pedesaan di Kecamatan Bagan Sinembah.

Atmojo, et.al. (2016) mengangkat judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Industri Kecil dan Menengah Batik di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban mulai dari tahap pemberdayaan pengrajin Batik Sumurgung sampai pada tahap pemasaran produk batiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perekonomian dan Pariwisata dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dari hulu ke hilir belum maksimal karena para pengrajin IKM Batik Sumurgung belum mampu untuk terjun pada pemasaran secara mandiri. Lemahnya kemampuan pengrajin dalam hal pemasaran dapat menurunkan omset penjualan bagi pengusaha menengah ke atas, dan bahkan mampu membuat pengusaha kecil terombang-ambing dan gulung tikar bagi pengrajin pemula. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan kontrol yang dilaksanakan oleh Disperpar pada kegiatan pemberdayaan IKM Batik Sumurgung belum berjalan dengan baik.

Rifa'I (2013) mengangkat judul “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara konseptual program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat merupakan lokasi desa atau kelurahan yang digunakan sebagai aktifitas pengkajian, analisis dan pemodelan serta pusat pembelajaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai pusat pengkajian pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan beberapa hasil kajian berupa data dan informasi penting yang berkaitan dengan pengelolaan program mulai dari identifikasi, pemetaan potensi, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, sampai dengan pelestarian program. Program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat ini berbasis pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bermula dari pengusaha pembuatan kerupuk di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program ini maka dapat membantu pengrajin kerupuk ikan yang ada di Desa Kedung Rejo untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka dan berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampung kerupuk ikan.

Rusdarti (2011) mengangkat judul “Pemberdayaan Pengrajin Tempe dalam Mengembangkan Sentra Industri Kecil Tempe di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan pengkajian pemberdayaan yang tepat akan digunakan metode analisis SWOT dan Regresi Linear Berganda untuk menentukan penentu yang paling dominan dalam produksi tempe. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan perubahan yang terjadi pada perajin tempe dapat diketahui dari deskripsi pola usahanya yang relatif kecil dan mikro serta kondisi sumberdaya manusia (SDM) yang rendah kualitasnya, sehingga masih sulit mengubah pola perilaku yang ada dan tetap terus turun temurun yang mengakibatkan pendapatan mereka menjadi rendah. Faktor keahlian atau skill yang digunakan dalam proses produksi secara signifikan memberikan kontribusi sebesar 67,8 persen terhadap hasil produksi pada industri kecil tempe. Ini menunjukkan kontribusi yang dominan dalam industri kecil tempe, artinya keahlian menjadi penting dalam industri pemanufakturan termasuk industri kecil tempe. Koefisien bertanda positif mengindikasikan bahwa semakin baik skill perajin tempe maka hasil produksi atau volume produksi mengalami peningkatan pada arah yang sama. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Suryolaksono (2015)	Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya	Deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari Kota Surabaya.	Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) diselenggarakan oleh DISPERINDAG Kota Surabaya yang didasarkan pada rencana strategis. Dalam pemberdayaan ini diadakan program pelatihan di luar kota, magang, memberikan alat produksi dan promosi melalui wibsite DISPERINDAG	Suryonolaksono (2015) mendeskripsikan mengenai program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki beserta kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan IKM alas kaki di Kota Mojokerto

2	Khaz (2017)	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Pasar Untuk Mengatasi Pencari Kerja di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014	Deskriptif dengan metode analisis kualitatif	Pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kecamatan Bagan Sinembah, pemberdayaan dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan.	Khaz (2017) mendeskripsikan mengenai pemberdayaan IKM secara umum yang ada. Pemberdayaan IKM tersebut dilakukan dengan melakukan pemberdayaan di sektor ekonomi masyarakat dan peningkatan dalam mutu pencari kerja. Sedangkan dalam penelitian ini pemberdayaan dilakukan khusus pada IKM alas kaki
---	-------------	---	--	--	--

3	Atmojo, et.al. (2016)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Industri Kecil dan Menengah Batik di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Pemberdayaan yang dilakukan dari hulu ke hilir belum maksimal karena para pengrajin IKM Batik Sumurgung belum mampu untuk terjun pada pemasaran secara mandiri. Lemahnya kemampuan pengrajin dalam hal pemasaran dapat menurunkan omset penjualan bagi pengusaha menengah ke atas, dan bahkan mampu membuat pengusaha kecil terombang-ambing dan gulung tikar bagi pengrajin pemula.	Atmojo, et.al. (2016) menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui produk unggulan daerah pada IKM Batik. Pemberdayaan IKM Batik dilakukan hanya dengan strategi pemasaran Batik. Sedangkan dalam penelitian ini pemberdayaan IKM dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pelatihan, bantuan permodalan dan mengembangkan promosi.
---	-----------------------	---	--	--	--

4	Rifa'I (2013)	Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat ini berbasis pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bermula dari pengusaha pembuatan kerupuk di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan melihat efektivitas pemberdayaan UMKM Krupuk Ikan.	Rifa'I (2013) menjelaskan mengenai Pemberdayaan UMKM melalui Program Pengembangan Labsite. Pemberdayaan UMKM ini dilakukan dengan penekanan terhadap UMKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir masyarakat sekitar. Sedangkan dalam penelitian pemberdayaan IKM Alas Kaki ini lebih menekankan perluasan kesempatan kerja melalui IKM alas kaki.
---	---------------	---	---	--	---

5	Rusdarti (2011)	Pemberdayaan Pengrajin Tempe dalam Mengembangkan Sentra Industri Kecil Tempe di Kota Semarang	Metode analisis SWOT dan Regresi Linear Berganda	Kecenderungan perubahan yang terjadi pada perajin tempe dapat diketahui dari deskripsi pola usahanya yang relatif kecil dan mikro serta kondisi sumberdaya manusia (SDM) yang rendah kualitasnya, sehingga masih sulit mengubah pola perilaku yang ada dan tetap terus turun temurun yang mengakibatkan pendapatan mereka menjadi rendah.	Rusdarti (2011) menjelaskan mengenai perkembangan pengrajin tempe yang terhambat oleh keahlian yang digunakan masih rendah. Sedangkan dalam penelitian ini keahlian pengrajin alas kaki dapat diberdayakan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
---	-----------------	---	--	---	--

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan proses pembangunan secara keseluruhan. Menurut Gant 1979 dalam Tjiptoherijanto (2010:131) “Istilah administrasi pembangunan mulai digunakan sejak dekade 1950-an terkait dengan kebutuhan pembangunan bagi negara-negara yang baru merdeka pada pasca Perang Dunia II”. Di dalam administrasi pembangunan terdapat peran administrasi publik yang mana administrasi publik memiliki peran untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan baik sosial, politik maupun ekonomi. Lebih lanjut menurut (Tjiptoherijanto 2010:133) menyatakan bahwa dalam melakukan pembangunan membutuhkan kapasitas daya dukung administrasi yang sangat besar, seperti yang dimiliki oleh administrasi publik di negara-negara maju.

Pada umumnya pembangunan telah menjadi bahasa dunia dimana semua negara di dunia mempunyai berbagai macam harapan yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan untuk mengejar masa depan agar tujuan negara tersebut dapat tercapai sesuai dengan kondisi dan tentunya menggunakan cara atau mekanisme yang berbeda untuk merealisasikannya (Siagian, 2014:7). Secara sederhana administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai administrasi di sektor pembangunan yang jika membahas mengenai administrasi pembangunan maka kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Administrasi pembangunan terdiri dari dua kata yakni administrasi dan pembangunan.

Pengertian administrasi banyak didefinisikan para ahli berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Menurut The Liang Gie dalam Indradi (2016:8) “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerjaan pokok yang dilakukan oleh kelompok atau orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”. Berbeda dengan The Liang Gie, menurut (Siagian, 2014:5) “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dilihat dari segi pengertian pembangunan, maka para ahli mempunyai sudut pandang yang berbeda untuk mendefinisikan pembangunan. Menurut Todaro (2000:21)

“Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan stuktur masyarakat secara keseluruhan baik itu stuktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual”.

Berbeda dengan Todaro, lebih lanjut menurut (Siagian, 2014:4) “Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir”.

Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan

secara sengaja dan sadar. Pembangunan juga memiliki prioritas perubahan baik di tingkat nasional maupun lokal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain perubahan, pembangunan juga mengandung makna pertumbuhan dimana pertumbuhan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu negara atau daerah.

Pengertian mengenai administrasi pembangunan telah banyak didefinisikan oleh para ahli berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Menurut (Hakim, 2011:4) “Administrasi pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh administrator dalam upaya mendorong masyarakat kepada modernisasi yang bersifat multidimensional secara administratif”. Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut (Siagian, 2014:5) “Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa yang bersangkutan untuk mencapai tujuan akhir”.

Berdasarkan pembahasan mengenai pengertian administrasi pembangunan yang dipaparkan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara yang mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan yang mana dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan negara tersebut.

2. Paradigma Pembangunan

Pembangunan bisa dikatakan sebagai salah satu instrumen untuk memajukan suatu negara, terutama negara berkembang. Seiring dengan kondisi masyarakat yang dinamis ditambah dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat maka hal ini juga akan berdampak pada pembangunan yang akan atau sedang dilakukan, sehingga paradigma pembangunan selalu akan mengalami pembaharuan atau perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat. Dengan melalui proses semacam itu, maka muncullah pergeseran beberapa paradigma yang baru.

Menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2010:16) paradigma diartikan sebagai pola, model atau cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metode tertentu dan pemecahan masalah tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain tidak dapat disamakan maupun dipersatukan, tetapi dapat diperbandingkan. Dalam pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang tidak terlepas pula dari teori-teori pembangunan yang dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun menilai dan mengukur kinerjanya.

Sehubungan dengan itu, menurut (Suryono, 2010:16) terdapat lima paradigma pembangunan yang mengalami pergeseran di negara berkembang diantaranya paradigma pertumbuhan dengan pemerataan, paradigma teknologi tepat guna, paradigma kebutuhan dasar pembangunan, paradigma pembangunan berkelanjutan dan paradigma pemberdayaan.

a. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan

Seiring dengan banyaknya kegagalan pembangunan yang terjadi negara-negara berkembang, maka pembangunan di negara negara berkembang bergeser kepada pertumbuhan dengan pemerataan yang dapat digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam ekonomi lemah. Empat pendekatan dasar tersebut adalah:

- 1) meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien,
- 2) mengalihkan investasi yang berorientasikan kepada masyarakat miskin,
- 3) mengalokasikan barang-barang konsumsi secara langsung,
- 4) penyediaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat.

Dalam paradigma ini kelompok yang menjadi fokus utama adalah penduduk negara yang tergolong dalam kategori miskin.

b. Paradigma Teknologi Tepat Guna

Munculnya paradigma ini merupakan pergeseran dari paradigma sebelumnya dimana paradigma pertumbuhan dengan pemerataan mengalami kegagalan dikarenakan tidak didukung dengan teknologi yang menyertainya, dalam paradigma ini teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin dalam artian teknologi yang digunakan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang mempunyai pendidikan serta keterampilan yang tinggi. Sehingga dengan

adanya kegagalan teknologi tersebut maka muncullah paradigma tepat guna. Paradigma ini menekankan bahwa perluasan tenaga kerja harus dilakukan dengan menciptakan barang-barang produksi yang berorientasi pada padat karya, sehingga pendekatan ini dapat dikatakan sesuai dengan negara-negara berkembang karena melalui teknologi yang seperti ini maka masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber penghasilan mereka. Sehingga dengan adanya teknologi tepat guna ini, maka akan meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, serta melatih sikap mandiri masyarakat.

c. Paradigma Kebutuhan Dasar Pembangunan

Lahirnya paradigma ini merupakan pergeseran dari paradigma sebelumnya yang mengalami kegagalan karena tidak didukung oleh institusi yang secara khusus untuk mengembangkannya, memerlukan harga yang cukup tinggi, para peneliti dan praktisi cenderung lebih menyukai teknologi yang tinggi dibandingkan teknologi padat karya.

d. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Ide dasar dari konsep paradigma ini bermula pada tahun 1972 yang mana pada saat itu sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkan, kehancuran dapat dilihat pada hutan hutan di Eropa Barat dan menurunnya kualitas lingkungan di negara-negara tropis, semakin menipisnya ozon, telah menunjukkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut maka

harus ada sebuah perubahan yang mana perubahan tersebut harus dimulai dari negara negara yang menyumbang terhadap kerusakan lingkungan yakni negara-negara industri yang telah banyak mengeksploitasi sumber daya alam. Sehingga dari konsep ini kemudian muncullah *Sustainability* yang diartikan sebagai suatu kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan generasi yang akan datang.

e. Paradigma Pemberdayaan

Konsep dari paradigma pemberdayaan muncul pada tahun 1992 yang disebabkan oleh adanya dua premis mayor yakni adanya kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud dalam hal ini adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan, harapan muncul akibat dari adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan inilah akan sangat nyata dirasakan oleh individu dan masyarakat. Sehingga dengan demikian pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif yang berasal dari pemberdayaan individual. Menurut Friedman 1992 dalam Suryono (2010:18) pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja akan tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki suatu posisi tawar baik nasional maupun internasional, selain itu

menurut Friedman konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik di tingkat ideologis maupun praktis. Di tingkat ideologis konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep “*top down dan bottom up*” antara *growth strategy* dan *people centered strategy*”. Sedangkan di tingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Konsep mengenai pemberdayaan pada dasarnya mulai muncul sekitar pada abad ke-20 tepatnya sekitar tahun 1970-an dan terus berkembang sampai dengan tahun 1990-an. Munculnya konsep pemberdayaan dipandang sebagai bagian dari aliran yang muncul pada abad ke-20 yang terkenal dengan aliran *post-modernism* (Suryono, 2010:260). Lebih lanjut, menurut Friedman 1992 dalam Suryono (2010:260-261) :

“Konsep pemberdayaan pada awalnya muncul akibat terjadinya kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi yang berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan sehingga membutuhkan alternatif pembangunan yang lain. Alternatif pembangunan tersebut harus dipusatkan pada manusia dan lingkungan yang didasarkan pada lingkungan kehidupan sosial. Dalam konsep pemberdayaan maka pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari kekuatan masyarakat itu sendiri. Kekuatan masyarakat merupakan kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan”.

Ditinjau dari segi pengertiannya menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007 :115) mendefinisikan pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment*

yang memiliki pengertian sebagai konsep alternatif pembangunan yang menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokratis, pembelajaran sosial dan melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai yakni masyarakat yang memiliki kekuatan yang mengarah kepada kemandirian. Lebih lanjut, (Sulistyani, 2004:9) menyebutkan dua poin khusus yang diperoleh dari makna pemberdayaan yakni:

- a. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat supaya mereka dapat melakukan pembangunan secara mandiri
- b. Suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu untuk mandiri.

Lebih lanjut (Sulistyani, 2004:10) mengatakan bahwa pada umumnya pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Sementara itu, ketika di dalam lingkup masyarakat terdapat kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di lingkungan masyarakat tersebut terdapat suatu ketidakberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian yang dipaparkan oleh para ahli di atas, jika disimpulkan maka pemberdayaan adalah keseluruhan upaya untuk mengakutalisasikan potensi yang dimiliki oleh

masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya supaya menjadi masyarakat yang mandiri.

2. Tujuan Pemberdayaan

Dari segi tujuan dari pemberdayaan maka para ahli memberikan beberapa argumentasinya yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Sehingga setiap orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Menurut (Tampubolon, 2001:51) pemberdayaan memiliki tujuan diantaranya :

- a. Meningkatkan potensi masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas hidup agar menjadi lebih baik
- c. Terciptanya masyarakat yang mandiri dan berswadaya
- d. Mampu mengadopsi inovasi serta memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

Lebih lanjut berbicara mengenai tujuan pemberdayaan menurut Ife 1995 dalam Suharto (2009: 58) pada dasarnya tujuan dilakukan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tidak beruntung. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan pemberdayaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat agar mereka memiliki kualitas hidup yang baik serta menjadikan mereka sebagai masyarakat yang mandiri untuk dapat memenuhi hidupnya. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat tidak lain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Di samping itu tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Pada dasarnya objek utama dari adanya kegiatan pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Mathews dalam Mardikanto (2015:105) mengatakan bahwa pada dasarnya prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten, sehingga prinsip akan berlaku dan diterima secara umum yang selanjutnya akan diyakini kebenarannya sehingga akan dijadikan sebagai pegangan dalam bertindak. Sementara itu menurut (Kartasasmita, 1996:76-79) ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam proses pemberdayaan masyarakat, diantaranya :

- a. Upaya ini harus terarah (targeted), populer disebut dengan pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan yakni supaya bantuan tersebut efektif, karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka selain itu sekaligus mengingatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok karena sendiri-sendiri itu sulit dapat memecahkan masalah yang dihadapinya juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanggulangannya dilakukan secara individu.

4. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pada konsep pemberdayaan terdapat ruang lingkup pemberdayaan yang digunakan untuk batasan apa saja yang ada di dalam pemberdayaan tersebut.

Menurut (Mardikanto, 2015:133) di dalam ruang lingkup pemberdayaan menambahkan pentingnya bina kelembagaan, bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Bina manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pengungian adalah untuk perbaikan hidup atas kesejahteraan manusia. Di samping itu dalam ilmu manajemen manusia menempati unsur yang paling unik, sebab selain sebagai salah satu sumber daya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Di dalam Bina manusia terdapat usaha untuk melakukan pengembangan kapasitas yang meliputi pengembangan kapasitas individu yang di dalamnya terdapat kapasitas kepribadian, kepastian di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan. Selain itu, terdapat juga pengembangan kapasitas sistem yang meliputi pengembangan kapasitas antar organisasi di dalam sistem yang sama dan pengembangan kapasitas organisasi di luar sistem.

b. Bina usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, hal ini dikarenakan bina manusia yang tanpa memberikan dampak atas manfaat bagi perbaikan kesejahteraan tidak akan laku dan

bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Di dalam bina usaha terdapat beberapa unsur yang mencakup (a) pemilihan komoditas dan jenis usaha (b) studi kelayakan dan perencanaan bisnis (c) pembentukan badan usaha (d) perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber daya pembiayaan (e) pengelolaan SDM dan pengembangan karir (f) manajemen produksi dan operasi (g) manajemen logistik dan finansial (h) penelitian dan pengembangan.

c. Bina lingkungan

Sejak dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan isu lingkungan menjadi sangat penting, hal ini terlihat dari kewajiban dilakukan AMDAL (Analisis Manfaat Dan Dampak Lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi. Sementara itu yang menjadi prioritas dalam bina lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan perindustrian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d. Bina kelembagaan

Di dalam bina kelembagaan maka komponen yang perlu diperhatikan meliputi komponen person, komponen kepentingan, komponen aturan, komponen struktur.

Berdasarkan pemaparan yang dipaparkan maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan mempunyai beberapa ruang lingkup. Sehingga pada dasarnya pemberdayaan tidak hanya bisa dilakukan kepada masyarakat saja, melainkan juga pada usaha, lingkungan, dan kelembagaan. Dengan demikian semua sektor baik itu masyarakat, usaha ataupun yang lainnya dapat diberdayakan sepenuhnya.

5. Tahap Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan maka pada dasarnya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Menurut (Sulityani, 2004:82) dalam pemberdayaan terdapat tiga tahapan diantaranya:

- a. Tahap penyadaran
Merupakan tahapan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahapan ini lebih merujuk kepada masyarakat untuk mampu merubah perilaku dan pola pikir untuk meningkatkan kapaitas dan potensi yang mereka miliki sehingga dapat membantu karakter orang tersebut berusaha untuk melakukan hal-hal yang berguna.
- b. Tahap transformasi
Merupakan tahap untuk meningkatkan kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar dapat membuka wawasan dan membeirkan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Dalam tahap ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar sehingga modal bagi masyarakat dalam mengembangkan dan menyalurkan tingkat kreatifitas masyarakat.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual
Pada tahap ini dilakukan peningkatan terhadap kecakapan dan keterampilan sehingga membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pda kemandirian. Dalam tahap ini pemberdayaan dilakukan supaya masyarakat memiliki sejumlah keterampilan sehingga kedepannya masyarakat mampu untuk berdaya saing baik dalam penciptaan produk inovatif maupun dalam menumbuhkan usaha mereka.

Berbeda dengan Sulistyani menurut Wilson dalam Mardikanto (2015:122) mengemukakan bahwa ada beberapa tahapan pemberdayaan yang harus diperhatikan diantaranya. :

- a. Menumbuhkan keinginan pada masyarakat untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian simpati, atau partisipasi masyarakat.
- b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
- c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat perbaikannya.
- e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditujukan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa di dalam proses pemberdayaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sehingga pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Di samping itu tahap-tahap yang dilakukan dalam pemberdayaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya aktor, komponen terpenting dalam tahap pemberdayaan adalah pemerintah dan masyarakat yang terkait. Dengan demikian maka pemberdayaan merupakan alat yang strategis untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dan mampu berdaya saing.

6. Model-model Pemberdayaan

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat harus didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan kehidupan mereka. Di dalam proses pemberdayaan maka ada beberapa model yang dapat digunakan. Model dapat diartikan sebagai contoh, pola, atau acuan, sehingga model pemberdayaan masyarakat memiliki pengertian contoh atau pola untuk melakukan upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang atau lembaga yang bersangkutan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal (Suryono, 2010:264).

Sehubungan dengan itu Menurut (Suryono, 2010:264-270) terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya :

a. Model *people centre development* :

Konsep model *people centre devolepment* merupakan gagasan dari korten. Model ini mencoba mengangkat martabat manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk yang memiliki harga diri dan memiliki kemampuan intelegensi dan mempunyai perasaan. Dalam hal ini manusia tidak bias disamakan dengan alat produksi melainkan manusia harus senantiasa dihormati dan dihargai. Hal itu semua dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga manusia dapat memiliki tempat dan martabat yang lebih layak. Model *people centre development* dapat dilakukan pada program pemberdayaan masyarakat

yang sering dijumpai pada program program yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti bantuan beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk memberdayakan dan membantu masyarakat agar tidak terus menerus masuk dalam kerangkap kemiskinan.

b. Model Lingkaran Setan Kemiskinan

Pada model ini ada suatu asumsi yang mengatakan bahwa negara miskin itu miskin karena masyarakat yang ada di negara tersebut memang miskin. Pada umumnya kemiskinan merupakan suatu lingkaran yang sering disebut sebagai lingkaran kemiskinan dimana kemiskinan itu dimulai dengan adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh kekurangan modal. Model lingkaran setan kemiskinan ini sering kita jumpai pada negara-negara berkembang karena negara berkembang cenderung tidak dapat mengelola pembangunannya yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat setempat. Sehingga harus dilakukan berbagai macam upaya yang lebih memprioritaskan pada memotong rantai lingkaran dan perangkap kemiskinan.

c. Model Kemitraan

Model kemitraan merupakan model pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya terdapat suatu ikatan kerjasama atas dasara kesepakatan dan

rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kaspasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertu dengan tujuan yang telah ditentukan sebaelumnya sehingga akan memperoleh hasil yang lebih baik. Suatu kemitraan akan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa syarat yakni ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan.

d. Model Grameen Bank

Salah satu negara yang menerapkan model pemberdayaan ini adalah Bangladesh yang memberikan program kemiskinan pada masyarakat. Model kerja sama dari Grameen Bank ini adalah memberikan pinjaman secara berkelompok dan khusus kepada perempuan untuk menolong mereka memerangi kemiskinan.

e. Model Sistim Kelompok Tanggung Renteng

Model ini pada umumnya banyak diadopsi oleh para pengelola koperasi di Indonesia. Khususnya pengelola koperasi simpan pinjam yang pada dasarnya penguatan kelompok dalam berinteraksi dengan manusia atau antar anggotanya, dengan menggunakan prinsip sebagai berikut: *pertama* system tanggung renteng merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia. *Kedua*, kelompok tanggung renteng merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana pendewasaan manusia yang dialakukan melalui perantara interaksi antar manusia dalam kelompok menuju manusia berkualitas. *Ketiga*, bahwa

kelompok tanggung renteng mengembangkan nilai-nilai umum dan nilai-nilai khusus yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh koperasi.

Berdasarkan pemaparan mengenai model di atas, maka dapat dikatakan bahwa model dalam pemberdayaan merupakan suatu pola atau bentuk yang digunakan untuk membantu proses pemberdayaan. Di dalam pemberdayaan maka model ini dapat digunakan sebagai pola pemberdayaan yang di dalamnya terdapat banyak model seperti model kemitraan, model lingkaran setan dan lain sebagainya. Dengan demikian pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa model yang tentunya juga melalui kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta maupun dengan pihak terkait lainnya.

7. Pendekatan Pemberdayaan

Axinn 1998 dalam Mardikanto (2015:159) mengartikan pendekatan sebagai suatu gaya yang menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan. Pada dasarnya di dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Menurut (Suharto, 2009:67) pelaksanaan pemberdayaan dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui lima pendekatan di antaranya :

- a. **Pemungkinan**
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. **Penguatan**
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Sehingga pemberdayaan harus diarahkan untuk dapat menghapuskan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan.

Berbeda dengan Suharto menurut Cook dan Macaulay (1997) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:95-97) menjelaskan bahwa dalam proses pemberdayaan terdapat delapan pendekatan yang perlu untuk diperhatikan diantaranya:

1) Hubungan pemberdayaan dengan visi dan nilai

Jika pemberdayaan tidak dipandang sebagai tiang penyangga visi organisasi, maka masyarakat akan memandangnya sebagai tindakan iseng atau kehilangan konteksnya sejak awal. Pemberdayaan harus menjadi bagian dari nilai kemasyarakatan, sehingga dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan.

2) Diarahkan dengan menggunakan contoh-contoh

Para pemimpin dapat memberi visi untuk masa mendatang dan memberikan dukungan serta dorongan yang sangat penting untuk menciptakan suatu lingkungan dimana orang-orang bertanggungjawab terhadap nasib mereka.

3) Berkomunikasi secara aktif

Dengan cara melibatkan masyarakat di dalam komunikasi dan pembahasan umpan balik secara tetap, maka akan mendorong terjadinya pemberdayaan.

4) Meninjau struktur organisasi

Pemberdayaan yang berhasil memerlukan perubahan yang terjadi di dalam struktur, sehingga para individu menjadi lebih dekat kepada titik keputusan, dan birokrasi dapat dibuang melalui rantai pengawasan yang lebih kecil.

5) Memperkuat kerja tim

Pemberdayaan membutuhkan dukungan. Kerja tim yang memiliki pemberdayaan adalah salah satu mekanisme terkuat untuk menyediakan suatu lingkungan bagi pengambilan inisiatif dan kadang-kadang berbuat kesalahan, tetapi juga untuk belajar dirinya.

6) Mendorong pengembangan pribadi

Orang memerlukan bantuan dan dorongan untuk membentuk rasa percaya diri mereka di dalam membuat suatu keputusan sendiri, hal ini berarti bukan saja memberikan pelatihan kepada orang-orang tersebut untuk berperan lebih banyak tetapi juga untuk mendemonstrasikan rasa percaya dan rasa hormat kepada individu tersebut.

7) Menjadikan jasa pelayanan kepada pelanggan sebagai fokus

Hasil akhir dari pemberdayaan seringkali berupa naiknya tingkatan jasa layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pegawai garis depan dan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan internal harus didorong untuk bertanggungjawab memuaskan pelanggan mereka.

8) Ukur pengembangan yang terjadi dan kenali serta hargai keberhasilan

Sebelum memulai proses pemberdayaan, suatu organisasi perlu menentukan ukuran keberhasilan dan membantu agar ukuran ini dapat dipahami dan disepakati oleh setiap orang.

Berbeda halnya dengan Kartasmita (1995) yang dikutip dalam Mardikanto (2015:162) pemberdayaan memiliki tiga pendekatan diantaranya :

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat.
- c) Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu pemberdayaan ada suatu pendekatan yang mana pendekatan ini merupakan suatu

gaya yang digunakan untuk proses pemberdayaan yang ditujukan untuk keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan. Dengan adanya pendekatan ini maka proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan

Pada umumnya dalam proses pemberdayaan adakalanya berjalan dengan mulus dan adakalanya, ada beberapa faktor yang menghambat dan ada pula faktor pendukung yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan. Menurut Lowe Priyatna (2013:6) ada beberapa faktor yang menjadi pendukung bagi proses pemberdayaan, diantaranya :

- a. Situasi yang dihadapi, kesediaan organisasi menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi, yaitu; *factor adapting, growing, consolidating, declining, surveying, and rebuilding*;
- b. Adanya pemikiran bahwa pemberdayaan itu tidak untuk setiap orang. Namun pada hakikatnya bahwa setiap orang ingin maju (diberdayakan) dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan ketrampilan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam arti sebenarnya.
- c. Ketergantungan adalah budaya, manusia terkadang dikondisikan untuk berperilaku tertentu. Kebiasaan ini ada dalam hirarki, birokrasi, kontrol manajemen yang tegas, akibatnya pola pikir orang tersebut terbentuk dalam rutinitas, karena dalam kerja selalu dihadapkan pada norma yang sama dan bergantung pada aturan dan kenyamanan bagi stabilitas

pribadi. Hal ini menciptakan pada kondisi kenyamanan (*comfort condition*), sehingga dapat memunculkan karakter ketergantungan.

- d. Dominasi kekuasaan, pemberian kewenangan atau kekuasaan oleh para manajer kepada bawahannya merupakan inti dari pemberdayaan. Namun apabila dicermati seksama, terkadang manajer tidak mampu menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain. Dorongan psikologis mengharuskan manajer untuk secara terus-menerus mencari kekuasaan dan pengaruh. Untuk itu, pemberdayaan memerlukan jenis manajer yang mampu dan siap menggantikan dorongan kekuasaan, individualistik kepada hubungan kerja tim yang empatik dengan manusia. Manajer yang tidak mampu menerima gaya perilaku yang sesuai dengan pemberdayaan harus meninggalkan organisasi atau mereka akan sabotase dan menghalangi perkembangan budaya baru.
- e. Lingkup pemberdayaan, dalam proses pemberdayaan, sangat penting apabila orang mempunyai pemahaman yang realistik tentang apa yang akan dicapai. Pemberdayaan memberikan setiap orang kesempatan untuk mendapat dan menerima ketrampilan dan tanggung jawab tambahan. Sejumlah pembinaan dan pengembangan diperlukan ketika seseorang berharap ingin menguasai ketrampilan tertentu. Proses pemberdayaan tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap, namun memerlukan proses yang cukup menyita waktu, hal ini karena kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda.

- f. Keyakinan dan kepercayaan, para manajer, terutama dalam organisasi yang menganut hirarki tradisional, dalam mengembangkan pemberdayaan harus mengubah persepsi mereka terhadap bawahannya karena sifat transaksi antara orang harus berubah. Hal paling mendasar adalah keyakinan bahwa masyarakat dapat dipercaya dan dapat berpikir tentang dirinya sendiri.
- g. Investasi sumber daya yang besar, orang perlu memahami proses dan mengetahui hasil yang akan dicapai. Mereka memerlukan pembinaan untuk melihat bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab mereka akan berubah dan ketrampilan yang diperolehnya bisa diimplementasikan secara efektif. Intinya pembinaan itu mahal dan membutuhkan waktu.

Sehubungan dengan itu pada dasarnya pemberdayaan juga tidak selalu berjalan mulus sehingga ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan lebih lanjut menurut Lowe dalam Prayanti (2013:8) ada beberapa faktor yang menjadi penghambat proses pemberdayaan diantaranya :

- a. Ketakutan, bentuk ketakutan ini diperlihatkan oleh; (1) Individu pada level menengah dan junior. Dimana mereka takut akan hukuman jika melakukan kesalahan. Ini merupakan suatu peninggalan dari gaya manajemen komando, tetapi ia menghalangi atau secara penuh memblok kemajuan pemberdayaan yang menekankan kebebasan untuk mengambil resiko (*taking risks*); (2) Individu-pun takut apabila tidak mendapat dukungan atau perlindungan yang dijanjikan dari

atasannya, jika terjadi kesalahan; (3) Takut kegagalan, hal ini bukan disebabkan karena soal hukuman atas kesalahannya, namun karena secara nyata nampak kebodohnya; dan (4) Ketakutan akan kehilangan pekerjaan.

- b. Ketidaknyamanan yang dialami oleh seseorang hal ini disebabkan oleh kebingungan mengenai peran baru yang diberikan setelah melakukan proses pemberdayaan.
- c. Para manajer atau bagian orang yang menjadi fasilitator bagi pemberdayaan kurang bisa memahami mengenai apa yang dibutuhkan oleh mereka.

D. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Definisi pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat.

Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekaman psikologis.

Menurut (Suroto, 1992:29) pengertian dari pengangguran itu sendiri adalah seseorang yang mampu bekerja akan tetapi tidak mempunyai pekerjaan dan ingin bekerja baik secara aktif, maupun pasif mencari pekerjaan. Sehingga perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut dengan tingkat pengangguran. Dengan demikian untuk mengukur tingkat pengangguran pada daerah tertentu maka dapat dilakukan dari presentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Berbeda dengan pendapat di atas menurut (Sukirno, 2008:13) “pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan”.

Berdasarkan pengertian pengangguran menurut para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang masuk dalam kriteria angkatan kerja, akan tetapi tidak memiliki pekerjaan. Sehingga seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Jenis Pengangguran

Menurut (Sukirno, 2008: 330), macam-macam pengangguran berdasarkan jam kerja dapat digolongkan menjadi empat, yaitu pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, setengah pengangguran dan pengangguran terbuka.

a. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran yang terjadi karena adanya keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan

b. Pengangguran musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam suatu tahunan.

c. Setengah menganggur (under unemployment)

keadaan dimana pengangguran dimana seorang pekerja melakukan kerja jauh lebih rendah dari jam kerja yang normal.

Sementara itu lebih lanjut Menurut (Sukirno, 2004 : 328) terdapat dua cara

untuk menggolongkan jenis-jenis pengangguran yaitu berdasarkan sumber atau

penyebab yang mewujudkan pengangguran dan ciri pengangguran tersebut.

Berikut jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

- 1) Pengangguran normal atau friksional adalah jenis pengangguran yang disebabkan penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
- 2) Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang disebabkan merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat di dalam perekonomian dibanding penawaran agregatnya.
- 3) Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi
- 4) Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

E. Konsep Industri Kecil dan Menengah

1. Pengertian Industri

Industri adalah suatu kegiatan di bidang ekonomi yang menghasilkan sebagian besar kehidupan manusia meliputi sandang, papan, dan pangan yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional maupun lokal. Berdasarkan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian:

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Lebih lanjut berdasarkan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pembangunan industri yang maju dapat direalisasikan melalui beberapa hal yakni melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berasaing, dengan mendayagunakan sumberdaya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang tentunya berlandaskan pada kerakyatan dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan pandangan para ahli menurut (Sukirno, 1995 :5) “Industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya”.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang baru yang memiliki nilai lebih tinggi dan menghasilkan pendapatan bagi pelaksananya serta memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional maupun lokal.

2. Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usah kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta usahanya berdiri sendiri. Keberadaan industri kecil tidak lepas dari regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Secara umum industri dapat dikatakan kecil, menengah dan besar tergantung pada sudut pandang masing-masing. Menurut (Tohar, 2001:2) mengemukakan bahwa:

“Industri kecil adalah industri yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan untuk membuka industri, memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan Industri yang berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum”.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang pekerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 yang didalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pengertian industri menengah berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.64 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi industri menengah adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000.

Lebih lanjut berdasarkan Badan Pusat Statistik (2013) usaha kecil menengah identik dengan Industri Kecil Menengah dan industri rumah tangga yang dikategorikan pada jumlah tenaga kerja, diantaranya :

- a. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.
- b. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang.
- c. Industri menengah dengan pekerja 22-99 orang.
- d. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

3. Masalah yang Dihadapi Industri Kecil dan Menengah

Seiring dengan perkembangan industri kecil menengah (IKM) maka tidak lepas dari permasalahan permasalahan yang menjadi sebuah tantangan untuk ditemukan solusinya. Menurut Tambunan (2002:70) masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil menengah adalah sebagai berikut :

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha kecil menengah khususnya industri kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh industri kecil menengah adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya informasi, kekurangan modal dan SDM yang relatif rendah. Kesulitan pemasaran tersebut dapat juga disebabkan oleh turunnya permintaan, tidak mampu menjual pada harga pasar, tidak mampu bersaing dalam kualitas produksinya.

b. Kesulitan bahan baku

Bahan baku merupakan salah komponen utama dalam proses produksi, keterbatasan bahan baku sering menjadi salah satu kendala yang cukup umum terjadi dan nantinya akan mengakibatkan pada kendala serius

bagi pertumbuhan atau kelangsungan produksi. Keterbatasan bahan baku umumnya terjadi akibat harga naik terlalu tinggi, dan persediaan bahan baku yang terbatas.

c. Kekurangan modal

Industri kecil menengah di Indonesia sering dihadapi masalah dalam segi finansial yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi (perluasan kapasitas produksi atau menggantikan mesin tua). Industri kecil menengah umumnya kurang berminat untuk meminta kredit dari perbankan dan bantuan dari BUMN hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan diantaranya adalah lokasi bank yang terlalu jauh dari lokasi industri yang relatif terisolasi, di samping itu persyaratan yang terlalu rumit juga menjadi alasan yang utama.

d. Kesulitan membayar pekerja

Kesulitan ini terletak pada pendapatan atau perolehan nilai produksi yang menurun sedangkan UMR pekerja mengalami kenaikan. Sehingga industri kecil menengah mengalami kesulitan untuk memberikan upah dan pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh IKM.

e. Keterbatasan teknologi

Umumnya industri kecil menengah seringkali terhambat oleh teknologi yang digunakan untuk proses produksi. Pada umumnya di

Indonesia teknologi yang digunakan oleh industri kecil menengah masih menggunakan teknologi yang tradisional. Hal ini menyebabkan tingkat produksi yang rendah dan kualitas produk yang dihasilkan juga rendah. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh kekurangan modal untuk membeli mesin-mesin baru untuk menyempurnakan hasil produksi.

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil menengah (IKM) maka dapat dikatakan bahwa dalam pertumbuhannya industri kecil menengah seringkali dihadapkan pada masalah yang meliputi kesulitan pemasaran, kesulitan pengadaan bahan baku, kekurangan modal, kesulitan membayar pekerja dan keterbatasan teknologi. Dengan demikian dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil menengah ini maka akan berdampak pada pertumbuhan industri kecil menengah.

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pada dasarnya pemberdayaan tidak hanya dilakukang pada ruang lingkup masyarakat akan tetapi juga dapat dilakukan melalui bidang usaha yakni melalui Industri Kecil Menengah (IKM). Menurut (Hafsah, 2004:43) menyebutkan bahwa dalam pemberdayaan industri kecil menengah merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan para pelaku usaha sehingga dalam pemberdayaan tersebut diperlukan upaya-upaya dalam mengembangkan industri kecil menengah yang meliputi:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif maka membutuhkan peranan pemerintah untuk dapat mengupayakan iklim usaha yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha dan keringanan pajak dan sebagainya.

- b. Bantuan permodalan
Permodalan merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memperluas program mengenai bantuan permodalan melalui kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi IKM, untuk membantu meningkatkan permodalannya, baik melalui sektor jasa financial formal maupun melalui sektor jasa informal, skema penjaminan, leasing dan dana model ventura.
- c. Perlindungan usaha
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama mengenai jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang peraturan pemerintah yang saling menguntungkan.
- d. Pengembangan kemitraan
Kemitraan perlu dikembangkan untuk dapat saling membantu antara IKM, atau antara IKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindari pada terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memberikan peluang bagi memperluas pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian IKM akan mempunyai kekuatan untuk bersaing dengan pelaku bisnis lainnya.
- e. Pelatihan
Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memberikan pelatihan untuk IKM baik dalam aspek kewiraswataan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.
- f. Membentuk lembaga khusus
Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangkan IKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh IKM.
- g. Memantapkan asosiasi
Asosiasi yang telah diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha anggotanya.
- h. Mengembangkan promosi
Promosi di sini perlu untuk dikembangkan dengan tujuan untuk mempercepat proses kemitraan antara IKM dengan usaha besar

diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan.

Pemberdayaan yang dilakukan di sektor industri bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada sektor industri yang terjadi di kalangan masyarakat. Adanya perbaikan pada sumber daya industri diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan perindustrian. Pemberdayaan dalam sektor industri kecil menengah dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas kepada pelaku IKM, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1) tentang Perindustrian bahwa yang dimaksud dengan pemberian fasilitas dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi
2. Bantuan dan bimbingan teknis
3. Bantuan bahan baku dan bahan penolong
4. Bantuan mesin atau peralatan
5. Pengembangan produk
6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri yang hijau
7. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran
8. Akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru
9. Penyediaan kawasan industri untuk industri kecil dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan.

Sementara itu jika dilihat dari sudut pandang para ahli menurut (Sedarmayanti, 2004:122) pemberdayaan IKM pada dasarnya lebih memprioritaskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia hal ini dikarenakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi disini merupakan prakondisi untuk mengaktualisasikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia

dapat ditempuh melalui pendidikan formal maupun informal dan penyuluhan serta penyediaan akses terhadap permodalan dan pelayanan umum lainnya. Di samping itu dalam pemberdayaan IKM maka hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya diversifikasi produk hal ini dikarenakan agar IKM dapat meningkatkan daya saing produknya melalui penganebaran produk yang dihasilkan.

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas mengenai pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kegiatan pemberdayaan tidak hanya dilakukan pada masyarakat saja akan tetapi juga dapat dilakukan pada bidang usaha yakni pada sektor industri. Pemberdayaan di sektor industri khususnya IKM (Industri Kecil Menengah) dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pemberian fasilitas yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas produk, pemberian bantuan permodalan dan lain sebagainya. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan pada IKM ini setidaknya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menekankan pada proses penyimpulan serta analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati, sehingga hasil atau data yang diperoleh relevan dengan kondisi yang ada. Menurut Bogman dan Taylor dalam Moloeng (2006:3) “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Sementara itu menurut (Nazar, 2005:54) “Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang meneliti mengenai kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi sistem, ataupun suatu peristiwa dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena yang akan menghasilkan data berdasarkan obyek yang diamati. Dengan demikian, maka penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang cocok untuk memahami tentang

pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) alas kaki dalam rangka mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat memiliki kejelasan dalam batasan maupun bahasan. Sehubungan dengan itu, menurut (Sugiyono, 2009:208) menegaskan bahwa untuk dapat mempertajam penelitian, maka dalam penelitian kualitatif harus ada fokus penelitiannya. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini peneliti menetapkan 4 fokus dari 8 kriteria pemberdayaan IKM menurut (Hafsah, 2004:43) hal ini dikarenakan 4 fokus tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan merupakan kegiatan atau program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam memberdayakan IKM Alas Kaki di Kota Mojokerto, 4 fokus penelitian tersebut adalah :

1. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang meliputi:
 - a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
 - b. Bantuan permodalan
 - c. Pelatihan
 - d. Mengembangkan promosi

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) alas kaki di Kota Mojokerto
 - a. Kekurangan modal
 - b. Keterbatasan teknologi
 - c. Kesulitan membayar pekerja
 - d. Kesulitan pemasaran

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi dari objek yang diteliti, untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kota Mojokerto. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Kota Mojokerto merupakan kota yang memiliki potensi IKM alas kaki yang cukup banyak dibandingkan dengan industri kecil menengah yang lain, sehingga wilayah tersebut memiliki potensi yang dapat mendukung untuk dilakukannya program pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) alas kaki di Kota Mojokerto. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya pada obyek yang diteliti. Situs penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang beralamat di Jalan Raya Meri No.7 Kota Mojokerto.

2. Unit-unit industri kecil menengah alas kaki.

Kedua Situs ini dipilih oleh peneliti karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto merupakan instansi yang berperan penting dalam pemberdayaan IKM alas kaki. Selain situs penelitian ini sesuai dengan substansi yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti dapat menemukan data dan informasi penting yang dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan penelitian. Sehubungan dengan itu, menurut (Sarwono, 2006:123) sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting karena hanya dengan mendapatkan data yang valid maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari obyek penelitiannya. Data primer berasal dari data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakannya (Pasolong, 2012:70). Peneliti memperoleh data primer menggunakan teknik wawancara dengan responden baik dari individu

maupun perseorangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto diantaranya Kepala Bidang Perindustrian
- b. Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.
- c. Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) alas kaki Kota Mojokerto.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung. Sehubungan dengan ini, menurut Pasolong (2012:70) "Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian baik berupa bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku atau majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi". Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
- b. Buku referensi, jurnal, artikel, maupun situs resmi yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang penting dalam metode penelitian, karena data yang dihasilkan nantinya akan dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi maupun data-data terjun langsung ke objek yang dijadikan sasaran penelitian yang dapat memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sehubungan dengan itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2008:231) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui informasi dari responden secara mendalam. Data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara terstruktur dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan teertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, selain itu dalam melakukan wawancara peneliti juga dapat mengumpulkan data dengan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat

membantu pelaksanaan wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan :

- a. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Kepala Bidang perindustrian dan Bina IKM.
- b. Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
- c. Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) alas kaki.

2. Observasi

Menurut Young dan Schmidt dalam Pasolong (2012:131) “Observasi merupakan sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak”. Sejalan dengan Pasolong menurut Moleong (2006:117) mengatakan bahwa “Observasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang menceritakan kepada peneliti mengenai apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika peneliti melakukan sebuah pengamatan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka obeservasi merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang sudah ditentukan dengan mencari objek-objek yang telah direncanakan sebelumnya kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan fokus penelitian dengan melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan atau apa yang ditelitinya kemudian dilakukann pencatatan atas pengamatan yang diperoleh. Obeservasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dan pada unit IKM alas kaki di Kota Mojokerto.

3. Dokumentasi

Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2008:240) teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pencatatan, meringkas maupun menganalisis dan memanfaatkan data yang ada di Instansi seperti dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencatat informasi yang riil berupa dokumen, catatan, dan laporan tertulis serta relevan dengan tujuan penelitian. Dengan membaca dokumen dan melakukan pencatatan melalui dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, dokumentasi ini dapat juga diperoleh melalui data dari dokumen, brosur, majalah, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sehubungan dengan itu, peneliti mengambil dokumentasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang berhubungan dengan penelitian baik berupa gambar maupun hasil wawancara.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung kegiatan untuk mengumpulkan data, selain itu instrumen juga dapat dikatakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena-fenomena yang berada di lapangan.

Menurut (Sugiyono, 2008:223) menjelaskan bahwa instrumen penelitian untuk mengumpulkan data itu adalah peneliti itu sendiri, hal ini dikarenakan dalam

penelitian kualitatif pada dasarnya belum memiliki kepastian seperti halnya penelitian kuantitatif, sehingga peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama dalam penelitian. Sehingga dari apa yang telah dipaparkan oleh Sugiyono maka dapat dikatakan bahwa jika di dalam suatu penelitian instrumen penelitiannya bukan peneliti itu sendiri maka sangat tidak mungkin sebab tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan fakta fakta yang terjadi di lapangan. Adapun instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri

Menurut (Sugiyono, 2008:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, diaman peneliti tersebut memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, pengumpulan data, analisis data dan membuat kesimpulan temuannya. Jadi dalam hal ini, peneliti sendiri yang melakukan penggalian data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti serta fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak sumber data dalam penelitian, selain itu pedoman wawancara ini juga merupakan panduan yang digunakan untuk menggali informasi dari objek penelitian. Fokus dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Catatan lapangan

Merupakan alat yang dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan yang berkaitan dengan pemberdayaan IKM alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

G. Analisis Data

Dalam suatu penelitian analisis data merupakan kegiatan yang mengkaji hasil data yang telah terkumpul. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2009:244) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat memberikan kemudahan untuk memahaminya dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan berdasarkan model interaktif menurut Miles Huberman dan Saldana (2014:33) yang mana di dalamnya terdapat empat tahap dalam metode analisis data, diantaranya:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Proses pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada obyek penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

2. Data Kondensasi (*data condensation*)

Proses kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Selain itu merupakan kegiatan mentransformasikan data mentah yang terdapat di lapangan. Kondensasi data juga merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan kemudian dicerna tema dan polanya, sehingga data yang telah dikondensasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kondensasi data dengan mengumpulkan data yang berasal dari gambaran umum, mengadakan wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Kepala Bidang Perindustrian dan Bina IKM.

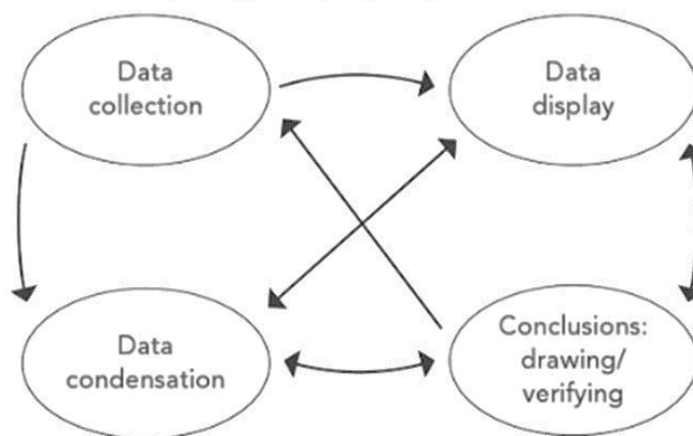
3. Penyajian Data (*display data*)

Setelah mereduksi data maka tahap kedua yang penting untuk dilalui adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberikan kemungkinan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Di samping itu dalam proses penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya, semua ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padat dan jelas. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu untuk diteliti. Sehubungan dengan itu dengan adanya penyajian data dalam penelitian maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kegiatan

analisis. Dalam penelitian ini data yang disajikan meliputi proses pemberdayaan IKM alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan IKM alas kaki.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusions*)

Tahap keempat dalam proses analisis data adalah menarik kesimpulan, di dalam proses penarikan kesimpulan ini peneliti memperoleh temuan yang berupa gambaran suatu objek yang berhubungan dengan penelitian yang masih samar sehingga nantinya setelah diteliti akan menjadi jelas dalam hal ini dapat berupa hubungan yang interaktif, hipotesis maupun teori. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Sehubungan dengan itu kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Berikut disajikan komponen-komponen analisis data model interaktif Miles Huberman dan Saldana :



Gambar 2 Model Interaktif Miles Huberman dan Saldana
Sumber: Miles Huberman dan Saldana (2014:33)

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kriteria yang menjadi patokan paata tingkat kebenaran data dalam penelitian dengan keadaan yang nyata dilapangan. Menurut Moleong (2012:320) keabsahan data harus memenuhi keadaan di antaranya :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar dapat diterapkan
3. Memperbolehkan keputusan yang dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralannya dari teman dan keputusan-keputusan.

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:270-277) ada beberapa kriteria keabsahan data diantaranya :

1. Standar kepercayaan (Credibility)

Dalam penelitian kualitatif untuk dapat menghindari data yang tidak valid maka perlu untuk diuji kredibilitasnya. Pengujian standar kepercayaan memiliki tujuan untuk melaksanakan penliaian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan dari data yang ditemukan di lapangan dapat mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil temuan. Sedangkan menurut Yusuf (2014:394) dalam standar kepercayaan keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketetapan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan focus penelitian, sehingga gara penelitian yang dilakukan membawa hasil yang diharapkan, maka peneliti kualitatif dapat menggunakan berbagai cara seperti memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di

lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sesuai atauran dan menganalisis kasus negatif.

2. Standar transferabilitas atau keteralihan (*Transferability*)

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke masyarakat. Transferabilitas dalam penelitian dapat dicapai dengan cara uraian rinci dan peneliti berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara rinci. Uraian tersebut diharapkan dapat mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang diperlukan oleh pembaca, agar pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.

3. Standar ketergantungan atau reliabilitas (*Dependability*)

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengulang atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian.

4. Standar confirmabilitas atau kepastian (*Confirmability*)

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji objektivitas penelitian. Dalam hal ini peneliti dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian ini, uji

kepastian hampir sama dengan uji kebergantungan sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut dapat memenuhi standar kepastian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Mojokerto

Kota Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini terletak 50 km barat daya Surabaya. Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Daerah Otonomi Kota Mojokerto berdiri pada tanggal 14 Agustus 1950. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 kemudian berubah status sebagai Kota Praja. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti daerah-daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, secara Umum wilayah Kota Mojokerto dapat dibagi menjadi 3 Kecamatan yang terdiri dari 18 Kelurahan dengan memiliki 666 Rukun Tetangga (RT), 175 Rukun Warga (RW). Kecamatan Prajurit Kulon di sebelah timur, Kecamatan Kranggan di tengah wilayah dan Kecamatan Magersari di sebelah barat.

terjadi hujan. Wilayah Kota Mojokerto terbentang pada 7° 33' Lintang dan 112° 28' Bujur Timur dengan batas Daerah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, di sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, yang membentang memisahkan wilayah Kota Mojokerto dengan Kabupaten. Di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Dilihat dari segi iklimnya iklim di wilayah Kota Mojokerto dicirikan dengan adanya musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan rata-rata 10,58 mm. Sedangkan temperatur mencapai 220 - 310 dengan kelembaban udara 74,3 - 84,8 Mb / hari dan kecepatan angin rata-rata berkisar 3,88 - 6,88 knot / bulan.

2. Keadaan Demografi Kota Mojokerto

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili di suatu daerah kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Penduduk merupakan suatu obyek maupun subyek pembangunan sehingga data kependudukan diperlukan untuk mengetahui profil penduduk di suatu wilayah.

Penduduk yang ada di Kota Mojokerto berasal dari berbagai etnik di antaranya Suku Jawa dan Madura serta sebagian kecil berasal dari keturunan Arab dan China. Sementara itu penduduk Kota Mojokerto mayoritas memeluk agama Islam kemudian minoritas memeluk agama Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Penduduk Kota Mojokerto tahun 2016 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 adalah 126.404 jiwa yang terdiri 62.196 jiwa penduduk laki-laki dan 64.208 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis

kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 0,97. Berdasar hasil dari Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2016, Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 140.161 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Penduduk laki-laki sebanyak 69.487 jiwa atau sebesar 49,58 persen; dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 70.674 atau sebesar 50,42 persen.

Dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kota Mojokerto adalah sebesar 98,32 persen artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki. Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 8.511 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2016. Pada tahun 2016 wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kelurahan Mentikan, yaitu sebesar 39.757 jiwa per km^2 disusul oleh Kelurahan Miji sebesar 23.460 jiwa per km^2 selanjutnya Kelurahan Jagalan sebesar 19.627 jiwa per km^2 .

3. Keadaan Perekonomian Kota Mojokerto

Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang tertinggi merupakan faktor penting sekaligus sebagai potensi besar yang dimiliki dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan nasional maupun daerah. Di Kota Mojokerto terdapat beberapa sektor penggerak ekonomi yang meliputi sektor pertanian, industri, listrik, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa. Dalam kurun waktu

beberapa tahun terakhir kondisi perekonomian dapat dikatakan membaik daripada tahun sebelumnya jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2016 semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2015. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2016 adalah sebesar 5,76 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 adalah 4.223,5704 milyar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 5.371,0286 milyar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada Tahun 2014 sampai Tahun 2016 masing-masing adalah sebesar 5,83 persen, 5,74 persen dan 5,76 persen. Pada tahun 2015 terjadi penurunan laju ekonomi hal ini disebabkan karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan terjadinya inflasi di beberapa komoditi. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan karena nilai tukar upiah terhadap dolar menguat dan terjadi deflasi di beberapa komoditi (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto dalam Angka 2017).

Sementara itu jika dilihat dari sektor lapangan usaha sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja usia 15 tahun keatas sebanyak 23.527 pekerja diikuti sektor Industri Pengolahan sebanyak 18.337 pekerja dan Jasa kemasyarakatan sosial dan perseorangan sebesar 11.734 pekerja. Dapat dilihat bahwa ada dua sektor ekonomi yang sangat dominan kontribusinya di Kota Mojokerto, yaitu sektor perdagangan dan industri pengolahan. Kedua sektor ini mempunyai peranan besar terhadap perekonomian

di Kota Mojokerto, sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, kedua sektor ini bisa digenjot untuk ditingkatkan produktivitasnya (Sumber:Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto).

Meskipun penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta diikuti dengan sektor industri dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup banyak akan tetapi masalah pengangguran masih menjadi persoalan yang membelit Kota Mojokerto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami kenaikan sebanyak 9,68% dari angka pengangguran pada tahun sebelumnya yakni sebesar 4,88% angka pengangguran di Kota Mojokerto pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,8% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 85,02 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 55,60% penduduk dengan jenis kelamin perempuan (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, Kota Mojokerto dalam Angka 2017).

Meskipun pada tahun 2017 dari segi pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami kenaikan, akan tetapi dari segi lapangan usaha, jumlah pengangguran di Kota Mojokerto mengalami kenaikan. Untuk dapat meminimalisir jumlah pengangguran di Kota Mojokerto maka diperlukan suatu upaya pengembangan ekonomi lokal berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh kota mojokerto yakni melalui industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah alas kaki merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dapat

menyumbang terhadap ekonomi lokal Kota Mojokerto sehingga untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki tersebut maka diperlukan suatu kebijakan, strategi dan program dari pemerintah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto.

B. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto merupakan salah satu instansi pemerintahan yang terletak di Jalan Raya Meri No. 07, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto diresmikan pada tahun 1993 oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia yaitu Bapak Bustanil Arifin, SH. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perindustrian dan perdagangan.

a. Visi dan Misi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki visi dan misi yang dicapai yakni “Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Modern, Berdaya Saing dan Mandiri”. Berikut adalah penjelasan mengenai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto :

- 1) Industri yang modern :
Kemampuan menggunakan teknologi yang mampu membuat produk berkualitas.
- 2) Industri yang berdaya saing
Kemampuan bertahan dan berdaya saing serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan berkembang cepat
- 3) Industri yang mandiri
Kemampuan untuk mengembangkan usaha dengan kekuatan sendiri yang dilandasi dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan produksional dengan memanfaatkan peluang dan fasilitas pengembangan usaha yang tersedia
- 4) Perdagangan yang modern
Kemampuan pengelolaan perdagangan yang dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi informasi
- 5) Perdagangan yang berdaya saing
Kemampuan di dalam memberikan pelayanan konsumen dengan nyaman, bersih, tepat waktu, berkualitas dan dengan harga terjangkau.
- 6) Perdagangan yang mandiri

Kemampuan mengembangkan usaha perdagangan dalam negeri, usaha ekspor terhadap produk dalam negeri dan mengendalikan produk produk impor.

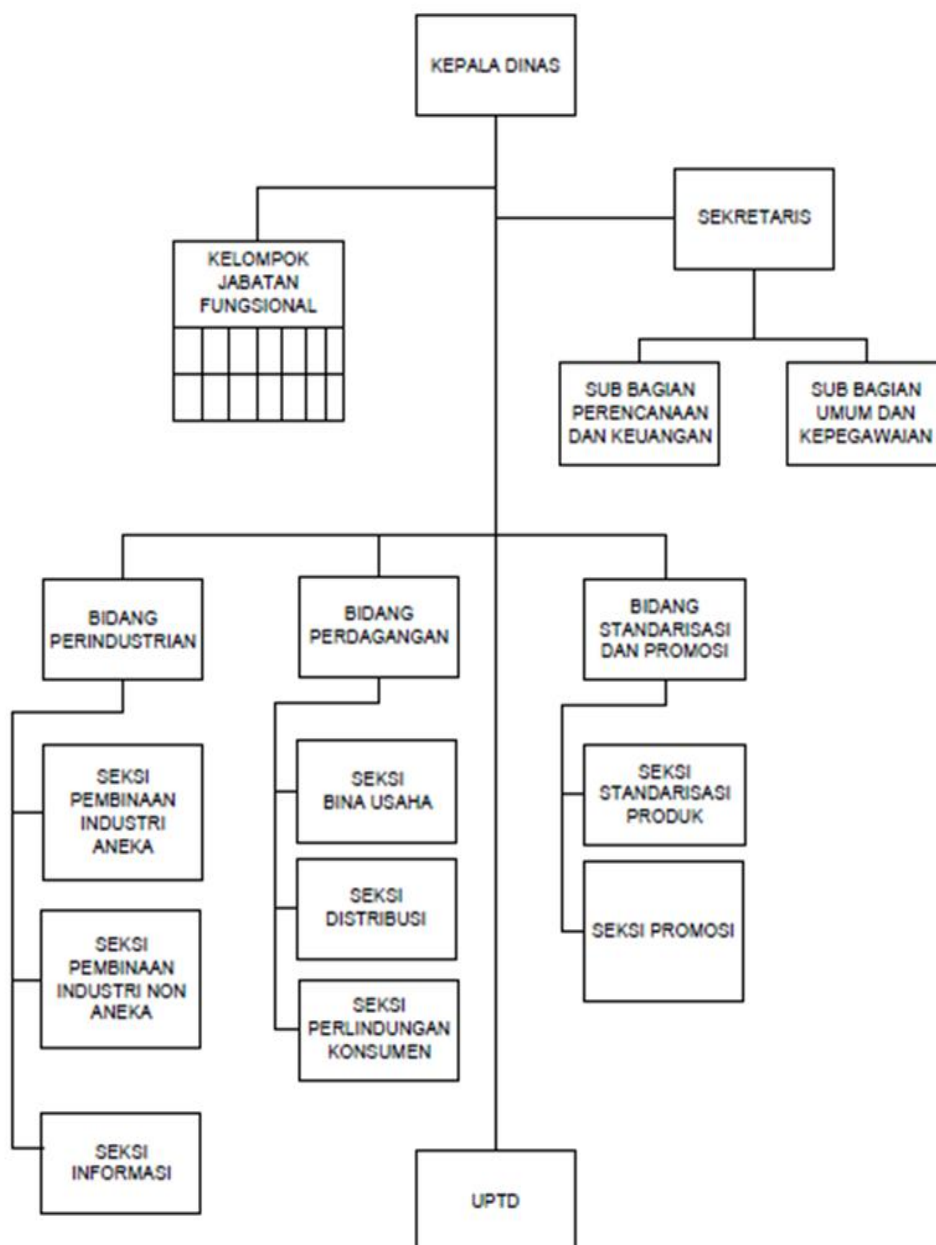
b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, berikut adalah struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Industri Aneka
 - b. Seksi Pembinaan Industri Non Aneka
 - c. Seksi Informasi
- 4) Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a. Seksi Bina Usaha
 - b. Seksi Distribusi
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen

- 5) Bidang Standarisasi dan Promosi, membawahi
 - a. Seksi Standarisasi Produk
 - b. Seksi Promosi
- 6) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 4: Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2017

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasi Penerbitan izin di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 2) Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, aspek manajemen, permodalan dan pemasaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri;
- 3) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan;
Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
- 4) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- 5) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 6) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
- 7) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan;
- 8) Pengawasan pupuk dan pestisida;
- 9) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;

- 10) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional, regional dan lokal;
- 11) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk dalam negeri;
- 12) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan atau melalui kerjasama dengan kabupaten/kota lain;
- 13) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 14) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terletak di Jl. Bhayangkara No.42, Jagalan, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan pelaksanaan otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerjanya di atur berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016.

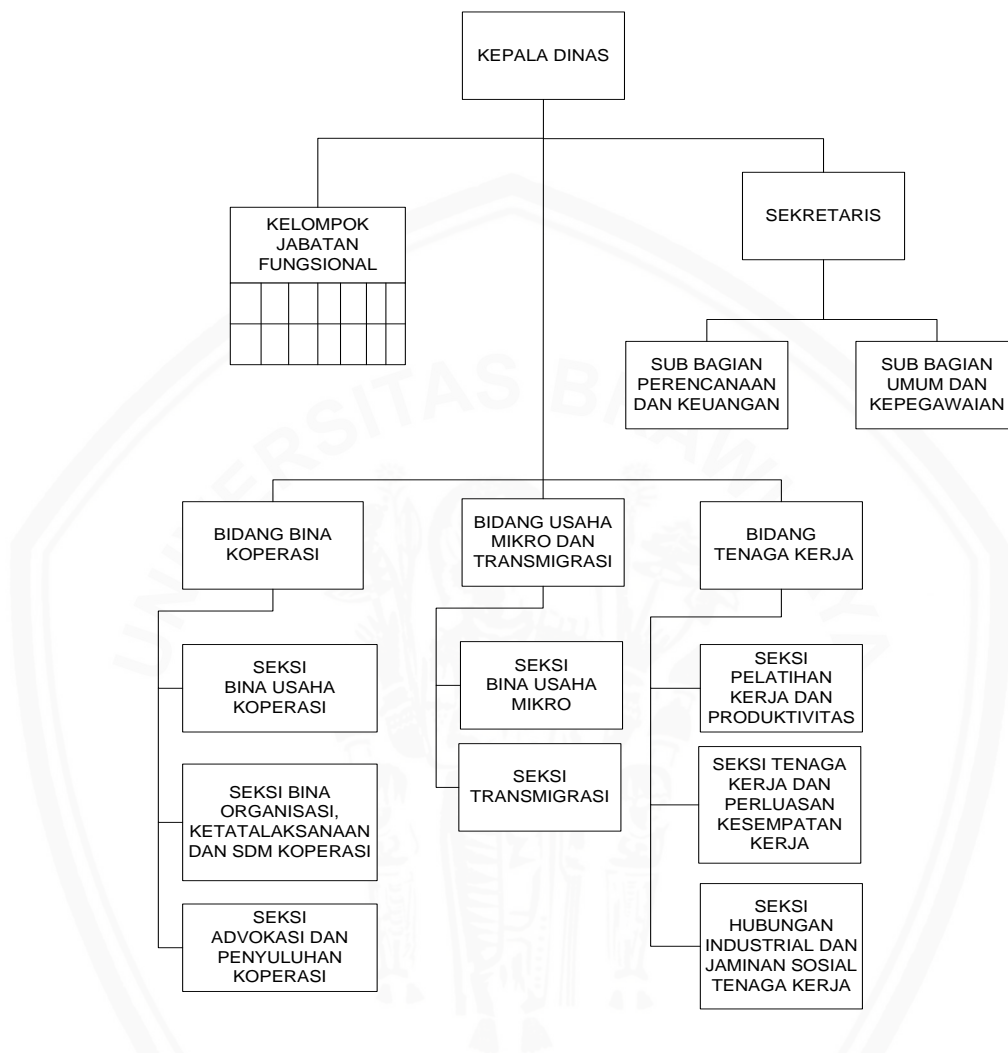
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja disusun berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang meliputi :

Bina Organisasi, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia

- 1) Kepala ;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Bina Koperas, membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Koperasi;
 - c. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi.
- 4) Bidang Usaha Mikro dan Transmigrasi, membawahi ;
 - a. Seksi Bina Usaha Mikro ;
 - b. Seksi Transmigrasi.
- 5) Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas;
 - b. Seksi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

6) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 5: Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2017

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan transmigrasi. Sementara itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi di antaranya :

- 1) Merekomendasikan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota;
- 2) Merekomendasikan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- 3) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi ;
- 4) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- 5) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- 6) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi;
- 7) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- 8) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 9) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- 10) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;

- 11) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- 12) Merekomendasi Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- 13) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- 14) Pengukuran produktivitas;
- 15) Pelayanan antar kerja;
- 16) Merekomendasi Penerbitan izin LPTKS;
- 17) Pengelolaan informasi pasar kerja;
- 18) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan);
- 19) Merekomendasi Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan tenaga asing (IMTA);
- 20) Penataan persebaran penduduk ;
- 21) Pengembangan satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian;
- 22) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan , kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 23) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Gambaran Umum Industri Alas Kaki di Kota Mojokerto

Kota Mojokerto memiliki potensi yang cukup baik dalam sektor industri kecil dan menengah, Kota Mojokerto memiliki banyak industri pengolahan di antaranya industri tekstil, industri batik, industri cor dan kuningan, industri alas kaki dan lain sebagainya. Salah satu potensi Industri yang cukup besar di Kota Mojokerto adalah Industri kecil dan menengah (IKM) Alas Kaki. Pada tahun 2012 industri kecil dan menengah alas kaki berdasarkan kesepakatan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai *core industry* (kompetensi industri daerah).

Industri kecil dan menengah alas kaki merupakan salah satu industri kecil dan menengah yang jumlahnya lebih besar daripada industri kecil dan menengah yang lainnya, baik dari segi tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksinya. Jumlah industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto pada tahun 2017 terdapat 418 unit dengan nilai investasi sebesar 24.247.208.000 dan nilai produksi sebesar 288.732.058.800 serta jumlah tenaga kerja sebesar 4.183. (Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto).

Industri kecil dan menengah alas kaki tersebar di seluruh kecamatan Kota Mojokerto, akan tetapi dari beberapa kecamatan tersebut Kecamatan Prajuritkulon merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah industri kecil dan menengah alas kaki terbanyak di antara Kecamatan Lainnya. Di kecamatan Prajuritkulon terdapat 297 industri kecil dan menengah alas kaki dari 418 unit

yang tersebar di Kota Mojokerto. Sebagian besar masyarakat yang berada di Kecamatan Prajuritkulon bermata pencaharian sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah alas kaki.

Awal mula lahirnya inisiatif adanya industri kecil dan menengah alas kaki ini bermula dari masyarakat Kota Mojokerto sendiri, industri yang awalnya hanya berupa kerajinan ini semakin lama semakin mengalami peningkatan yang cukup baik dan memiliki permintaan yang tinggi. Industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto akhirnya mulai menjadi potensi yang menjadi unggulan Kota Mojokerto, bahkan industri kecil dan menengah alas kaki ini sudah dilakukan secara turun temurun. Industri alas kaki memiliki produk yang bermacam-macam jenisnya seperti sandal wanita dan pria, sepatu kulit wanita dan pria, sepatu drumband, sepatu sport dan lain sebagainya, dengan memiliki desain yang sesuai dengan minat konsumen dan mengikuti trend yang terus berkembang di lingkungan masyarakat.

Dalam proses produksi bahan yang digunakan oleh para pelaku usaha industri kecil dan menengah alas kaki terdiri dari kaleb, kulit, atau bahan imitasi kulit, sol, benang, lem, dan hiasan untuk alas kaki. Sedangkan dari segi alat yang digunakan untuk proses produksinya terdiri dari mesin press, klebut, mesin jahit, alat pemotong, dan alat oven. Hadirnya industri kecil dan menengah di Kota Mojokerto merupakan salah satu aset daerah yang harus terus diberdayakan dan dikembangkan.

C. Penyajian Data

1. Pemberdayaan Industri kecil dan menengah Alas Kaki yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pengrajin Alas Kaki

Industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor sebagai penggerak ekonomi yang mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia. Dengan memiliki potensi melalui industri kecil dan menengah diharapkan suatu daerah dapat menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menjelaskan bahwa:

“Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui kesempatan kerja, menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Untuk mewujudkan itu semua maka diperlukan suatu perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dapat dikatakan bahwa industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi suatu daerah yang harus diberdayakan dengan membuat suatu kebijakan, penguatan kelembagaan dan pemberian fasilitas, sehingga dengan adanya pemberdayaan industri kecil dan menengah ini dapat mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja di suatu daerah. Sementara itu, berdasarkan

RPJMN 2015-2019 tentang Agenda Pembangunan Wilayah menjelaskan bahwa, salah satu cara untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa-Bali, berdasarkan potensi yang dimiliki adalah melalui industri. Potensi yang dimiliki beberapa daerah di Indonesia yang menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui industri kecil dan menengah. Sehubungan dengan itu, salah satu daerah yang memiliki potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal adalah kota Mojokerto. Potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui industri kecil dan menengah, salah satu industri kecil dan menengah yang memiliki jumlah terbesar daripada industri kecil dan menengah lainnya adalah industri kecil dan menengah alas kaki.

Pada tahun 2017 industri kecil dan menengah alas kaki mengalami perkembangan yang menurun dari tahun sebelumnya baik dari segi penyerapan tenaga kerja, nilai produksi dan nilai investasi. Pada tahun 2016 industri kecil dan menengah alas kaki memiliki penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.195, nilai investasi 24.247.208.000, dan nilai produksi sebesar 288.848.058.800. sedangkan pada tahun 2017 jumlah penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yakni sebesar 4.090, dengan nilai investasi yang sama yakni sebesar 24.247.208.000 dan nilai produksi yang menurun dibandingkan pada tahun 2016 yakni sebesar 288.732.058.000 (Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto).

Penurunan yang terdapat pada sektor industri kecil dan menengah alas kaki ini berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja di Kota Mojokerto yang mengakibatkan pada naiknya pengangguran. Pada tahun 2017 pengangguran di Kota Mojokerto mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk pencari kerja yang setiap tahun cenderung naik. Pada tahun 2017 ini jumlah pengangguran di Kota Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 4,8 persen atau 3.208 orang dengan jumlah total seluruh penduduk 141.313 orang dengan luas wilayah 16,47 km² (Sumber:Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto).

Penurunan industri kecil dan menengah alas kaki memberikan dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto. Penurunan yang terjadi pada industri kecil dan menengah alas kaki di kota mojokerto ini perlu untuk mendapatkan suatu pemberdayaan. Sehingga usaha industri alas kaki dapat meningkatkan produksinya dan dapat berdampak baik terhadap penyerapan tenaga kerja dan dapat meminimalisir angka pengangguran di Kota Mojokerto.

Berdasarkan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017-2022 menjelaskan bahwa untuk dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran di Kota Mojokerto membutuhkan suatu kebijakan sektoral, salah satu di antaranya adalah kebijakan perluasan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah yang di dalamnya menjelaskan bahwa

sektor industri kecil dan menengah dapat terus dikembangkan dengan menyusun kebijakan sektor industri yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengembangan regulasi, fasillitasi dan iklim usaha bagi masuknya sektor industri.
- 2) Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang mampu memanfaatkan potensi dalam rantai nilai industri dan potensi sumber daya lokal melalui pembangunan sentral IKM, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan IKM.
- 3) Rintisan pengembangan *one village one product* sektor industri.
- 4) Pendampingan dan pelatihan usaha.
- 5) Bantuan akses permodalan dan pemasaran
- 6) Integritas kebijakan dengan sektor penyedia dan pasar.
- 7) Kerjasama antar pemerintah daerah dengan lembaga keuangan dalam penyediaan akses modal.
- 8) Optimalisasi produk untuk suplai kebutuhan psar lokal.
- 9) Memperkuat kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif.
- 10) Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.
- 11) Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata.

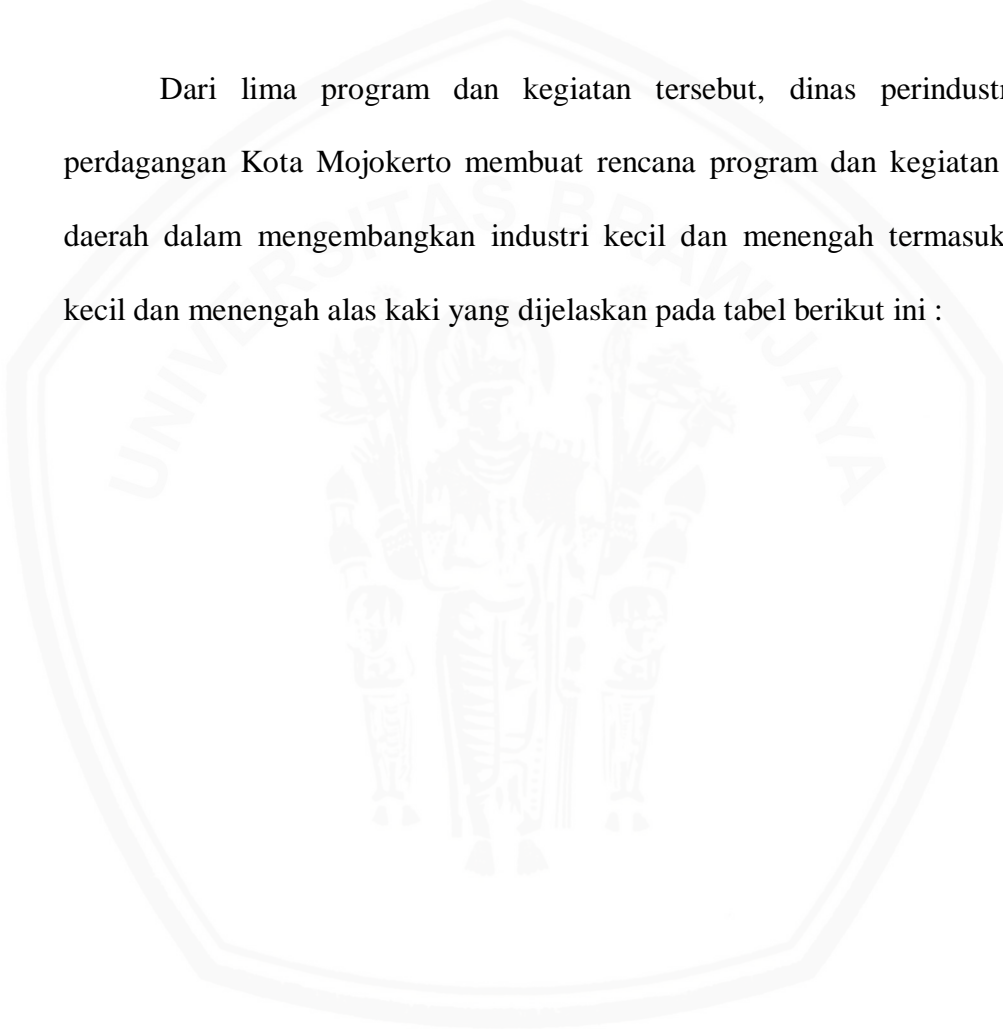
- 12) Meningkatkan daya saing dan daya listrik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitasi pendukung.

Sehubungan dengan pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki, Kota Mojokerto memiliki agenda utama pembangunan tahun 2014-2019 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Mojokerto yaitu program unggulan misi 3 yang menjelaskan bahwa agenda utama pembangunan Kota Mojokerto adalah melalui program fasilitasi pengembangan industri kreatif dan produk olahan sebagai ikon kota Mojokerto. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan agenda utama pembangunan misi 3 tersebut Pemerintah Kota Mojokerto memiliki beberapa program dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagai SKPD yang terlibat dalam proses pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto, maka dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam mengembangkan produk tersebut, oleh karena itu untuk dapat melakukan pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki maka berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memiliki beberapa program dan kegiatan, diantaranya:

- 1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
- 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah
- 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- 4) Program penataan struktur industri
- 5) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Dari lima program dan kegiatan tersebut, dinas perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto membuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam mengembangkan industri kecil dan menengah termasuk industri kecil dan menengah alas kaki yang dijelaskan pada tabel berikut ini :



Tabel 4 Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto di Bidang Perindustrian Tahun 2017

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome)	Tahun 2017		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Industri						
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Peningkatan kemampuan industri berbasis teknologi	Kualitas produk alas kaki memenuhi standar kualitas	1 Kub	750.000.000	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan mesin dan peralatan sebanyak 6 KUB	3.450.000.000
2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Tersalurkannya pinjaman modal bagi usaha industri dan meningkatnya kemampuan modal IKM	Peningkatan Omzet usaha IKM	100 IKM	200.000.000		
	Monitoring dan evaluasi bantuan pinjaman modal bagi IKM untuk mendapatkan pinjaman lunak modal usaha tanpa bunga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan pinjaman modal bagi IKM dan meningkatkannya pengembalian pinjaman modal	Meningkatnya efektifitas pemanfaatan modal bagi perkembangan usaha	50 IKM	50.000.000		

	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya pelatihan desain alas kaki, temu usaha sentra IKM alas kaki di Kelurahan Surodinawan, IKM Kota dan Bantuan Sarana Promosi	Bertambahnya jumlah produk baru dan jaringan bisnis IKM	100 IKM	200.000.000	Jumlah IKM yang mendapatkan pinjaman modal sebanyak 560 orang	750.000.000
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Pelatihan industri kecil pemula dalam rangka penumbuhan wirausaha yang baru	Peningkatan jumlah wirausaha baru	50 IKM	50.000.000	Monitoring dan evaluasi penerima modal	250.000.000
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Sosialisasi dan fasilitasi merek yang terdaftar secara resmi	Bertambahnya jumlah merek yang terdaftar secara resmi	15 IKM	75.000.000	Meningkatnya keterampilan pengrajin IKM kemampuan dan peningkatan desain produk IKM	300.000.000

	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah						
	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah						

3.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya pelatihan IKM alas kaki	Penerapan teknologi industri sesuai dengan kebutuhan IKM	20 IKM	30.000.000	Meningkatnya kualitas dan peningkatan desain produk IKM Alas Kaki	
4.	Program Penataan Struktur Industri						
	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir						
	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Terlaksananya identifikasi dan penataan kelambagaan sentra IKM	Meningkatnya pemanfaatan lembaga dalam mendukung kemajuan usaha IKM	2 KUB	100.000.000	Terbentuknya KUB sentra IKM	300.000.000
5.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial						
	Penyediaan sarana dan informasi yang dapat diakses masyarakat	Adanya sarana Neon Box dan rak display di sentra-sentra IKM	Peningkatan sarana promosi	30 IKM	300.000.000	Terlaksananya pemberian sarana Neon Box dan rak display di sentra-sentra IKM	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam melakukan pemberdayaan industri kecil dan menengah memiliki berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto sehingga berdampak terhadap perluasan kesempatan kerja, dan dapat meminimalisir jumlah pengangguran di Kota Mojokerto. Pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto dalam rangka mengurangi pengangguran diharapkan SKPD yang terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mendukung dan memfasilitasi berjalannya kegiatan industri kecil dan menengah baik dari segi pembinaan maupun pembiayaan.

Pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki ini merupakan salah satu strategi untuk terus mempertahankan potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto. Sementara itu, pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki yang merupakan salah satu industri pengolahan juga merupakan salah satu kebijakan sektoral yang ada di bidang industri pengolahan untuk dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Kota Mojokerto, hal ini senada dengan pernyataan ibu Yuli selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang menyatakan bahwa :

“Pemecahan masalah pengangguran tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan penempatan tenaga kerja sektor formal namun juga dapat dilakukan melalui sektor informal yang tentunya dapat dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto yakni salah satunya melalui sektor yang bergerak dalam industri pengolahan.

Pemberdayaan industri kecil dan menengah merupakan salah satu kebijakan sektoral yang disusun oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. Pemberdayaan industri kecil dan menengah ini dilakukan oleh SKPD terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, di dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan fasilitasi, terutama fasilitasi untuk dapat membantu wirausaha yang baru di sektor informal, karena dengan adanya kesempatan untuk membentuk wirausaha yang baru maka hal ini memiliki nilai yang strategis karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja baru serta dapat menopang perekonomian Kota Mojokerto”. (Hasil wawancara dengan Yuli di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada hari Kamis, 15 Februari 2018 pukul 11.00 WIB)

Kota Mojokerto memiliki potensi yang baik untuk terus dikembangkan, potensi-potensi yang dapat menciptakan nilai ekonomis di Kota Mojokerto salah satunya adalah melalui industri kerajinan. Industri kerajinan yang ada di Kota Mojokerto terdiri dari industri batik tulis, industri miniatur perahu layar tradisional, industri kecajian tas kulit, industri cor alumunium, dan industri alas kaki. Industri kecil dan menengah alas kaki merupakan salah satu sektor industri yang memiliki jumlah unit terbanyak dari pada insdustri kecil dan menengah lainnya di Kota Mojokerto. Pada tahun 2017 industri kecil dan menengah alas kaki memiliki jumlah unit sebesar 418 unit yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Mojokerto, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 4.183, nilai investasi sebesar 24.247.208.000, dan nilai produksi sebesar 288.732.058.800. Dengan potensi yang dimiliki Kota Mojokerto melalui industri kecil dan menengah alas kaki maka produk-produk yang dihasilkan memiliki jenis yang beragam. Jenis industri alas kaki di Kota Mojokerto diantaranya terdapat sandal kulit pria, sandal wanita,

sepatu boots, sepatu formal kulit, sepatu sport anak-anak, dan sepatu casual lainnya.

Industri alas kaki di Kota Mojokerto tersebar di seluruh kecamatan Kota Mojokerto. Potensi yang berasal dari industri kerajinan alas kaki ini harus terus dikembangkan melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah, yang secara umum pemberdayaan tersebut selama ini dilakukan dengan berbagai cara baik dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha alas kaki itu sendiri. Menurut (Hafsah, 2004:43) pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki dapat dilakukan dengan upaya upaya dalam mengembangkan industri kecil dan menengah yang meliputi penciptaan iklim usaha yang kondusif, pelatihan sumber daya manusia, bantuan permodalan dan pengembangan promosi. Berikut ini merupakan pemberdayaan industri kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam rangka mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Iklim usaha yang kondusif sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri kecil dan menengah. Dengan adanya iklim usaha yang kondusif maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif perlu peran SKPD terkait, sehingga dalam hal ini pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif. Menurut (Hafsah, 2004:43) yang dimaksud dengan penciptaan iklim yang kondusif adalah upaya-upaya yang

dilakukan dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan, penyederhanaan prosedur perijinan usaha, dan lain sebagainya. Pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan industri kecil dan menengah alas kaki. Penyederhanaan prosedur perizinan usaha dilakukan dengan tujuan untuk dapat mendorong masyarakat agar dapat menciptakan lapangan usaha baru di industri alas kaki, sehingga dengan adanya usaha yang baru dalam industri kecil dan menengah alas kaki ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Mojokerto. Pernyataan ini didukung oleh pendapat ibu Yuli selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang mengungkapkan bahwa:

“Iklim usaha yang kondusif sangat diperlukan bagi suatu industri kecil dan menengah, hal ini mengingat bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dapat diserap melalui sektor formal saja akan tetapi sektor informal juga perlu. Pada tahun 2017 Kota Mojokerto masih dibelit dengan masalah pengangguran, dikarenakan partisipasi angkatan kerja yang terus meningkat akan tetapi penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya dapat menangani masalah tersebut, hal ini disebabkan masih rendahnya daya saing kualitas SDM terutama untuk mengisi lowongan kerja di sektor formal, saya rasa iklim usaha yang kondusif ini bisa diciptakan melalui perizinan industri yang tidak ribet sehingga masyarakat dapat tertarik untuk menciptakan lapangan usaha yang baru dan ini juga akan berdampak positif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan masyarakat Kota Mojokerto”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli pada tanggal 15 Februari 2018 pada pukul 11.10 WIB di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto)

Dengan adanya prosedur perizinan yang mudah untuk membuka usaha baru di sektor industri kecil dan menengah alas kaki diharapkan dapat mendorong

masyarakat untuk mandiri dengan mempertahankan potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto melalui industri kerajinan alas kaki. Hal ini seperti pendapat ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang mengungkapkan bahwa :

“ Untuk dapat terus mengembangkan dan mempertahankan potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto melalui industri kecil dan menengah alas kaki ini tentunya sangat didukung oleh iklim usaha yang kondusif yang dapat direalisasikan melalui pemberian izin industri yang tidak ribet. Pertumbuhan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto dari segi unitnya memang selalu bertambah akan tetapi dalam setahun hanya ada 1 sampai 2 unit industri alas kaki yang baru. Untuk saat ini khusus industri kecil dan menengah mengenai perizinan untuk membuka usaha baru masih ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto tetapi untuk September mendatang prosedur perizinan sudah ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada 7 Februari 2018 pukul 11.15 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Mengenai persyaratan untuk melakukan perizinan membuka usaha industri alas kaki lebih lanjut Ibu Iwiek Menjabarkannya dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Masyarakat yang ingin membuka usaha di sektor industri kecil dan menengah alas kaki, dari segi prosedurnya tidak ribet mereka hanya cukup datang ke Disperindag dan membuat TDI (Tanda Daftar Industri). Untuk industri dalam skala kecil maka tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan TDI akan tetapi jika ingin memiliki TDI maka tetap diperbolehkan, jika semua industri kecil dan menengah berinvestasi lebih dari Rp. 5.000.000 hingga Rp. 200.000.000 tidak termasuk lahan dan bangunan maka wajib untuk memiliki TDI. Untuk pengurusan TDI sendiri ada ketentuan dan prosedurnya, yakni 1) fotocopy NPWP, 2) fotocopy KTP, 3) sertifikat tanah dan bangunan jika menggunakan lahan sendiri, jika sewa maka harus menyertakan surat perjanjian sewa, 4) pas foto 4x6 (2 lembar)”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada tanggal 7 Februari 2018 pada pukul 11.15 WIB di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Lebih lanjut Ibu Iwiek Muzayana menjelaskan mengenai prosedur perizinan melalui kutipan wawancara berikut ini:

“Setelah semua persyaratan TDI sudah terpenuhi maka selanjutnya adalah mengisi formulir pendaftaran, dan tahap akhirnya adalah petugas dari Disperindag melakukan survey ke lapangan sesuai dengan dokumen yang diberikan pemohon”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada tanggal 7 Februari 2018 pada pukul 11.15 WIB di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Berikut ini merupakan gambar pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto:

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA RESTRIBUSI
1	2	3	4	5	6
6	Tanda Daftar Industri (TDI)	Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri dan Perdagangan	1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000.- 2. Fotokopi KTP/penanggung jawab perusahaan 3. Fotokopi NPWP 4. Materai secukupnya 2 (dua) lembar 5. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan 6. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/bukti kontrak/sewa) 7. Surat Keterangan/Ijin tidak keberatan dari tetangga 8. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap	Rp50.000.-

Gambar 6: Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2017

Penciptaan iklim usaha yang kondusif sangat diperlukan bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui kerajinan alas kaki, dengan adanya kemudahan untuk dapat mendirikan industri alas kaki maka hal ini juga akan berdampak pada legalitas yang mereka miliki sehingga para pelaku usaha industri alas kaki dapat dengan mudah untuk

mengembangkan bisnis industri alas kaki. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Sujono selaku pengrajin alas kaki yang mengungkapkan bahwa :

“Awalnya saya hanya sebagai buruh membuat sepatu di tempat teman saya, akan tetapi ketika saya mendapatkan pengalaman yang cukup banyak untuk memproduksi sepatu, akhirnya saya memutuskan untuk membukan usaha industri kecil dan menengah alas kaki sendiri. Gini mbak kalau dari segi perizinan, dulu industri alas kaki yang saya miliki masih kecil belum sebesar ini, jadi dulu industri kecil saya ini didatangi oleh DISPERINDAG kemudian dari situlah industri saya hanya sebatas didata belum mengurus perizinan untuk membuka industri baru, akhirnya setelah beberapa tahun alhamdulillah industri alas kaki saya semakin besar awalnya hanya mempekerjakan 2-3 orang tapi sekarang saya sudah memiliki 15 orang pegawai, nah ketika industri kecil saya ini mengalami kemajuan maka disitu saya mulai mengurus perizinan, kalau dilihat dari syarat dan prosedurnya selama ini saya rasa tidak rumit, kita cukup melengkapi persyaratan yang berlaku kemudian datang ke DISPERINDAG, nah dengan adanya izin tersebut juga saya beruntung karena sudah legal sehingga dengan keuntungan tersebut saya juga dapat mengembangkan industri alas kaki saya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sujono pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 11.00 WIB di *Home Industry* alas kaki Bapak Sujono)

Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil dan menengah alas kaki melalui penyederhanaan prosedur perizinan bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan industri alas kaki merupakan salah satu faktor yang penting untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto terutama dalam memperluas kesempatan kerja, sehingga masyarakat bisa tertarik untuk berwirausaha melalui industri kerajinan alas kaki. Hal ini senada dengan pendapat Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki yang mengungkapkan bahwa:

“Mengenai iklim usaha yang kondusif itu memang harus terus dikembangkan, bahkan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, salah satunya melalui prosedur pelayanan perizinan yang mudah. Dengan adanya perizinan usaha yang mudah ini sangat mendorong sekali untuk para pemuda agar tertarik

dengan berwirausaha melalui industri kerajinan sepatu ini, apalagi mbak sekarang ini industri alas kaki ini saya rasa kurang diminati sehingga saya khawatir jika nanti potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto ini hilang, saya membuat spesialis sepatu kulit laki-laki, sekarang ini pembuatan sepatu kulit itu sudah mulai langkah, yang banyak itu *home* industri yang memproduksi sandal. Sehingga kalau dari segi perizinannya mudah maka masyarakat tertarik untuk membuka usaha IKM alas kaki. selama ini prosedur perizinannya cukup mudah akan tetapi saya tidak mengurusnya sendiri, saya menyuruh anak saya untuk mengurus perizinan di DISPERINDAG, saya rasa kalau syarat-syarat yang ditentukan sudah lengkap, itu malah mempercepat proses perizinan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Wulyatin pada 1 Maret 2018 pada pukul 11.30 WIB di *home industry* alas kaki)

Sejalan dengan pendapat Bapak Wulyatin, Ibu Supiah berpendapat bahwa iklim usaha yang kondusif merupakan faktor yang dapat mendukung berjalannya industri kecil dan menengah alas kaki, dengan prosedur perizinan yang baru tentunya juga akan berdampak baik terutama untuk membuka usaha yang baru dibidang industri alas kaki. Tujuan dengan prosedur perizinan yang mudah adalah untuk memperluas kesempatan kerja, selain itu juga untuk dapat mempertahankan industri alas kaki di Kota Mojokerto agar bisa dijalankan turun temurun. Berikut pemaparan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki yang mengungkapkan bahwa :

“Untuk prosedur perizinan ya harus dipermudah mbak, dulu ketika industri yang saya miliki masih dalam skala yang kecil, industri saya belum mendapatkan izin artinya industri yang saya miliki belum mendapatkan legalitas dari pemerintah, namun setelah berkembang akhirnya DISPERINDAG datang kesini dan menyuruh untuk mengurus izin usaha, prosesnya juga tidak ribet mbak, cukup datang kesana membawa berkas yang diperlukan, terus kami dapat izin usaha”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Supiah pada tanggal 3 Maret 2018 pada pukul 13.00 WIB di *home industri* alas kaki)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa prosedur perizinan yang mudah akan berdampak positif bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk dapat

mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui industri kerajinan alas kaki, sehingga dengan prosedur peizinan yang mudah maka akan menggerakkan masyarakat untuk dapat berwirausaha melalui potensi yang dimiliki oleh Kota Mojoketo yakni melalui industri kecil dan menengah alas kaki. Dengan bertambahnya industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto.

b. Bantuan Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha membutuhkan dana atau biaya untuk dapat beroperasi. Permodalan yang memadai sangat mendukung pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk dapat mengembangkan usaha yang mereka lakukan. Menurut (Tambunan, 2002:22) menjelaskan bahwa modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Sementara itu menurut (Hafsah, 2004:43) untuk dapat memberdayakan industri kecil dan menengah maka membutuhkan peran pemerintah untuk dapat memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah. Sehingga dengan adanya permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku usaha, maka akan berdampak pada perluasan kesempatan tenaga kerja, karena dengan adanya permodalan yang mudah diakses maka masyarakat akan tertarik untuk membuka usaha industri kecil dan

menengah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang mengungkapkan bahwa:

“Terkait dengan permodalan bagi industri kecil dan menengah itu merupakan salah satu syarat yang tidak bisa dipisahkan untuk dapat membuka usaha baru seperti industri kecil dan menengah Alas kaki. Terkait dengan permodalan yang diberikan kepada para pelaku usaha IKM alas kaki bukan merupakan tugas dari DISKOMUNIKER disini kami hanya menyediakan bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Permodalan yang diberikan pada para pelaku usaha IKM, kami tidak bekerjasama dengan DISPERINDAG, karena sebagai SKPD yang mengelola industri kecil dan menengah alas kaki mereka memberikan pinjaman sendiri kepada para pelaku usaha IKM alas kaki. Akan tetapi, mengingat industri kecil dan menengah alas kaki ini merupakan potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto, kami sebagai instansi yang menangani mengenai tenaga kerja, berharap bahwa industri alas kaki ini dapat menyerap tenaga kerja baru artinya dapat mendorong masyarakat Kota Mojokerto untuk terik menggeluti usaha di bidang industri alas kaki ini tentunya dengan proses permodalan yang mudah diakses oleh masyarakat yang ingin membuka usaha baru, karena dengan permodalan yang mudah maka ini juga menjadi faktor terpenting untuk membantu wirausaha agar dapat berkembang”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.10 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto)

Sejalan dengan pendapat Ibu Yuli, Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai pendapat bahwa untuk dapat mengembangkan usaha IKM alas kaki yang ada di Kota Mojokerto tidak dapat dipisahkan dengan permodalan karena untuk memulai suatu usaha IKM alas kaki maka dibutuhkan permodalan yang mudah di akses. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

“Untuk dapat memberdayakan industri kecil dan menengah di Kota Mojokerto kami sebagai instansi yang menangani IKM Alas Kaki memberi fasilitas Piutang Modal Industri Kecil dan Menengah (PMIKM)

tanpa agunan, denda dan bunga. Tujuan dari pemberian bantuan permodalan ini tidak lain adalah untuk mengembangkan potensi IKM alas kaki sehingga para pelaku usaha ini dapat mengembangkan usaha mereka, selain itu dengan adanya permodalan ini maka dapat memberikan peluang masyarakat Kota Mojokerto untuk berwirausaha melalui IKM alas kaki. Prosedur yang ada untuk dapat mengakses permodalan yang kami fasilitasi ini tidak ribet. Untuk para pelaku usaha IKM alas kaki yang sudah mendapatkan legalitas dari kami artinya sudah mendapatkan izin dari kami, para pelaku usaha IKM alas kaki cukup membawa foto kopi KTP dan Kartu Keluarga (KK). Nominal yang dapat kami pinjamkan kepada pelaku usaha IKM alas kaki maksimal sebesar Rp.10.000.000 dan minimal Rp. 100.0000 sedangkan untuk pelunasannya para pelaku IKM alas kaki dapat melunasinya dalam kurun waktu 10 bulan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada 7 Februari 2018 pukul 11.15 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Bantuan Permodalan sangat diperlukan oleh para pelaku usaha IKM alas kaki dan masyarakat yang tertarik berwirausaha melalui IKM alas kaki. Sehingga dengan adanya bantuan permodalan ini diharapkan masyarakat dapat tertarik untuk menggeluti usaha di bidang industri alas kaki, sehingga IKM alas kaki yang menjadi potensi Kota Mojokerto ini bisa terus dikembangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki IKM alas kaki di Kota Mojokerto yang mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya bantuan permodalan ini tentunya sangat membantu kami untuk menjalankan industri alas kaki. Untuk memulai membuka usaha alas kaki ini saya modalnya berasal dari tabungan sendiri, waktu itu DISPERINDAG belum memberikan bantuan pinjaman permodalan. Kalau dari segi prosedurnya dan syaratnya untuk mendapatkan bantuan itu memang tidak rumit mbak, cukup dengan KTP dan KK diajukan di survey ke tempat kemudian kami mendapatkan bantuan tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wulyatin pada 1 Maret 2018 pukul 11.30 WIB di *home industri* alas kaki Bapak Wulyatin)

Sejalan dengan Bapak Wulyatin, Ibu Supiah juga mempunyai pendapat bahwa permodalan di bidang industri alas kaki merupakan faktor penting untuk memulai suatu uasaha, apalagi didukung dengan proses yang mudah serta syarat-syarat yang tidak ribet maka ini akan memberikan daya tarik bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk berwirausaha di bidang industri alas kaki. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki berikut ini:

“Saya awal mulanya membuka usaha ini mendapat modal dari hasil menjual sepeda motor mbak, kemudian untuk mengembangkan usaha yang saya miliki ini saya meminjam modal di DISPERINDAG sebesar Rp. 5.000.000 sudah lunas. (Hasil wawancara dengan Ibu Supiah pada 3 Maret 2018 pukul 13.00 di *home industri* alas kaki Ibu Supiah)

Bantuan permodalan selain difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan para pelaku usaha IKM alas kaki juga bisa mendapatkan bantuan permodalan secara mandiri melalui lembaga perbankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Sujono selaku pelaku usaha IKM alas kaki yang mengatakan bahwa:

“Awal mula saya mendirikan IKM alas kaki ini modalnya berasal dari hasil menjual mobil mbak, terus terang saya memberanikan diri untuk menjual aset saya tersebut, dulu DISPERINDAG belum memberikan fasilitas pemberian pinjaman, sehingga saya memutuskan untuk meminjam di BANK BRI dengan agunan sertifikat tanah, kalau dilihat dari prosedur dan syaratnya memang ribet kalau mengajukan kredit usaha di BANK, tetapi itu tetap saya lakukan karena saya rasa IKM alas kaki yang saya miliki ini harus terus berkembang”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sujono pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 11.00 di *home industri* alas kaki Bapak Sujono)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Kota Mojokerto sebagai suatu daerah yang memiliki potensi di bidang industri kecil dan menengah alas kaki maka untuk memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki maka dibutuhkan suatu bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha IKM alas kaki, terutama untuk membuka peluang kesempatan kerja baru maka bantuan permodalan sangat diperlukan, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk bekerja di sektor informal melalui industri kecil dan menengah alas kaki. Sementara itu sebagai instansi yang memiliki wewenang untuk mengembangkan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku SKPD terkait memberikan fasilitas bantuan peminjaman permodalan yang disebut dengan PMIKM, dengan adanya fasilitas bantuan permodalan tersebut diharapkan dapat memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto. Berikut ini merupakan bantuan permodalan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 5 Daftar Realisasi PMIKM Tahun 2004-2014 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

NO	URAIAN		SALDO PIUTANG AWAL
1	2		3
-	Penerimaan Angsuran Pinjaman		
	1.	PMIKM Tahun 2004	285.000.000
	2.	PMIKM Tahun 2005	400.000.000
	3.	PMIKM Tahun 2006	410.000.000
	4.	PMIKM Tahun 2007	400.031.700
	5.	PMIKM Tahun 2008	400.000.000
	6.	PMIKM Tahun 2009	-
	7.	PMIKM Tahun 2010	325.000.000
	8.	PMIKM Tahun 2011	400.000.000
	9.	PMIKM Tahun 2012	675.000.000
	10.	PMIKM Tahun 2013	615.000.000
	11.	PMIKM Tahun 2014	850.000.000
		JUMLAH	4.760.031.700

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2017

c. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan industri kecil dan menengah yang harus terus dilakukan. Menurut (Hafsah,2004:44) pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi industri kecil dan menengah baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian:

“Pelatihan industri alas kaki bagi pelaku usaha yang ada di Kota Mojokerto itu merupakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dengan adanya pelatihan ini maka kami memfasilitasi kepada para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam memproduksi alas kaki, yang kemudian dapat diterapkan di *home industri* masing-masing. Pelatihan yang kami berikan itu berlangsung selama 1 tahun 2 kali jadi para pelaku usaha ini mendapatkan pelatihan selama 1 bulan, akan tetapi karena terkendala biaya maka kami tidak dapat melaksanakan pelatihan itu selama 1 bulan penuh jadi kita hanya bisa memberikan waktu 2 minggu saja, jadi dengan waktu 2 minggu tersebut harus benar-benar dioptimalkan dengan baik. Di samping itu, dalam memberikan pelatihan tersebut kami bekerjasama dengan BIPI (Balai Pengembangan Industri dan Persepatuan Indonesia)”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada tanggal 7 Februari 2018 Pukul 11.15 WIB di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Pelatihan IKM alas kaki dilakukan melalui tiga fase, lebih lanjut Ibu Iwiek Muzayana menjelaskan proses pelatihan IKM alas kaki melalui kutipan wawancara berikut ini:

“Pelatihan ini memerlukan waktu yang cukup banyak karena disini ada tiga fase pelatihan yakni fase mendiskusikan dan merancang konsep produk dan segmen pasar yang baru, fase kedua yakni fase pembuatan

prototipe, pada fase ini, gambar desain produk baru diwujudkan menjadi prototipe yang akan diuji kualitasnya oleh BPIPI. Terakhir fase uji dasar pada uji dasar ini, dilakukan dua tahapan uji pasar terhadap prototipe produk baru untuk mengetahui respon dari konsumen sasaran. Mengenai tempat pelatihan dulu sebelum ada Gedung Workshop IKM Alas Kaki pelatihan dilakukan di aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan, akan tetapi pada 4 Januari 2017 pemerintah meresmikan gedung Workshop yang khusus untuk pelatihan IKM alas kaki yang terletak di Jl. Surodinawan, di dalam gedung tersebut juga ada fasilitas yang mendukung berjalannya pelatihan seperti tersedianya mesin jahit yang digunakan untuk menjahit alas kaki. Dengan demikian dengan adanya pelatihan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas produk IKM alas kaki “. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada tanggal 7 Februari 2018 Pukul 11.15 WIB di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat mendukung untuk perkembangan industri kerajinan alas kaki yang ada di Kota Mojokerto. Di samping itu, dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai produksi, maupun jumlah penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, hal ini sependapat dengan Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja yang mengungkapkan bahwa:

“Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan suatu kegiatan yang memang harus terus menerus dilakukan agar sektor informal seperti industri kerajinan alas kaki ini dapat memberikan peluang untuk membuka lapangan kerja, karena dengan adanya pelatihan ini maka akan berdampak kepada nilai produksi yang semakin meningkat, permintaan pasar yang meningkat sehingga disini dibutuhkan tenaga kerja yang banyak pula. Akan tetapi pelatihan yang diberikan itu juga harus disesuaikan dengan trend yang update saat ini yang berkembang di masyarakat. Bahkan kalau bisa pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha saja akan tetapi mengingat data pengangguran di Kota Mojokerto pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan terutama di golongan pendidikan lulusan SMA atau SMK

saya rasa pelatihan ini juga bisa diberikan kepada mereka yang lulus SMA atau SMK, menurut saya itu membantu untuk meminimalisir pengangguran karena sumberdaya manusia yang ada saat ini untuk mengisi lowongan kerja di sektor informal, dengan diberikan pelatihan pada lulusan tersebut maka itu akan dijadikan sebuah bekal mereka untuk dapat berwirausaha melalui industri kerajinan alas kaki”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli pada 15 Februari 2018 Pukul 11.10 WIB di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto)

Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto merupakan salah satu kegiatan untuk dapat memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan para pelaku usaha dapat berpartisipasi dengan aktif, dengan demikian pelatihan yang diberikan ini diharapkan dapat menciptakan produk alas kaki yang berkualitas dan update. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki yang mengungkapkan bahwa:

“Pelatihan yang diberikan oleh DISPERINDAG ini sangat perlu bagi kami untuk meningkatkan produktifitas kami, saya pernah ikut tapi tidak sesering yang dulu mbak, dalam pelatihan tersebut ada 3 fase mbak dalam pelatihan alas kaki tersebut yang pertama kita berdiskusi terlebih dahulu produk seperti apa yang sesuai untuk diproduksi, akan tetapi dalam tahap ini rata-rata peserta yang ikut pelatihan jarang ada yang mengikuti karena banyak yang datang terlambat, sebagian besar hanya ikut pada fase yang langsung membuat alasnya hingga uppernya. (Hasil Wawancara dengan Bapak Wulyatin Pada 1 Maret 2018 11.30 WIB di *home industri* alas kaki).

Sejalan dengan pendapat Pak Wulyatin, Bapak Sujono Menjelaskan bahwa pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memang merupakan kegiatan yang penting untuk diikuti, akan tetapi pelatihan yang diberikan juga harus dapat menarik para pelaku usaha sehingga

mereka dapat berpartisipasi dengan aktif, hal ini dinyatakan oleh Bapak Sujono selaku pengrajin alas kaki, beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk mengembangkan industri alas kaki yang saya miliki, saya mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh DISPERINDAG, akan tetapi saya mengikutinya tidak rutin, kalau ada waktu luang saya ikut, akan tetapi kalau saya sibuk biasanya saya menyuruh salah satu pekerja saya untuk mengikutinya, mengenai prosesnya pelatihan itu diberikan selama 2 minggu, pelatihan yang diberikan biasanya mulai dari mendiskusikan bagaimana model alas kaki yang sedang trend di pasaran sampai pada tahap menjadi alas kaki”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sujono pada 20 Februari 2018 pukul 11.00 di *home industri* alas kaki)

Melihat pelatihan industri alas kaki yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menurut Ibu Supiah pelatihan IKM Alas Kaki harus memberikan dampak yang baik terhadap produktivitas alas kaki. Pelatihan yang diberikan sangat penting terutama bagi pelaku usaha industri kecil. Berikut ini tanggapan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki mengenai pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

“Pelatihan IKM Alas Kaki ini memang penting mbak apalagi untuk industri dalam skala kecil seperti yang saya miliki, setiap pelatihan yang diberikan oleh DISPERINDAG saya ikut mbak, karena dengan adanya pelatihan tersebut bisa membantu saya untuk memproduksi sandal wanita, industri alas kaki yang saya produksi ini spesialis sandal mbak, jadi saya terus ikut karena awalnya memang suami saya yang merintis, dulu jadi buruh bikin sandal akhirnya kami memutuskan untuk membuat sendiri, tapi selama 2 tahun diadakannya pelatihan saya tidak bisa mengikuti dikarenakan sakit. Ketika pelatihan berlangsung biasanya yang datang memang bukan pelaku usaha itu sendiri, akan tetapi kebanyakan diwakilkan dengan anaknya.”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Supiah pada 3 Maret 2018 Pukul 13.00 di *home industri* alas kaki)

Pelatihan bagi pelaku usaha industri alas kaki harus dilakukan semenarik mungkin sehingga dapat menarik pelaku usaha IKM alas kaki untuk mengikuti

pelatihan tersebut. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan SKPD terkait dalam memberikan pelatihan melakukan upaya upaya yang semaksimal mungkin agar pelaku usaha IKM alas kaki dapat berpartisipasi dengan aktif. Berikut ini pemaparan Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam memberikan pelatihan bagi pelaku usaha IKM alas kaki kami membaginya secara berklaster, pelatihan ini diikuti oleh 235 Pelaku usaha, dengan menyebarkan undangan kepada pelaku usaha, akan tetapi pelaku usaha IKM alas kaki yang mengikuti pelatihan jumlahnya kurang dari 235 orang, padahal kami juga sudah melakukan berbagai macam upaya untuk dapat menarik mereka agar mengikuti pelatihan dengan cara peserta yang mengikuti pelatihan kami berikan pesangon sebesar Rp 50.000 per orang, akan tetapi upaya tersebut masih belum dapat menarik pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan yang kami berikan, padahal dengan adanya pelatihan tersebut pelaku IKM dapat memproduksi hasil industri alas kaki mereka dengan kualitas yang baik, karena dalam pelatihan salah satu tujuannya adalah mengelola bahan baku sebaik mungkin dan secara benar, karena pelaku usaha IKM alas kaki di Kota Mojokerto ini belum bisa memaksimalkan dan memanfaatkan bahan baku dengan baik, sehingga mereka asal-asalan dalam memproduksi alas kaki. Selain itu dalam pelatihan ini dilakukan kegiatan pembinaan dengan cara memberikan dampingan mengenai penerapan 3K (Kerapian, Keteraturan, dan Keindahan) agar sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP)”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada 7 Februari 2018 pukul 11.15 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Pelatihan bagi pelaku IKM alas kaki merupakan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan yang seharusnya diikuti secara aktif oleh para pelaku usaha IKM alas kaki, karena dengan adanya pelatihan yang diberikan tersebut para pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas mereka. Di samping itu, pelatihan yang diberikan oleh Disperindag juga didukung dengan adanya sarana prasaran

yang memadai, seperti dibangunnya gedung Workshop IKM alas kaki yang didalamnya juga difasilitasi mesin jahit dan beberapa sarana yang dapat mendukung proses pelatihan. Selain itu, tujuan lain dari pelatihan ini adalah dalam memproduksi alas kaki mereka dapat memproduksi sesuai dengan *Standard Operasional Procedure* (SOP) sehingga produk yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang baik karena dengan memiliki produk yang berkualitas, maka akan berdampak pada naiknya jumlah produksi yang juga akan berimbas pada bertambahnya peluang terserapnya tenaga kerja.

Berikut ini merupakan gambar pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto:



Gambar 7: Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2017

d. Mengembangkan Promosi

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk yang dihasilkan dengan cara berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu menurut (Hafsah, 2004:43) menjelaskan bahwa promosi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat proses kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan konsumen. Dalam mengembangkan promosi ini diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Untuk dapat mengembangkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha maka diperlukan suatu promosi baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa:

“Promosi ini merupakan suatu kegiatan yang harus terus dilakukan, untuk mengembangkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha IKM alas kaki. Selain dengan melakukan promosi secara langsung seperti membangun kios, promosi juga dapat dilakukan secara online. Untuk saat ini promosi yang dilakukan mengenai IKM alas kaki ini masih kurang meluas, karena rata-rata dari para pelaku usaha saat ini kurang bisa memanfaatkan teknologi, sehingga ini dapat membuka peluang bagi para pengangguran yang ada di Kota Mojokerto yang sebagian besar berasal dari lulusan SMK/SMA sederajat. Promosi ini dapat dilakukan oleh mereka, misalnya, di SMK ada jurusan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) nah mereka setidaknya bisa membuat media promosi secara online seperti membuat website, atau aplikasi penjualan online”. (Hasil wawancara dengan Ibu Yuli pada 15 Februari 2018 pukul 11.10 di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto).

Promosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena promosi sebagai penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Untuk dapat

memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto maka promosi merupakan kegiatan yang harus terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk mengembangkan promosi produk alas kaki di Kota Mojokerto kami melakukan kegiatan promosi di dalam Kota Mojokerto dan di luar Kota Mojokerto. Untuk di dalam Kota Mojokerto kita melakukan kegiatan promosi untuk semua produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di Kota Mojokerto, jadi tidak hanya industri kecil dan menengah alas kaki saja. Kami melakukan kegiatan promosi dengan menggelar pesta rakyat yang dilakukan setiap setahun sekali yang berlokasi di lapangan Surodinawan. Di samping itu, untuk kegiatan promosi di luar Kota Mojokerto kami biasanya mengikuti acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lainnya, seperti di daerah Batam, dan Bali. Untuk saat ini kami hanya memasarkan produk yang berkualitas yang selama ini sudah menjadi kepercayaan DISPERINDAG, untuk memasarkan di luar Kota Mojokerto kami hanya membawa produk dengan jumlah yang sedikit, sehingga untuk selanjutnya kami hanya menyerahkan kartu nama para pelaku usaha yang produknya kami pasarkan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 11.15 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto).

Promosi merupakan faktor penting untuk dapat menentukan keberhasilan suatu industri untuk memperkenalkan produk. Melalui promosi ini maka dapat diketahui mampu atau tidaknya produk alas kaki yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha alas kaki dapat menarik minat pembeli atau tidak. Dalam mempromosikan produk yang dihasilkan oleh industri alas kaki di Kota Mojokerto maka membutuhkan peran pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan produk yang dihasilkan oleh Kota Mojokerto. Melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto yang menonjol melalui industri kecil dan

menengah alas kaki. Saat ini Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian:

“Selain melakukan promosi di luar Kota Mojokerto dan menggelar pesta rakyat, untuk dapat mengembangkan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto kami juga memberikan sarana yang mendukung para pengusaha alas kaki dalam mempromosikan produk yang dihasilkannya dengan memberikan fasilitas yang berupa papan sentra alas kaki (Neon Box) dan Rak Display. Untuk pengadaan terkait sarana yang kami berikan tersebut kami memberikannya ketika ada dana saja, sehingga kami tidak bisa memberikannya setiap tahun, selain itu, kami juga tidak memberikan sarana kepada semua penguasaha alas kaki, akan tetapi kami memberikannya sesuai dengan kualifikasi yang kami tentukan seperti kami hanya memprioritaskan kepada para pelaku usaha yang memiliki industri dalam skala kecil”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada 1 Februari 2018 pukul 11.15 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Pendapat yang disampaikan oleh Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto juga dikuatkan dengan bukti berupa dokumentasi kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Berikut media promosi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto:

Gambar 8: Kegiatan promosi yang dilakukan melalui Pesta Rakyat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2017



Gambar 9: Media promosi melalui papan sentra yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Sumber: Dokumentasi peneliti Hasil Observasi Pada Tanggal 3 Maret 2018

Pengembangan produk yang dihasilkan para pengusaha alas kaki di Kota Mojokerto memiliki cara tersendiri untuk melakukan promosi. Agar produk yang dihasilkan oleh para pengrajin alas kaki dapat laku di pasaran maka kualitas produk juga harus baik. Sehingga untuk dapat mempromosikan produk maka pengusaha alas kaki dapat melakukannya melalui pembukaan *show room* yang menjual alas kaki. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Sujono selaku pengrajin alas kaki yang mengungkapkan bahwa:

“Upaya untuk mempromosikan produk alas kaki yang dihasilkan oleh para pengusaha alas kaki tentunya mempunyai cara yang berbeda beda. Di sini saya mempromosikan produk yang saya hasilkan melalui promosi secara langsung. Seperti saya membuka *show room* yang menjual sepatu kulit laki-laki dan perempuan. Selain itu saya juga mendatangi dari satu toko ke toko lainnya, dan juga saya kerjasama dengan sales, sales biasanya datang ke kios saya kemudian hasil industri alas kaki saya ini dijual oleh mereka. Kalau promosi tidak langsung seperti melalui media online saat ini saya tidak melakukannya” untuk pesta rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto saya pernah mengikutinya akan tetapi tidak rutin. (Hasil

wawancara dengan Bapak Sujono pada 20 Februari 2018 pukul 11.00 di *home industri* alas kaki Bapak Sujono)

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sujono selaku pengusaha industri kecil dan menengah alas kaki juga dikuatkan melalui bukti berupa dokumentasi kegiatan promosi yang dilakukannya. Berikut merupakan dokumentasi promosi yang dilakukan oleh Bapak Sujono melalui kios alas kaki yang dimilikinya:



Gambar 10: Promosi yang dilakukan oleh Bapak Sujono melalui *Show Room*

Sumber: Dokumentasi Hasil Observasi di Home industri alas kaki Bapak Sujono 2018

Banyak cara untuk mempromosikan hasil industri alas kaki di Kota Mojokerto meskipun cara yang mereka lakukan berbeda dengan pengusaha alas kaki lainnya, akan tetapi tujuan mereka sama yakni ingin mengenalkan produk yang dihasilkannya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto yang mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan promosi, saya hanya melakukan promosi secara langsung dengan cara saya mendatangi toko toko yang ada di Pasar Turi Surabaya. Saya melakukan promosi seperti ini karena dengan promosi seperti ini saya dapat dengan cepat untuk mengenalkan kepada konsumen. Produk alas kaki yang saya produksi ini berupa sandal wanita, jadi pendapatan saya juga tidak menentu hal ini juga tergantung pada pasar, biasanya produk saya laku ketika menjelang hari raya, akan tetapi kalau hari biasanya juga kadang sepi. (Hasil wawancara dengan ibu Supiah pada 3 Maret 2018 pukul 13.00 di *home industri* alas kaki Ibu Supiah)

Sejalan dengan Ibu Supiah, Bapak Wulyatin juga menembangkan promosi dengan menjajakan barang hasil industrinya ke pasar Turi. Berikut merupakan kutipan wawancara Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto:

“Dalam mengembankan promosi saya memilih untuk mendatangi atau menjajakan hasil produksi saya ke Pasar Turi karena dengan menjajakan langsung maka saya dapat mengenalkan sepatu kulit yang saya produksi kepada masyarakat. Selain itu, saya juga dapat langsung mendapatkan uang dari hasil penjualan saya tersebut”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Wulyatin pada 1 Maret 2018 pukul 11.30 di *home industri* alas kaki bapak Wulyatin)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, mengembankan promosi merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendukung berlangsungnya industri alas kaki yang ada di Kota Mojokerto. Untuk dapat mengembankan promosi agar produk yang dihasilkan oleh Kota Mojokerto dapat dikenal oleh masyarakat luas maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan peran SKPD terkait dan para pengrajin alas kaki untuk mengembankan promosi. Selain itu, untuk dapat memperluas kesempatan kerja bagi pengangguran di tingkat lulusan SMK se-derajat, maka pemerintah atau pengrajin alas kaki dapat bekerjasama untuk mempromosikan produk alas kaki hasil potensi Kota Mojokerto melalui online,

baik melalui website, aplikasi online dan lain-lain. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan mengembangkan promosi maka industri alas kaki Kota Mojokerto harus terus diberdayakan, sehingga potensi alas kaki yang dimiliki oleh Kota Mojokerto ini tidak hilang.

2. Kendala dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki dalam Mengurangi Pengangguran.

Untuk dapat melakukan pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki tidaklah mudah. Mengingat masalah pengangguran saat ini merupakan masalah yang membelit Kota Mojokerto terutama di kalangan lulusan SMK dan SMA se-derajat maka sektor informal melalui industri kecil dan menengah di Kota Mojokerto harus diberdayakan. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja di sektor formal lebih memprioritaskan pada sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan pada saat ini sumber daya manusia yang dimiliki Kota Mojokerto memiliki daya saing kualitas sumber daya manusia yang rendah. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto melalui industri kecil dan menengah adalah industri alas kaki. Meskipun para pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto dan SKPD terkait telah melakukan berbagai macam kegiatan pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki, akan tetapi masih saja terdapat kendala yang dihadapi dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki. Kendala yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah alas kaki menurut (Tambunan, 2002:70) mengungkapkan bahwa seiring dengan

perekembangan industri kecil dan menengah (IKM) maka tidak lepas dari permasalahan permasalahan yang menjadi sebuah tantangan untuk ditemukan solusinya, masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah meliputi kesulitan pemasaran, kesulitan bahan baku, kekurangan modal, kesulitan membayar pekerja, dan keterbatasan teknologi. Dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto di antaranya, kekurangan modal, keterbatasan teknologi, kesulitan membayar pekerja dan kesulitan pemasaran.

a. Kekurangan Modal

Untuk dapat memulai usaha dan mengembangkan usaha maka diperlukan suatu modal. Dengan adanya modal yang memadai maka akan mempermudah para pelaku usaha untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Sebaliknya, jika modal yang dimiliki tidak memadai maka akan mempersulit pelaku usaha untuk memulai suatu usaha dan mengembangkan usaha tersebut. Modal dapat digunakan untuk mendukung proses produksi industri kecil dan menengah, seperti untuk membeli bahan baku, alat-alat produksi dan untuk mendukung kelancaran dalam proses produksi. Modal yang digunakan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto untuk memulai usaha baru umumnya menggunakan modal pribadi dan modal pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian modal merupakan kendala yang dihadapi oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto, hal ini diungkapkan oleh Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto:

“Modal merupakan faktor terpenting yang tidak bisa dipisahkan dengan industri kecil dan menengah alas kaki. Modal disini merupakan faktor pendukung untuk melakukan kegiatan produksi, seperti membeli bahan baku alas kaki, membayar tenaga kerja, dan membeli alat produksi. Selama ini modal merupakan salah satu kendala yang rata rata dieluhkan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto, sehingga industri alas kaki di Kota Mojokerto ini mengalami pasang surut. Pasang surutnya industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto ini karena modal yang kami terima tidak memadai sehingga kami kesulitan untuk memproduksi alas kaki, apalagi kalau pengrajin melayani pesanan dengan jumlah yang banyak maka modal yang kami gunakan harus memadai”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wulyatin pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11.30 WIB di *home industri* alas kaki Bapak Wulyatin)

Sejalan dengan Bapak Wulyatin, Ibu Supiah juga mengalami kesulitan dalam permodalan. Untuk memulai usaha alas kaki maka harus memiliki modal yang memadai, seperti untuk membayar tenaga kerja dan membeli alat produksi alas kaki yang meliputi mesin jahit dan press. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk memulai usaha alas kaki diperlukan modal yang memadai, apalagi untuk mengembangkan industri alas kaki, dengan membeli peralatan produksi, dan membayar tenaga kerja. Saya memulai usaha ini dengan modal Rp.6.000.000 akan tetapi jumlah tersebut kurang untuk dapat mengembangkan usaha saya karena saya belum bisa membeli peralatan seperti mesin jahit, oven, press sehingga saya menjahit alas kaki melalui jasa jahit konvensional. Di samping itu saya juga kesulitan membayar tenaga kerja, awalnya saya memiliki 5orang tenaga kerja, karena modal yang saya miliki tidak memadai, ditambah lagi dengan pangsa pasar yang sepi akhirnya saya terpaksa mengurangnya, sehingga saat ini saya memiliki tenaga kerja hanya 3 orang”. (Hasil wawancara dengan Ibu Supiah pada 3 Maret 2018 pukul 13.00 WIB di *home industri* alas kaki Ibu Supiah)

Selain memulai usaha dengan modal pribadi beberapa pengrajin alas kaki memulai usahanya dengan menggunakan modal yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Untuk dapat mempertahankan

industri alas kaki di Kota Mojokerto agar dapat terus berkembang maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memberikan dukungan berupa bantuan permodalan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang mengungkapkan bahwa :

“Untuk dapat mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan memberikan bantuan permodalan. Dana yang kami berikan sebesar Rp. 10.000.000 dan harus dilunasi dalam 1 Tahun sebanyak 10 kali cicilan. Pinjaman yang kami berikan tidak ada bunga dan jaminan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada 7 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memberikan dukungan untuk memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki melalui bantuan modal, akan tetapi modal yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000 menurut para pengrajin alas kaki tidak dapat memadai untuk mengembangkan usaha mereka. Sehingga pengrajin alas kaki tidak dapat memproduksi dengan jumlah yang banyak, dan kesulitan untuk membayar tenaga kerja, sehingga berakibat pada berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri alas kaki. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Sujono selaku pengrajin alas kaki yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah memang memberikan bantuan pinjaman permodalan yang dimulai pada tahun 2004. Akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan dan tidak dilanjutkan pada tahun 2014, sehingga ketika pada tahun 2015 saya membutuhkan permodalan untuk mengembangkan industri alas kaki yang saya miliki, akhirnya saya meminjam modal di Bank. Untuk permodalan yang dipinjamkan oleh DISPERIINDAG saat ini sudah tidak dioperasikan lagi mbak karena banyak rekan-rekan pelaku usaha IKM alas kaki ini tidak melunasinya, mungkin karena tidak agunannya

sehingga mereka semena-mena, nah ketika masalah itu terjadi akhirnya memberikan imbas bagi para pelaku usaha IKM alas kaki karena saat ini kami secara mandiri harus pinjam ke Bank dengan agunan dan prosesnya juga ribet dan pada akhirnya produksi saya menurun mbak karena kekurangan modal”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sujono pada 20 Februari 2018 pukul 11.00 di *home industri* alas kaki Bapak Sujono)

Bantuan permodalan sangat diperlukan bagi pelaku usaha IKM alas kaki di Kota Mojokerto. Akan tetapi fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto ini tidak dapat dimaksimalkan oleh para pelaku usaha IKM alas kaki karena banyaknya utang yang menunggak, akhirnya pada tahun 2014 bantuan pinjaman modal ini diberhentikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian yang menyatakan bahwa :

“PMIKM ini dimulai pada tahun 2004 dan diberhentikan pada tahun 2014, alasan bantuan permodalan ini diberhentikan karena banyak pelaku IKM alas kaki yang menunggak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, sehingga bantuan permodalan ini diberhentikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebenarnya dengan adanya bantuan PMIKM ini kami dapat memberdayakan IKM alas kaki di Kota Mojokerto, akan tetapi karena mereka yang membuat masalah sendiri, maka para pelaku usaha terkendala untuk mendapatkan modal, apalagi untuk masyarakat yang ingin membuka industri alas kaki, padahal meskipun jumlahnya sedikit akan tetapi ini bisa membantu industri kecil dan menengah untuk mengembangkan dan memulai usaha baru bagi masyarakat yang ingi berwirausaha melalui IKM alas kaki”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 11.15 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Bantuan permodalan yang dimulai pada tahun 2004 tersebut diberhentikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena banyaknya pelaku usaha yang meminjam memiliki hutang yang menunggak. Berikut ini merupakan tabel Piutang Modal Industri Kecil dan Menengah (PMIKM) pada tahun 2004-2014:

Tabel 6 Piutang Modal Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki Kota**Mojokerto Tahun 2004-2014**

No	PMIKM TAHUN	BESAR PINJAMAN	ANGSURAN S/D TAHUN LALU	ANGSURAN TAHUN INI	JUMLAH ANGSURAN	SISA PINJAMAN	KETE
1	2004	285.000.000,00	192.665.000,00	2.740.000,00	195.405.000,00	89.595.000,00	25 s/d 6 orang s
2	2005	400.000.000,00	333.035.000,00	4.420.000,00	337.445.000,00	62.545.000,00	42 s/d 1 orang s
3	2006	410.000.000,00	365.370.000,00	950.000,00	368.320.000,00	43.680.000,00	26 s/d 1 orang s
4	2007	400.031.700,00	363.781.700,00	700.000,00	364.481.700,00	35.550.000,00	20 s/d 1 orang s
5	2008	400.000.000,00	326.370.000,00	3.875.000,00	330.245.000,00	69.755.000,00	35 s/d 1 orang s
6	2010	325.000.000,00	263.750.000,00	4.350.000,00	268.100.000,00	56.900.000,00	36 s/d 7 orang s
7	2011	400.000.000,00	364.400.000,00	2.350.000,00	366.750.000,00	33.250.000,00	15 s/d 1 orang s
8	2012	675.000.000,00	599.400.000,00	5.150.000,00	604.550.000,00	70.450.000,00	28 s/d 1 orang s
9	2013	615.000.000,00	483.060.000,00	3.305.000,00	486.365.000,00	128.635.000,00	39 s/d 1 orang s
10	2014	850.000.000,00	704.490.000,00	7.830.000,00	712.320.000,00	137.680.000,00	61 s/d 1 orang s
Grand total		4.760.031.700,00	3.996.321.700,00	35.670.000,00	4.033.981.700,00	728.040.000,00	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

b. Keterbatasan Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam proses memproduksi alas kaki sangat menentukan produk alas kaki yang dihasilkan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto. Semakin mahal dan sulitnya teknologi untuk diakses oleh pengrajin alas kaki maka hal ini akan mengurangi kapasitas produksi barang yang akan dihasilkan. Menurut (Tambunan 2002:70) pada umumnya di Indonesia teknologi yang digunakan oleh industri kecil dan menengah masih menggunakan teknologi yang tradisional. Hal ini menyebabkan tingkat produksi yang rendah dan kualitas produk yang dihasilkan juga rendah. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh kekurangan modal untuk membeli mesin-mesin baru untuk menyempurnakan hasil produksi.

Keterbatasan teknologi yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya permodalan atau modal yang terbatas untuk membeli teknologi yang lebih canggih. Sehingga seringkali keterbatasan teknologi ini merupakan salah satu penghambat untuk dapat memproduksi dengan jumlah yang banyak, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Wulyatin yang mengatakan bahwa:

“Teknologi yang saya gunakan untuk memproduksi alas kaki sangat tidak mendukung, karena modal yang saya gunakan untuk mengembangkan usaha industri alas kaki saya ini sangat terbatas, sehingga saya tidak bisa membeli teknologi yang canggih, padahal dengan teknologi yang canggih maka akan menghasilkan sepatu kulit yang kuat. Seperti alat press yang menyatukan *bottom* dan *upper* dari sepatu kulit ini saya masih menggunakan teknologi yang manual sehingga alas kaki yang saya produksi ini kalah dengan alas kaki hasil pabrik yang memiliki alat press

yang canggih”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wulyatin pada 1 Maret 2018 pukul 11.30 WIB di *home industri* alas kaki Bapak Wulyatin)

Berikut ini merupakan teknologi yang digunakan oleh Bapak Wulyatin di *home industri* alas kaki :



Gambar 11: Teknologi yang dimiliki oleh Bapak Wulyatin dalam memproduksi sepatu kulit

Sumber: Dokumentasi peneliti hasil observasi pada tanggal 1 Maret 2018

Sejalan dengan Bapak Wulyatin untuk memproduksi alas kaki sandal wanita Ibu Supiah juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan teknologi yang memadai, hal ini sesuai dengan kutipan wawancara Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki yang mengatakan bahwa:

“Untuk alat produksi yang saya gunakan ini masih menggunakan teknologi yang sangat terbatas, untuk memproduksi sandal wanita saya hanya mempunyai alat press untuk merengkatkan *butoom* sandal, sementara untuk mesin jahitnya saya tidak memiliki mesin jahit. Di sini saya hanya membuat alasnya saja kemudian untuk menjahitnya saya jahitkan ketenaga penjahit. Karena modal yang saya memiliki ini terbatas maka saya tidak dapat membelinya ditambah lagi saat ini pangsa pasar

yang saya produksi sedang sepi”.(Hasil wawancara dengan Ibu Supiah pada 3 Maret 2018 pukul 13.00 di *home industri* alas kaki Ibu Supiah)

Berikut ini merupakan teknologi yang digunakan oleh Ibu Supiah dalam memproduksi alas kaki (sandal wanita) di *home industri* miliknya:



Gambar 12: Teknologi dan kondisi *home industri* Ibu Supiah

Sumber: Dokumentasi peneliti hasil observasi tanggal 3 Maret 2018

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat memproduksi alas kaki dengan kapasitas yang baik para pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi yang canggih. Saat ini untuk memproduksi alas kaki pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto masih menggunakan teknologi yang manual. Sehingga pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto kerap merasa kualitas yang mereka hasilkan tidak bagus seperti hasil produksi alas kaki yang dihasilkan melalui industri besar seperti pabrik alas kaki yang berskala besar.

c. Kesulitan Membayar Pekerja

Pekerja merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung proses untuk memproduksi alas kaki. Dalam memproduksi alas kaki di *home industri* maka para pekerja mendapatkan upah. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Secara umum, perubahan tingkat upah akan mempengaruhi penyerapan pekerja. Naiknya upah akan mendorong industri kecil dan menengah alas kaki untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang harganya relatif lebih mahal. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto melalui kutipan wawancara berikut ini:

“Untuk saat ini saya memiliki pekerja sebanyak 1 orang saja mbak, dulu saya memiliki pekerja 4 orang. Untuk pekerja upah yang saya berikan satu bulan Rp.800.000. Akan tetapi beberapa tahun kemudian pekerja yang bekerja di *home industri* saya berkurang. Berkurangnya pekerja ini disebabkan oleh kondisi IKM alas kaki tidak dapat membayar upah pekerja dengan jumlah yang banyak, karena keterbatasan modal dan pangsa pasar yang tidak kondusif, akhirnya pendapatan yang saya terima tidak dapat membayar pekerja dengan jumlah yang banyak”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wulyatin pada 1 Maret 2018 pukul 11.30 di *home industri* alas kaki Bapak Wulyatin)

Sejalan dengan Bapak wulyatin, Ibu Supiah juga mengalami kendala dalam membayar pekerja yang membayar di industri kecil alas kaki yang dimilikinya. Berikut adalah penjelasan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki:

“Salah satu kesulitan yang menjadi penghambat dalam industri kecil dan menengah alas kaki adalah membayar pekerja. IKM alas kaki yang saya miliki terdapat 1 orang pekerja. Dulu ketika IKM alas kaki saya produksinya terus meningkat saya memiliki pekerja sebanyak 5 orang. Akan tetapi karena pendapatan dari hasil industri alas kaki yang saya miliki menurun karena sepi, akhirnya tenaga kerja di industri alas kaki

saya berkurang. Selain itu, karena bahan baku alas kaki yang saya buat ini harganya mulai naik dari tahun sebelumnya, maka saya tidak bisa membayar upah pekerja dengan jumlah yang banyak sesuai dengan apa yang mereka inginkan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Supiah 3 Maret 2018 pukul 13.00 di *home industri* alas kaki Ibu Supiah)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto mengalami kesulitan dalam membayar pekerja yang mereka kerjakan di industri alas kaki. Kesulitan membayar pekerja ini disebabkan oleh modal yang terbatas dan pangsa pasar yang tidak kondusif. Di samping itu, para pekerja yang memintah kenaikan upah ini tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima oleh pengrajin alas kaki. Sehingga pekerja yang bekerja di sektor industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto ini berkurang. Berikut ini merupakan gambar pekerja yang bekerja di industri alas kaki Bapak Wulyatin dan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto:



Gambar 13: Pekerja di industri alas kaki Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto

Sumber: Dokumentasi peneliti hasil observasi tanggal 3 Maret 2018



Gambar 14: Pekerja di industri alas kaki Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto

Sumber: Dokumentasi peneliti hasil observasi pada tanggal 1 Maret 2018

d. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran berkaitan dengan bagaimana cara meyakinkan pembeli atau pelanggan terhadap produk yang akan dijual. Untuk dapat meyakinkan pembeli penjual harus memiliki keyakinan bahwa produk yang dijual memang patut dibeli. Karena itu perlu dipertimbangkan beberapa aspek dalam menentukan pemasaran yang akan dijalankan. Pemasaran dapat dilakukan melalui dua cara yakni pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran langsung dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan pembeli. Sedangkan pemasaran tidak langsung dilakukan dengan cara perantara. Agar produk yang dihasilkan dapat laku di pasar maka para pengusaha alas kaki ini harus aktif untuk mengikuti promosi baik promosi tersebut difasilitasi oleh pemerintah maupun dilakukan sendiri. Pemasaran seringkali menjadi salah satu kendala bagi industri kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh industri kecil dan menengah adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa, sehingga berdampak pada dunia usaha di Indonesia yang cukup tersendat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang mengungkapkan bahwa:

“Pemecahan masalah pengangguran tidak dapat dilakukan melalui kegiatan penempatan kerja sektor formal namun juga melalui upaya-upaya pembiayaan dan fasilitasi pembentukan usaha baru di sektor informal. Industri kecil dan menengah alas kaki merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat menciptakan usaha baru di sektor informal. Akan tetapi selama ini industri alas kaki mengalami kendala dalam hal pemasaran, terutama dalam hal tekanan-tekanan persaingan.

Banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia banyaknya barang yang masuk secara otomatis akan dapat mengganggu sisi kreatifitas calon wirausaha baru dan pengrajin alas kaki dalam memproduksi produk yang mereka hasilkan”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli pada 15 Februari 2018 pukul 11.10 di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto)

Dalam memasarkan produk yang dihasilkan para pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto mempunyai cara yang berbeda dengan yang lainnya. Untuk dapat mempromosikan dengan baik terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengrajin alas kaki. Hal ini diungkapkan Bapak Sujono selaku pengrajin alas kaki yakni:

“Dalam memasarkan produk yang saya hasilkan seringkali saya terkendala dengan produk produk impor dari luar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih menganggap bahwa produk alas kaki yang berasal dari luar memiliki kualitas yang bagus, sehingga saat ini industri alas kaki sedang sepi. Selain itu kepemilikan *show room* untuk para pengusaha alas kaki ini sangat diperlukan, bahkan kami berharap di Kota Mojokerto ini didirikan *show room* yang khusus memasarkan industri alas kaki hasil dari Kota Mojokerto itu sendiri. Saat ini pengusaha alas kaki yang memiliki *show room* hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah industri alas kaki di Kota Mojokerto”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sujono pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 11.00 di *home industri* alas kaki Bapak Sujono)

Para pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto memiliki daerah pemasaran yang berbeda. Akan tetapi pemasaran yang dilakukan oleh para pengrajin alas kaki tidak selalu mulus, ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh mereka, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki seperti yang ada dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Untuk memasarkan produksi alas kaki yang saya hasilkan saya memilih pasar turi sebagai tempat untuk menjajakan hasil produksi alas kaki saya akan tetapi saat ini kendala yang sering saya hadapi adalah barang yang

saya jajakkan tidak langsung laku terjual padahal upah pekerja harus dibayar, ketidakseimbangan antara biaya produksi dengan hasil yang diperoleh oleh daerah lain”. (Hasil wawancara dengan Ibu Supiah pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 13.00 di *home industri* alas kaki Ibu Supiah)

Agar produk yang dihasilkan dapat laku di pasar maka para pengusaha alas kaki ini harus aktif untuk mengikuti promosi baik promosi tersebut difasilitasi oleh pemerintah maupun dilakukan sendiri. Dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengrajin alas kaki alas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kegiatan yang membantu pengrajin alas kaki untuk memperkenalkan produk mereka, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Iwiek Muzayana selaku Kepala Bidang Perindustrian dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto kami memfasilitasinya dengan pameran atau yang dinamakan dengan uji pasar. Biasanya kami senggarakan dalam Pesta Rakyat. Dalam pesta rakyat tersebut industri alas kaki yang sudah kami uji, kami jajakkan di stand yang sudah kami sediakan. Selain itu kami juga membawa produk IKM alas kaki ke luar Kota Mojokerto dengan mengikuti pameran di daerah lainnya. Sementara untuk di dalam Kota sendiri kami memfasilitasinya melalui sarana neon box dan rak Display”. (Hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana pada 7 Februari 2018 pukul 11.15 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memfasilitasi para pengrajin alas kaki Kota Mojokerto melalui program dan kegiatan yang dijalankannya, akan tetapi program dan kegiatan yang dilakukan tersebut tidak berdampak bagi pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki yang mengatakan bahwa:

“Untuk mengikuti pameran yang diadakan DISPERINDAG saya tidak pernah diikuti mbak, dan saya rasa pameran tersebut tidak berdampak pada penjualan alas kaki saya, sementara itu kalau sarana promosi yang diberikan oleh DISPERINDAG saya mendapatkan sarana tersebut akan tetapi juga tidak mendukung saya untuk mempromosikan, karena rak display yang diberikan itu tidak mendukung mbak, karena meskipun mendapatkan rak, akan tetapi saya belum bisa memaksimalkan rak tersebut, artinya tempat untuk mempromosikan melalui rak display itu belum ada tempat yang strategis selain itu juga promosi yang difasilitasi oleh DISPERINDAG ini kurang merata, kalau musim hari raya natal dulu saya sampai ke Walahan, akan tetapi saat ini sungguh disayangkan promosinya sangat susah sekali, apalagi industri kecil seperti yang saya miliki ini belum pernah diberikan undangan untuk mengikuti pameran, padahal industri kecil alas kaki yang saya produksi ini kualitasnya bagus”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wulyatin pada 1 Maret 2018 pukul 11.30 di *home industri* alas kaki Bapak Wulyatin)

Faktor pemasaran merupakan faktor utama yang dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto. Dalam memasarkan produk yang dihasilkan para pengrajin alas kaki memiliki cara yang berbeda-beda. Sementara itu dalam memasarkan produk alas kaki pengrajin alas kaki seringkali mengalami kendala, sehingga mereka kesulitan untuk dapat mengembangkan industri alas kaki mereka. Di samping itu, bantuan sarana pemasaran produk alas kaki melalui Neon Box yang sudah tidak layak pakai dan rak display yang tidak didukung oleh tempat untuk memasarkan, menjadi salah satu kendala pengrajin alas kaki dalam memasarkan produknya. Berikut ini merupakan sarana promosi yang menghambat pengrajin alas kaki untuk memasarkan produk alas kaki:



Gambar 15: Media pemasaran (Neon Box) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Dokumentasi peneliti hasil observasi di industri alas kaki Bapak Wulyatin tanggal 1 Maret 2018



Gambar 16: Media Pemasaran (Rak Display) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dokumentasi peneliti hasil observasi di industri alas kaki Ibu Supiah 3 Maret 2018

D. Analisis Data

1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki dalam Rangka Mengurangi Pengangguran

a. Penciptaan Iklim Usaha Kondusif

Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung masyarakat agar tertarik untuk bekerja melalui usaha industri kecil dan menengah. Menurut (Hafsah, 2004:43) yang dimaksud dengan penciptaan iklim yang kondusif adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan, penyederhanaan prosedur perijinan usaha. Untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif maka diperlukan dukungan dari SKPD terkait. Tujuan diciptakannya iklim usaha yang kondusif ini adalah memberikan kesempatan perluasan tenaga kerja melalui sector informal melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Kota Mojokerto memiliki potensi industri kecil dan menengah alas kaki yang dapat memberikan kontribusi untuk menyerap tenaga kerja baik sebagai pekerja maupun menciptakan wirausaha baru di bidang industri alas kaki. Dalam menciptakan iklim usaha kondusif Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengupayakannya dengan cara menyederhanakan prosedur perizinan industri kecil dan menengah. Upaya penyederhanaan prosedur perizinan tersebut dilakukan dengan penyederhanaan prosedur dan persyaratan untuk mendirikan usaha industri kecil dan menengah alas kaki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana untuk mendapatkan izin mendirikan usaha industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto, masyarakat yang

akan mendirikan usaha cukup membuat TDI dengan datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Tanda Daftar Industri tidak diwajibkan untuk industri dalam skala industri kecil, akan tetapi jika industri kecil ingin mengurus izin TDI maka diperbolehkan. Sedangkan untuk membuat TDI maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Iklim usaha yang kondusif sangat berpengaruh terhadap potensi industri alas kaki di Kota Mojokerto, dengan adanya iklim usaha yang kondusif maka dapat mendukung industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto untuk dikembangkan, selain itu dengan adanya iklim usaha yang kondusif melalui prosedur penyederhanaan perizinan akan berdampak terhadap legalitas bagi industri yang didirikannya sehingga para pelaku usaha industri alas kaki dapat dengan mudah untuk mengembangkan industri alas kaki yang ada. Di samping itu, dengan prosedur penyederhanaan perizinan maka akan berdampak positif untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Mojokerto yang ingin bekerja atau membuka usaha baru melalui industri kecil dan menengah alas kaki.

b. Bantuan Permodalan

Memulai usaha dan mengembangkan usaha maka dibutuhkan permodalan yang memadai. Dengan adanya permodalan yang memadai maka akan mendukung pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Menurut (Tambunan, 2002: 22) mengatakan bahwa modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap usaha,

baik skala kecil, menengah maupun besar. Sementara itu menurut (Hafasah, 2004:43) dalam memberdayakan industri kecil dan menengah maka perlu pemerintah untuk memperluas skim kredit khusus dengan syarat yang tidak memberatkan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah.

Dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi para pelaku usaha dalam mengembangkan industri alas kaki yang dimilikinya melalui bantuan permodalan. Bantuan permodalan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto disebut dengan PMIKM (Piutang Modal Industri Kecil dan Menengah), PMIKM merupakan bantuan permodalan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto tanpa agunan, tanpa bunga dan tanpa denda, didirikan pada tahun 2004 yang ditujukan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto yang sudah mendapatkan legalitas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nominal dalam bantuan permodalan PMIKM minimal sebesar Rp. 100.000 dan Maksimal sebesar Rp.10.000.000 dengan waktu pelunasan selama 10 bulan. Mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan permodalan tersebut masyarakat dapat mendatangi langsung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membawa persyaratan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bantuan permodalan untuk industri kecil dan menengah als kaki sangat diperlukan oleh pelaku usaha industri alas kaki di Kota Mojokerto, baik dalam memulai usahanya dan mengembangkannya. Untuk mendapatkan modal

pengrajin industri alas kaki mendapatkannya dengan cara yang berbeda mulai dari meminjam dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, pinjaman permodalan dari BANK, dari tabungan bahkan berasal dari hasil menjual aset yang dimilikinya. Hal ini dilakukan oleh Bapak Wulyatin pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto mengenai permodalan pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto memiliki banyak cara untuk dapat mendapatkan permodalan, akan tetapi untuk dapat memulai usaha industri alas kaki dan mengembangkannya maka dibutuhkan modal yang memadai dan mudah diakses, karena dengan adanya permodalan yang memadai maka pengrajin alas kaki dapat meningkatkan produksinya dan tidak kesulitan dalam membayar pekerja maupun membeli bahan baku alas kaki.

Dengan adanya bantuan permodalan yang memadai dan mudah diakses, maka hal ini akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja di sektor informal, baik bagi masyarakat yang akan bekerja sebagai pekerja di industri kecil dan menengah alas kaki maupun bagi masyarakat yang ingin membuka usaha industri kecil dan menengah alas kaki.

c. Pelatihan

Di dalam proses pemberdayaan maka ada beberapa model yang dapat digunakan. Model dapat diartikan sebagai contoh, pola, atau acuan, sehingga model pemberdayaan masyarakat memiliki pengertian contoh atau pola untuk melakukan upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang atau lembaga yang bersangkutan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya

secara maksimal. Menurut Menurut (Suryono, 2010:264-270) dalam pemberdayaan model *people centre development* dapat dilakukan pada program pemberdayaan masyarakat yang sering dijumpai pada program program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu program pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah melalui pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk mengembangkan potensi industri alas kaki yang ada di Kota Mojokerto. Menurut (Hafsah, 2004:44) mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi industri kecil dan menengah baik dari aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi serta keterampilannya dalam mengembangkan usahanya. Untuk dapat memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memfasilitasi para pengrajin alas kaki melalui kegiatan pelatihan. Pelatihan industri alas kaki diselenggarakan di Gendung Workshop IKM Alas Kaki yang khusus digunakan untuk melakukan pelatihan IKM alas kaki, dalam memberikan pelatihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama ini hanya bekerjasama dengan BIPI (Balai Pengembangan Industri dan Persepatuan Indonesia. Pelatihan industri kecil dan menengah alas kaki dilakukan 1 tahun 2 kali dengan waktu 1 bulan, akan tetapi karena terkendala oleh biaya maka pelatihan IKM alas kaki dilakukan selama 1 tahun 1 kali dan dalam kurun waktu 2 minggu. Pelatihan IKM alas kaki dilakukan dalam tiga fase diantaranya :

1. Fase mendiskusikan dan merancang konsep produk dan segmen pasar yang baru
2. Fase pembuatan prototipe yakni gambaran desain produk alas kaki yang akan diwujudkan menjadi prototipe kemudian kualitas dari produk tersebut akan diuji oleh BIPI (Badan Pengembangan Industri dan Persepatuan Indonesia)
3. Fase uji dasar, pada fase ini dilakukan dua tahapan uji pasar terhadap prtotipe produk baru untuk mengetahui respon dari konsumen sasaran.

Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan faktor yang penting untuk dapat memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto sehingga partisipasi para pengrajin alas kaki juga akan mendukung berlangsungnya pelatihan tersebut. Untuk menarik para pengrajin alas kaki agar dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya dengan memberikan pesangon sebesar Rp. 50.000 kepada para pengrajin alas kaki yang mengikuti pelatihan. Dalam memberikan pelatihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto membaginya secara berklaster dengan menyebarkan undangan kepada pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto. Dalam satu tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memiliki target sebanyak 235 pengrajin alas kaki untuk mengikuti pelatihan, akan tetapi dari target tersebut pengrajin alas kaki

yang berpartisipasi untuk mengikuti pelatihan kurang dari target yang telah ditentukan.

Pelatihan industri alas kaki di Kota Mojokerto pada dasarnya memiliki manfaat yang besar bagi para pengrajin alas kaki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iwiek Muzayana tujuan pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain untuk memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki adalah untuk meningkatkan produksi alas kaki di Kota Mojokerto dengan kualitas yang baik, karena di dalam pelatihan tersebut juga dilakukan pembinaan dengan cara memberikan pendampingan mengenai penerapan 3K (Kerapian, Keteraturan, dan Keindahan) sehingga dapat sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto merupakan suatu kegiatan yang harus terus dikembangkan, agar sektor informal industri kecil dan menengah alas kaki dapat memberikan peluang untuk memperluas kesempatan kerja. Mengingat bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Mojokerto sebagian besar tidak dapat menyerap tenaga kerja di sektor formal, maka sektor informal melalui industri kecil dan menengah alas kaki ini harus terus diberdayakan.

d. Mengembangkan Promosi

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Menurut (Hafsah,2004:43)

promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempercepat proses kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan konsumen, dengan menggunakan media yang bermacam-macam. Dalam mempromosikan produk industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto pengrajin alas kaki memiliki cara yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan oleh Bapak Sujono untuk mempromosikan produk yang dihasilkan Bapak Sujono memasarkannya secara langsung dengan membuka show room di industri alas kaki miliknya, berbeda dengan Bapak Sujono, Bapak Wulyatin dan Ibu Supiah lebih memilih mempromosikannya secara langsung dengan menjajakan produk alas kakinya di Pasar Turi.

Sementara itu menurut Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja promosi produk alas kaki saat ini masih terbatas, promosi produk alas kaki seharusnya juga dapat dilakukan secara online, akan tetapi saat ini pemasaran secara online belum dapat dialakukan oleh pengrajin alas kaki, hal ini disebabkan oleh pengrajin alas kaki belum bisa mempromosikan produknya secara online, padahal saat ini kemajuan teknologi sangat membantu para pengrajin alas kaki untuk mempromosikan produk mereka. untuk dapat memperluas kesempatan kerja bagi pengangguran di tingkat lulusan SMK se-derajat, maka pemerintah atau pengrajin alas kaki dapat bekerjasama untuk mempromosikan produk alas kaki hasil potensi Kota Mojokerto melalui online, baik melalui website, aplikasi online dan lain-lain

Upaya untuk mempromosikan produk industri alas kaki juga membutuhkan peran pemerintah, sehingga pengrajin alas kaki tidak kesulitan dalam mempromosikan produk yang dihasilkannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memfasilitasi pengrajin alas kaki dalam mempromosikan produknya dengan dua cara yakni mempromosikan di dalam lingkungan Kota Mojokerto dan mempromosikannya di luar Kota Mojokerto. Untuk mempromosikan produk di dalam lingkungan Kota Mojokerto Dinas Perindustrian memberikan fasilitasn bantuan sarana Neon Box dan Rak Display kepada pengrajin alas kaki, sarana tersebut diberikan ketika ada dana saja, dan lebih memprioritaskan pada pengrajin alas kaki yang memiliki industri alas kaki dalam skala kecil. Selain memberikan bantuan berupa sarana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto juga mengadakan kegiatan Pesta Rakyat dalam 1 tahun 1 kali.

Sementara itu untuk mempromosikan produk industri alas kaki di luar Kota Mojokerto Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mempromosikan produk ke Batam dan Bali dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan membawa produk alas kaki dalam jumlah yang sedikit kemudian membawa kartu nama pengrajin alas kaki yang selama ini produknya dari segi kualitasnya sudah dipercaya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga untuk mempromosikan produk industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyeleksi terlebih dahulu sebelum mempromosikannya.

2. Kendala dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alas Kaki dalam Mengurangi Pengangguran

Pada tahun 2017 Kota Mojokerto masih dibelit dengan masalah pengangguran. Terutama di golongan lulusan SMA atau SMK se-derajat. Kondisi sumber daya manusia yang rendah tidak dapat menyerap tenaga kerja di sektor formal, sehingga sektor informal melalui industri kecil dan menengah harus diberdayakan. Meskipun pemerintah maupun pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memberdayakan industri alas kaki, akan tetapi dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah alas menurut (Tambunan, 2002:70) mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) maka tidak lepas dari permasalahan permasalahan yang menjadi sebuah tantangan untuk ditemukan solusinya, masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah meliputi kesulitan pemasaran, kesulitan bahan baku, kekurangan modal, kesulitan membayar pekerja, dan keterbatasan teknologi. Dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto di antaranya:

a. Kekurangan Modal

Modal merupakan Faktor terpenting dalam memulai usaha dan mengembangkan usaha. Menurut (Tambunan, 2002:70) Industri kecil menengah di Indonesia sering dihadapi masalah dalam segi finansial yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi (perluasan kapasitas produksi atau menggantikan mesin tua). Modal dapat digunakan untuk mendukung proses produksi industri kecil dan menengah, seperti membeli bahan baku, membeli alat-alat pendukung produksi dan membayar pekerja. Modal yang digunakan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto berasal dari modal pribadi dan pinjaman.

Sebagian besar pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto menghadapi kendala dalam memproduksi dan memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki yang mereka miliki yakni kekurangan modal. Kekurangan modal ini menjadikan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto mengalami pasang surut. Potensi melalui industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto harus terus dipertahankan, peran pemerintah dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto sangat diperlukan. Salah satu bantuan untuk mendapatkan modal yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melalui bantuan permodalan PMIKM yang didirikan pada tahun 2004 dan diberhentikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014. Meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan permodalan bagi industri kecil dan menengah alas kaki, akan tetapi dengan modal

sebesar Rp. 10.000.000 menurut pengrajin alas kaki tidak cukup untuk mengembangkan usaha industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto, sehingga akibat dari kekurangan modal tersebut pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto kesulitan dalam memproduksi alas kaki. Pemberhentian bantuan permodalan pada tahun 2014 disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha industri kecil dan menengah alas kaki yang menunggak lebih dari batas yang telah ditentukan.

Pemberhentian bantuan permodalan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut berdampak pada kesulitan pengrajin alas kaki untuk mencari bantuan permodalan, karena ketika PMIKM diberhentikan untuk mendapatkan modal agar industri kecil dan menengah alas kaki dapat bertahan dan berkembang pengrajin alas kaki secara mandiri mendapatkan pinjaman dari Bank dengan persyaratan dan prosedur yang ribet.

b. Keterbatasan Teknologi

Industri kecil dan menengah alas kaki dalam memproduksi alas kaki membutuhkan teknologi yang canggih, karena teknologi yang digunakan dalam memproduksi alas kaki sangat menentukan kualitas produk alas kaki. Menurut (Tambunan 2002:70) mengatakan bahwa di Indonesia sebagian besar teknologi yang digunakan oleh industri kecil dan menengah masih menggunakan teknologi yang tradisional. Keterbatasan teknologi yang digunakan oleh industri kecil dan

menengah alas kaki menyebabkan pada rendahnya tingkat produksi dan kualitas produk yang kurang baik.

Dalam melakukan kegiatan produksi alas kaki, pengrajin alas kaki teknologi yang kurang canggih menjadi sebuah kendala yang dirasakan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto. Keterbatasan teknologi di industri kecil dan menengah alas kaki disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kurangnya permodalan untuk mendukung kegiatan produksi. Sebagian besar teknologi yang digunakan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto masih tradisional dan kalah dengan teknologi yang digunakan oleh industri besar. Keterbatasan teknologi pada akhirnya menyebabkan produk yang dihasilkan tidak kuat. Hal ini dilakukan oleh Bapak Wulyatin untuk memproduksi alas kaki jenis sepatu kulit teknologi yang digunakan masih manual sehingga produk alas kaki yang dihasilkannya tidak kuat, dibandingkan dengan produk dari industri besar yang menggunakan teknologi canggih. Keterbatasan teknologi dalam industri kecil dan menengah ini juga berdampak pada jumlah produk yang dihasilkan.

c. Kesulitan Membayar Pekerja

Pekerja merupakan salah satu faktor pendukung industri kecil dan menengah alas kaki untuk dapat memproduksi alas kaki. Menurut (Tambunan, 2002:20) Kesulitan membayar pekerja terletak pada pendapatan atau perolehan nilai produksi yang menurun sedangkan upah pekerja mengalami kenaikan. Sehingga industri kecil menengah mengalami kesulitan untuk memberikan upah

dan pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh IKM. Sebagian besar pengrajin alas kaki mengalami kesulitan untuk membayar pekerja. Naiknya upah akan berdampak pada berkurangnya pekerja di Industri kecil dan menengah alas kaki. Kesulitan membayar pekerja disebabkan oleh keterbatasan permodalan dan pangsa pasar yang sepi, sehingga pendapatan yang diperoleh pengrajin alas kaki menurun.

d. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu strategi untuk mengenalkan produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah alas kaki kepada masyarakat. Pemasaran dapat dilakukan melalui dua cara yakni pemasaran langsung dan tidak langsung. Dalam memasarkan produk alas kaki yang dihasilkan para pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto memiliki cara yang berbeda dengan pengrajin alas kaki lainnya. Agar produk alas kaki laku di pasaran, maka pengrajin harus aktif untuk memasarkan produknya baik pemasaran tersebut difasilitasi oleh pemerintah maupun pemasaran yang dilakukan secara mandiri. Menurut (Tambunan, 2002:20) pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha kecil menengah khususnya industri kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh industri kecil menengah adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa.

Kendala pemasaran tersebut berdampak pada dunia usaha di Kota Mojokerto tersendat. Sementara itu, mengingat sektor informal melalui industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto penting untuk memperluas kesempatan kerja maka industri alas kaki memerlukan fasilitasi pembiayaan dan pembinaan serta fasilitasi pembentukan usaha baru. Kendala pemasaran alas kaki di Kota Mojokerto salah satunya disebabkan oleh tekanan-tekanan persaingan banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia yang berdampak terhadap sisi kreatifitas calon wirausaha baru yang akan membuka usaha di sektor industri kecil dan menengah alas kaki. Sebagian besar kendala pemasaran yang dihadapi oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto kurangnya fasilitas untuk memasarkan produk yang dihasilkannya, seperti masih kurangnya show room yang digunakan sebagai media pemasaran secara langsung. Dalam memasarkan produk alas kaki pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi pengrajin alas kaki melalui pameran dan bantuan sarana untuk media pemasaran. Untuk kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih sulit untuk dapat diakses oleh pengrajin alas kaki, hal ini dikarenakan pameran yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya diikuti oleh beberapa pengrajin alas kaki saja dan ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sementara itu untuk bantuan sarana media pemasaran produk alas kaki yang berupa neon box dan rak display tidak dapat mendukung pengrajin alas kaki untuk memasarkan produknya hal ini dikarenakan belum ada tempat yang strategis untuk memasarkan serta neon box yang

difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah banyak yang tidak layak pakai, bahkan sampai saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum dapat menggantikan neon box yang rusak sebagai media promosi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) alas kaki di Kota Mojokerto dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha yang kondusif dapat diciptakan melalui penyederhanaan prosedur perizinan. Tujuan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mendirikan usaha di sektor industri kecil dan menengah alas kaki salah satunya adalah untuk membuka atau memperluas kesempatan kerja di sektor informal. Dengan adanya penyederhanaan prosedur perizinan maka dapat mempermudah masyarakat untuk memulai usaha industri alas kaki. Untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif maka memerlukan dukungan pemerintah setempat sebagai fasilitator untuk memberikan izin untuk mendirikan usaha. Industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto dapat mendapatkan izin dengan mudah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Untuk mendapatkan izin maka masyarakat harus mempunyai Tanda Daftar Industri (TDI). Bagi industri alas kaki dalam

skala menengah yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 5.000.000 maka harus memiliki TDI, bagi Industri alas kaki dalam skala kecil maka tidak diwajibkan untuk memiliki TDI akan tetapi jika industri alas kaki tersebut ingin mendapatkan TDI maka diperbolehkan.

2. Bantuan Permodalan

Modal merupakan salah satu faktor terpenting untuk dapat memulai usaha dan mengembangkan usaha industri alas kaki bagi pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto. Untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto mendapat modal dari hasil pinjaman dan modal sendiri. Dalam memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan fasilitas bantuan permodalan bagi pengrajin alas kaki untuk dapat mengembangkan usaha industri alas kakinya. Pada tahun 2004 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memberikan bantuan permodalan PMIKM (Piutang Modal Industri Kecil dan Menengah) PMIKM merupakan bantuan permodalan tanpa agunan, tanpa denda dan tanpa bunga, bantuan ini diberikan dengan jumlah minimal Rp. 100.000 dan maksimal Rp. 10.000.000 dengan 10 kali cicilan. Bantuan permodalan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto pada tahun 2014 diberhentikan hal ini dikarenakan banyaknya pengrajin alas kaki yang menunggak.

3. Pelatihan

Pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki di Kota Mojokerto dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan industri alas kaki di Kota Mojokerto difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Pelatihan alas kaki diadakan dalam setahun satu kali dengan waktu selama 2 Minggu. Dalam memberikan pelatihan industri alas kaki Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Balai Pengembangan Industri dan Persepatuan Indonesia (BIPI). Pelatihan dilakukan dalam 3 fase yakni fase mendiskusikan dan merancang konsep produk dengan segmen pasar yang baru, fase pembuatan prototipe dan fase uji dasar.

4. Mengembangkan Promosi

Mengembangkan promosi merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan industri kecil dan menengah alas kaki. Dalam mempromosikan produk alas kaki, pengrajin alas kaki memiliki cara yang berbeda dengan pengrajin alas kaki yang lainnya. Pengembangan promosi produk alas kaki di Kota Mojokerto dilakukan dengan pembukaan *show room*, dan mendatangi sentra penjualan sepatu baik di dalam Kota Mojokerto maupun di luar Kota Mojokerto. Sementara itu, untuk dapat mengembangkan produk alas kaki di Kota Mojokerto Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi pengrajin alas kaki baik di dalam Mojokerto maupun di luar Kota Mojokerto, untuk mengembangkan promosi di dalam Kota Mojokerto Dinas Perindustrian dan

Perdagangan memfasilitasinya melalui kegiatan Pesta Rakyat yang dilakukan setiap satu tahun sekali dan memberikan bantuan sarana berupa neon box dan rak kepada pengrajin alas kaki. Sementara itu, untuk mengembangkan promosi di luar Kota Mojokerto biasanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di daerah lain, seperti di Batam dan Bali.

5. Pemberdayaan industri alas kaki di Kota Mojokerto mengalami beberapa kendala terutama bagi pengrajin alas kaki. Kendala yang dihadapi oleh pengrajin alas kaki meliputi kekurangan modal yakni modal untuk memulai dan mengembangkan usaha industri alas kaki sulit untuk diakses dan tidak memadai sehingga berdampak pada pasang surut industri alas kaki di Kota Mojokerto. Kedua dari segi keterbatasan teknologi yakni teknologi yang digunakan oleh pengrajin alas kaki masih kurang canggih jika dibandingkan dengan industri besar, sehingga berakibat pada kualitas produk alas kaki yang dihasilkan dan jumlah produk yang terbatas. Ketiga dari segi kesulitan membayar pekerja yakni keterbatasan modal berdampak pada berkurangnya pekerja dan pendapatan yang berkurang sehingga pengrajin alas kaki mengurangi pekerja untuk membantu proses produksi alas kaki, selain itu tuntutan naiknya upah pekerja membuat pengrajin alas kaki kesulitan untuk membayar upah tersebut. Keempat dari segi kesulitan pemasaran yakni persaingan produk impor yang masuk di Indonesia berakibat kepada pengrajin alas kaki untuk memasarkan produknya, selain itu masih minimnya *show*

room yang dimiliki oleh pengrajin alas kaki sehingga mereka tidak bisa memasarkan produknya secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas, maka peneliti berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto serta pengrajin alas kaki dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alas kaki dalam Rangka Mengurangi Pengangguran. Masukan tersebut diantara lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto secara konsisten harus berupaya untuk memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat yang akan membuka usaha industri alas kaki dan pengrajin alas kaki untuk mengembangkan usahanya dengan mempermudah persyaratan dan manajemen keuangan yang baik, sehingga bantuan permodalan dengan mudah dapat diakses dan mendukung pengrajin alas kaki untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerjasama dengan Bank sehingga pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto dapat mengakses permodalan dengan mudah dengan persyaratan dan prosedur yang tidak ribet.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dapat bekerjasama dengan lembaga terkait mengenai teknologi yang digunakan oleh pengrajin alas kaki, seperti bekerjasama dengan lembaga penelitian teknologi yang dapat mendukung produksi alas kaki, selain itu bantuan teknologi sangat

diperlukan oleh industri alas kaki dalam skala kecil sehingga dalam hal ini untuk memberdayakan industri kecil dan menengah alas kaki Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain memberikan bantuan permodalan juga dapat memberikan bantuan teknologi seperti mesin jahit untuk menjahit alas kaki dan lain sebagainya.

3. Untuk dapat mengembangkan promosi produk alas kaki maka di Kota Mojokerto perlu didirikan pusat pertokoan alas kaki, sehingga dalam hal ini pengrajin alas kaki dapat mempromosikan secara langsung produk yang mereka hasilkan karena dengan adanya pusat pertokaan sepatu maka produk alas kaki yang dihasilkan oleh pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
4. Untuk dapat membuka atau memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Mojokerto terutama untuk mengurangi pengangguran yang sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK se-derajat maka pelatihan industri alas kaki dapat dilakukan sebagai bekal pelajar lulusan SMA dan SMK untuk membuka usaha baru di sektor industri alas kaki, hal ini mengingat sumber daya manusia yang ada di Kota Mojokerto sebagian besar tidak dapat diserap oleh sektor formal dalam mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi, Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi, Sudharma. 2017. *Pengangguran di Kota Mojokerto Cenderung Naik, Disnakertrans: Job Fair hanya Kurangi 1 Persen*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2017 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2017/02/12/pengangguran-di-kota-mojokerto-cenderung-naik-disnakertrans-job-fair-hanya-kurangi-1-persen>
- Atmojo, et al. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Industri Kecil dan Menengah Batik di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban – Kabupaten Tuban)*. Wacana. Vol. 19, No. 4.
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. 2017. *Mojokerto dalam Angka 2017*. Diakses pada tanggal 3 Desember 2017 dari <https://mojokertokota.bps.go.id/index.php/publikasi>.
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. *Mojokerto dalam Angka 2017*.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan. Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Effendi, 1996. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja Dan Kemiskinan, Cetakan Ke-2*. Yogyakarta :Tiara Wacana Yogya.
- Hafsah, Muhammad jaffar. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol.8 (1) : 25.
- Indradi, Sjamsuddin, Sjamsiar. 2016. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Indradi, Sjamsudiin, Sjamsiar. 2006. *Dasar Dasar Teori Adiministrasi Publik*. Malang : AGRITEK YPN.
- Julianto, Pramdia, Arhando. 2017. *Agustus 2017, Jumlah Pengangguran Naik Menjadi 7,04 Juta Orang*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2017 dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126/agustus-2017-jumlah-pengangguran-naik-menjadi-704-juta-orang>
- Kacung, Marijan. 2005. *Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Kluster*. INSAN Vol. 7 No. 3.

- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Kartika Ayu Megasari. 2013. *Identifikasi Kesiapan Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM) Alas Kaki Di Kota Mojokerto Menghadapi Pasar Bebas Asean (Studi Kasus Kota Mojokerto)*. Vol.2 No. 2
- Khaz, Fitrahadi. 2017. *Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Pasar Untuk Mengatasi Pencari Kerja di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. JOM FISIP Vol. 4 No.1
- Lukman, Hakim. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mamun Sarma. 2014. *Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga Alas Kaki dalam Menuju Keberlanjutan Usaha dan Menghadapi China-ASEAN Free Trade Agreement*. diakses pada tanggal 5 Desember 2017 dari <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/8123>
- Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Miles, Mathew BA, Michael Huberman, Saldana 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI PRESS.
- Moleong, Lexy J 2012. *Metode penelitian Kualitataif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Bandung.
- Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Suwarsono. 2014 *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi*. Jakarta:Erlangga
- Nasirin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang : Indo Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia.
- P, Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga

- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabet
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaaan Industri Kecil dan Menengah. Mojokerto. Dewan Perwakilan Daerah Kota Mojokerto dan Walikota Mojokerto.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi. Jakarta. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Perindustrian No.64 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi. Jakarta. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.
- Priyatna. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pengukuran Keberdayaan Komunitas Lokal*. Jurnal Pemberdayaan.
- Sadono, Sukirno. 1995. *Pengantar teori mikroekonomi*. Jakarta : Bina Grafika.
- Sadono, Sukirno.2008. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta :PT. Raja Grafindo.
- Sedarmayanti. (2004), *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. 2017. *Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian 2016*. Jakarta.
- Siagian, Sondang, P. 2014. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Edisi I*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*. Bandung. Fokus Media.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar, Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suryaleksono, Bagus. 2015. *Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 1.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Rifa'I, Bachtiar. 2013. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 1, Nomor 1.
- Rusdiarti. 2011. *Pemberdayaan Perajin Tempe dalam Mengembangkan Sentra Industri Kecil Tempe di Kota Semarang*. JEJAK, Volume 4, Nomor 2.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta : Salemba. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta : UI-Press.
- Tjiptoherijanto, Prajono dan Abidin, Zainal, Said. 1993. *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tohar, M. 2001. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta : Kanisius.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1) tentang Perindustrian. Jakarta. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 pasal 72 Tentang Perindustrian. Jakarta. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.

Yusuf, Muri .2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.





PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Telp. (0321) 328704, Fax (0321) 328704
 email – bakesbangpol@mojokertokota.go.id

MOJOKERTO

REKOMENDASI

Nomor : 072/296 /417.405/2018

TENTANG
REKOMENDASI PENELITIAN

- Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011
2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
- Menimbang : Surat Permohonan dari Universitas Brawijaya Malang (UNBRA) Nomor : 214 / UN10.F03.11.11/PN/2018 Tanggal 9 Januari 2018
- Perihal : Ijin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Memberikan **REKOMENDASI** untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian kepada :

- a. Nama : Cicik Mamlu'ul Hikmah
- b. Alamat : Dsn. Pelem RT. 01 / 04 Ds. Cendoro Kec Dawar Blandong , Kab Mojokerto
- c. Nomor Induk KTM/KTP : 145030107111061
- d. Judul/Thema : Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Alas Kaki dalam Rangka Mengurangi Pengangguran
- e. Tujuan Penelitian
 - 1. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Mojokerto yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
 - 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Industri Kecil Menengah alas kaki oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
- f. Tempat : 1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
- 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
- g. Terhitung mulai tanggal : 01 Februari 2018 s/d 01 April 2018
- h. Nama Penanggung Jawab : Dr. Lely Indah Mindarti., M.Si
- i. Alamat : Jalan . MT . Haryono 163, Malang 65145

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan mentaati tata tertib sebagaimana terlampir.

Mojokerto, 25 Januari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO



ANANG FAHRUROJI, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I

NIP. 19670807 199203 1 005

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth
- 1. Bapak Walikota Mojokerto (sebagai laporan)
 - 2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
 - 4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Telp. (0321) 328704, Fax (0321) 328704
email – bakesbangpol@mojokertokota.go.id
MOJOKERTO

TATA - TERTIB PENELITIAN

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Dalam jangka waktu 1 X 24 Jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat, **terkecuali pelajar dan mahasiswa.**
3. Mentaati peraturan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kota Mojokerto
4. Menjaga tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan, menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Tidak diperkenankan mencari data yang tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan penelitian
6. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
7. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat pengajuan perizinan.
8. Apabila data yang diperlukan tidak dapat diberikan karena alasan tertentu, maka pengumpulan data hanya bisa dilayani dengan metode wawancara.
9. Setelah berakhir dilakukan survey/ riset diwajibkan :
 - a. Melaporkan kepada pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / riset sebelum meninggalkan daerah tempat survey / riset;
 - b. Melaporkan hasil Melakukan Survey / riset kepada Walikota Mojokerto Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.
10. Apabila batas waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari tidak membuat laporan / resume hasil survey, yang bersangkutan tidak dibuatkan Surat Keterangan selesai survey dan data hasil survey tidak disahkan (dibatalkan)
11. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
12. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



ANANG FAHRUROJI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670807 199203 1 005

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 214 /UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Walikota Mojokerto
Jl. Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Cicik Mamlu'ul Hikmah
Alamat : Dusun Pelem RT 01/RW 04, Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong,
Kabupaten Mojokerto
NIM : 145030107111061
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Alas Kaki dalam Rangka
Mengurangi Pengangguran (Studi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kota Mojokerto)
Lamanya : 2 (dua) Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 09 Januari 2018

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Lely Indah Mindarti, Dr., M.Si
NIP. 196905242002122002

Tembusan

1. Yth. Ka. Bakesbangpol Kota Mojokerto
2. Yth. Ka. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
3. Yth. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto

No.	Fokus	Pertanyaan	Informan
1.	Pemberdayaan industri kecil menengah alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	<p>a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif terhadap pemberdayaan industri kecil menengah alas kaki? 2. Bagaimanakah hasil pelaksanaan Penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto? <p>b. Pelatihan Sumber daya manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia (pelaku IKM alas kaki)? 2. Bagaimanakah hasil pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada pelaku IKM alas kaki? <p>c. Pengembangan kemitraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengembangan kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemberdayaan IKM alas kaki ? 2. Bagaimanakah hasil pengembangan kemitraan dalam upaya mewujudkan pemberdayaan IKM alas kaki? <p>d. Bantuan permodalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam 	Kepala Dinas atau pejabat terkait

		<p>memberikan bantuan permolan bagi pelaku IKM alas kaki?</p> <p>2. Bagaimanakah hasil Bantuan permodalan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam pemberdayaan IKM alas kaki?</p> <p>e. Mengembangkan promosi</p> <p>1. Bagaimanakah pemberdayaan IKM alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto melalui pengembangan promosi?</p> <p>2. Bagaimana hasil pengembangan promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto?</p>	
1.	Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan industri kecil menengah alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	<p>a. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan IKM alas kaki di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto?</p> <p>b. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan IKM alas kaki di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto?</p>	

No.	Fokus	Pertanyaan	Informan
1.	Pemberdayaan industri kecil menengah alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Mojokerto dalam mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto? 2. Apakah sektor industri kecil menengah sangat berpengaruh dalam mengurangi pengangguran? 3. Apakah keberadaan IKM alas kaki di Kota Mojokerto dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat? 4. Apakah pemberdayaan IKM alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan? 	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Mojokerto
2.	Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil menengah alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung pemberdayaan IKM alas kaki dalam mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto? 2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan IKM alas kaki dalam rangka mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto? 	

No.	Fokus	Pertanyaan	Informan
-----	-------	------------	----------

1.	Pemberdayaan industri kecil menengah alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	<p>a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemberdayaan IKM alas kaki yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto memberikan iklim yang kondusif pada pelaku IKM alas kaki? 2. Apakah iklim usaha dalam IKM alas kaki selama ini kondusif? <p>b. Pelatihan Sumber daya manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pelatihan SDM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dapat menghasilkan SDM yang berkualitas? 2. Bagaimanakah pelatihan SDM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto terhadap pelaku IKM alas kaki? <p>c. Pengembangan kemitraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengembangan kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berdampak baik terhadap IKM alas kaki? <p>d. Bantuan permodalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bantuan permodalan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto berdampak baik terhadap IKM alas kaki? 2. Bagaimanakah proses bantuan permodalan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto? 	Masyarakat (Pelaku Usaha IKM alas kaki)
----	--	---	---

Lampiran Foto Kegiatan Pengumpulan Data



Wawancara
dengan Ibu Iwiek Muzayana Selaku Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mojokerto



Wawancara dengan Ibu Yuli Selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja di Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

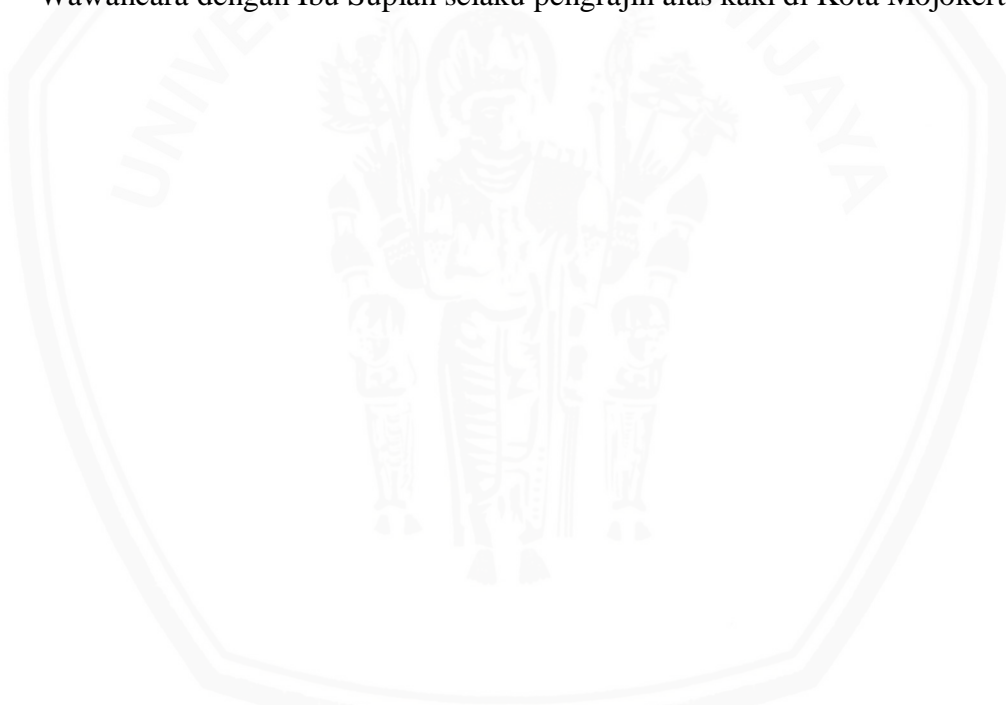


Wawancara dengan Bapak Wulyatin selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto





Wawancara dengan Ibu Supiah selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto



Wawancara dengan Bapak Sujono selaku pengrajin alas kaki di Kota Mojokerto



Tempat pelatihan IKM Alas Kaki di Kota Mojokerto

Sarana pendukung pelatihan IKM alas kaki di Kota Mojokerto

Ruang Berdiskusi pelatihan IKM alas kaki di Kota Mojokerto

